

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA IMPLEMENTASI
EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT**

**(Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa
Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**

TESIS

OLEH:

**DESIY FINDIA YUNIARDIKA
NIM: 17801006**



PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG

2022

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA PADA IMPLEMENTASI
EKONOMI SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT**

**(Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa
Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister Ekonomi Syariah

**TESIS
OLEH:**

DESIY FINDIA YUNIARDIKA (17801006)



PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Peran Badan Usaha Milik Desa pada Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.EI

NIP. 197507072005011005

Pembimbing II

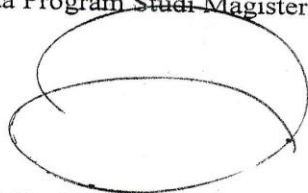


Dr. Siswanto M.Si

NIP. 197509062006041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, S.E, M.Si.

NIP.197202122003121003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul **Peran Badan Usaha Milik Desa pada Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)** ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2021.

Dewan Penguji,

Dr. Ir. Mashuri Machfudz, MP.

Ketua

NIDN. 0725066501

Prof. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag

Penguji Utama

NIP. 197112111999031003

Dr. H Misbahul Munir, Lc., M.EI

Anggota

NIP. 197507072005011005

Prof. Dr. Siswanto M.Si

Anggota

NIP. 197509062006041001

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

NIP. 19690303 2000003 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desiy Findia Yuniardika

NIM : 17801006

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa pada Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat dengan lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti ada unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 November 2021



Desiy Findia Yuniardika

NIM. 17801006

MOTTO

“Sesungguhnya Ilmu tidak terbatas, yang terbatas adalah Keinginan Kita”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk Kedua Orang tua saya beserta Keluarga Kecil

SayaAntoni Wijaya dan Anak saya Vechia Venny Wijaya yang selalu
memberikan dukungan materi dan doa.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Peran BUMDes dalam Implementasi Ekonomi Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din Al-Islam.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir tesis ini, tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni. M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI dan Prof. Dr. Siswanto, M.Si, selaku Dosen pembimbing yang selalu sabar dalam mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan baik berupa motivasi maupun materi,
7. Antoni Wijaya, Suami yang selalu menemani dan memberikan dukungan terhadap terselesainya karya ini
8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah 2017 dan para sahabat yang memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir Thesis ini.

9. Para sahabatku yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu dan mendorong saya dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan seluruh kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin.

Malang, 29 November 2021

Penulis,

Desiy Findiya Yuniardika

NIM 17801006

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

او = aw

ي = ay

وا = û

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan Tesis.....	iii
Pernyataan Orisinalitas Penelitian.....	iv
Motto.....	v
Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Pedoman Literasi.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Diagram.....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Orisinalitas Penelitian.....	21
F. Definisi Istilah.....	47
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	49
A. Badan Usaha Milik Desa.....	49
1. Pengertian BUMDes.....	50
2. Tujuan BUMDes.....	51
3. Fungsi BUMDes.....	51
4. Klasifikasi dan Jenis BUMDes.....	51
5. Faktor yang Menghambat Pertumbuhan dan Perkembangan BUMDes.....	53

6.	Prinsip Pengelolaan BUMDes.....	55
7.	Indikator Keberhasilan BUMDes.....	56
8.	Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat.	57
9.	BUMDes dalam Pandangan Ekonomi Syariah.	66
10.	Prinsip Pengelolaan BUMDes dalam Perspektif Islam.....	67
B.	Pemberdayaan Masyarakat.....	72
1.	Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	72
2.	Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.	76
3.	Strategi Penerapan Pemberdayaan.	78
4.	Definisi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pandangan Islam.	79
5.	Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat.	80
6.	Pemberdayaan Ekonomi menurut Pandangan Ekonomi Syariah.....	82
C.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	87
1.	Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	87
2.	Ruang Lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	88
3.	Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	89
4.	Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	91
5.	Pemberdayaan Ekonomi Menurut Pandangan Konvensional dan Syariah.....	93
D.	Maqasid Syariah.....	96
1.	Pengertian Maqasid Syariah.....	96
2.	Definisi Maqasid Syariah Berdasar Pendapat Ahli.....	98
3.	Maqasid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	99
E.	Kerangka Konseptual.....	106
BAB III METODE PENELITIAN.		109
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	109
B.	Kehadiran Peneliti.	109
C.	Latar Penelitian.....	111
D.	Data dan Sumber Data Penelitian.....	111

E. Teknik Pengumpulan Dara.	112
F. Tahapan Analisis Data.	115
G. Keabsahan Data.	118
BAB IV PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN.	120
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.	120
1. Letak Geografis BUMDes Kertoraharjo Unit Usaha Boonpring.	120
2. Profil Wisata BUMDes Kertoraharjo Unit Usaha Boonpring.	122
3. Sejarah Berdirinya BUMDes Kertoraharjo Unit Usaha Boonpring.	122
4. Tujuan Pendirian BUMDes Kertoraharjo Unit Usaha Boonpring.	124
5. Struktur Organisasi BUMDes Kertoraharjo Unit Usaha Boonpring.	125
6. Kegiatan Utama BUMDes Kertoraharjo Unit Usaha Boonpring.	128
7. Profil Singkat Informan.	131
B. Hasil Penelitian.	136
1. Peran BUMDes Kertoraharjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	136
2. Peran BUMDes dalam Implementasi Nilai Ekonomi Syariah.	146
BAB V PEMBAHASAN.	157
A. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	157
1. Fasilitator.	157
2. Mediator.	160
3. Stabilisator.	161
B. Peran BUMDES Kertoraharjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.	163
1. Penerapan Maqasid Syariah dalam DUMDes melalui Pemberdayaan.	174
2. Prinsip Pengelolaan BUMDes Kertoraharjo.	177

3. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	181
BAB VI PENUTUP.....	184
A. Kesimpulan.....	184
B. Implikasi	186
C. Saran	186
DAFTAR PUSTAKA.....	188
LAMPIRAN.....	193

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pengunjung Wisata Boonpring	14
Tabel 1.2	Tabel Penelitian Terdahulu.	31
Tabel 1.3	Kebaruan Penelitian.	41
Tabel 2.1	Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes.	52
Tabel 4.1	Jumlah Karyawan BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring.....	125
Tabel 4.2	Data Tanggapan Informan BUMDes.....	141
Tabel 4.3	Jawaban Informan Berkenaan dengan BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam	150

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Omzet Wisata Boonpring Tahun 2017-2019.....	15
Diagram 1.2	Jumlah Karyawan Boopring Tahun 2017-2019.....	16
Diagram 1.3	Pendapatan Asli Desa tahun 2017-2019.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.	107
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual.	108
Gambar 4.1	Peta BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring.	121
Gambar 4.2	Lokasi BUMDes Kerjo Raharjo Unit usaha Boonpring.	121
Gambar 4.3	Gambar Struktur Organisasi BUMDes Kertoraharjo.	126

ABSTRAK

Yuniardika, Desiy Findiya 2021 Peran Badan Usaha Milik Desa pada Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah (Studi Pada BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). Tesis. Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr H. Misbahul Munir, Lc, M.EI, (2) Prof. Dr. Siswanto, M.Si.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, BUMDes, Maqasid Syariah

BUMDes Kertoraharjo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang pariwisata, dimana dalam pengelolannya membutuhkan banyak tenaga serta jika usaha tersebut berhasil maka, akan berdampak pada usaha-usaha lain disekitarnya seperti penginapan dan perdagangan. Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus penelitian dan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai melalui pemberdayaan masyarakat dengan pandangan ekonomi syariah.

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian penelitian lapangan yang mana digunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data ialah dengan reduksi data yang kemudian ditarik kesimpulan, kemudian digunakan teknik triangulasi dalam pengecekan data.

Berdasar penelitian, diperoleh hasil bahwa Peran BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto dalam Implementasi Ekonomi Syariah adalah sebagai Fasilitator yang memberikan fasilitas untuk masyarakat berupa Lapak berjualan, Modal, serta menjadi Karyawan. Kedua, mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan. Stabilisator BUMDes membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun. Sedangkan dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat dilakukan dengan pendekatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Penguatan BUMDes, Pelatihan Manajemen Usaha, Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga, Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata, Pemberian Kursus Bahasa Inggris. Proses pengelolaan BUMDes ini sudah sesuai dengan ekonomi Syariah dimana dalam ekonomi syariah Prinsip pengelolaan BUMDes ini terdapat Syirkah atau kerja baik dari segi permodalan sampai dengan segi pengelolaan. Keikutsertaan dimana dalam BUMDes Kertoraharjo ini seluruh masyarakat terlibat dan pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat Sanankerto untuk masyarakat sanankerto sendiri. Transparansi, seluruh kegiatan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Akuntabel, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh BUMDes sudah diperhitungkan baik dari sisi pendanaan, dampak terhadap alam, sampai dengan kesejahteraan masyarakat sehingga dicapailah aspek utama Maqasid Syariah yakni terjaganya Al-Daruriyat, Terjaga dari Al-Hajiyat, dan terjaga dari tahsiniah Selain itu untuk para pegawai di BUMDes dipotong gajinya untuk Zakat Tahunan, atau dilakukan pemotongan untuk simpanan zakat.

مستخلص البحث

ديسي فنديا يونيردكا، ٢٠٢١. دور الشركات المملوكة للقرية في تنفيذ اقتصاديات الشريعة في التمكين الاقتصادي للشريعة دراسة في *BUMDes Kerto Raharjo Ecotourism Business Unit* في القرية سننكورتور تورين مالانج *Boonpring Village* فرضية الرسالة الماجستير قسم الاقتصادية هلشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف (1) د. مصباح المنير الماجستير، (2) دز سيسوانتو م.

الكلمات الساسية: التمكين الاقتصادي، BUMDes، مقاصد الشريعة.

BUMDes Kertoraharjo هي واحدة من اشركات المملوكة القرية العاملة في مجال السياحة حيث تتطلب إدارتها الكثير من الطاقة وإذا نجحت الأعمال التجارية فسيكون لها تأثير على الأعمال الأخرى من حولها مثل السكن والتجارة. تركز هذه الدراسة على تمكين المجتمع الذي هو محور البحث وكيفية تحسين اقتصاد المجتمع وفقاً لتمكين المجتمع من منظور اقتصادي شرعي.

منهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث النوعي مع نوع البحث الميداني الذي يستخدم استخدام تقنية التثليث

بناءً على البحث وجد أن دور BUMDes Kertoraharjo في قرية سانانكيرتو في تنفيذ الإقتصاد الشرعي لمجتمع قرية سانانكيرتو كان بمثابة الميسر الذي قدم السهيلات للمجتمع في وحدة أعمال Boonpring، بالطبع كان هناك تسهيلات البيع ورأس المال وكونك موظفاً في إرادة وحدة أعمال. Boonpring ثانياً العمل كوسيط يتوسط في جميع العمليات التجارية ويساعد المجتمع في حل جميع المشكلات في الأعمال بدأً من مشاكل رأس المال والتسويق إلى الإدارة المالية للأسرة من خلال التدريب الروتيني المقدمز والثالث هو الدور كعامل استقرار حيث يحاول BUMDes من خلال برنامج تمكين المجتمع هذا مساعدة اقتصاد المجتمع على الالبقاء مستقرًا على الرغم من تقلب الدجلز وفي الوقت نفسه BUMDes Kertoraharjo في قرية Sanankerto Village في التمكين الاقتصادي لمجتمع Sanankerto Village في نصح الشريعة الإقتصادية الموارد البشرية، تدريب BUMDes وتعزيزها التدريب على إرادة الأعمال للتجار والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والتدريب على الإدارة الاقتصادية للأسرة بناء القدرات لمجموعة التوعية السياحية تقديم دورات لغة انجليزية. الشفافية تقدم جميع الأعمال علانية. تم اخذ كل مااستقوم به BUMDes في الإعتبار من حيث التمويل والتأثير على الطبيعة ورفاهية المجتمع بحيث يتم تحقيق الجوانب الرئيسية مقاصد الشريعة بمحافظة من الحاجيات ويحافظ من تحسينات حيث ذلك للموظف BUMDes يقطع الإجرة الزكاة سنوي او يقطع لوديعة الزكاة لأجل أن الأجرة المقطوع من الموظف هي الأجرة الوظيفية التي ينقص الزكاة.

ABSTRACT

Yuniardika, Desiy Findiya 2021 The Role of Village-Owned Enterprises in the Implementation of Sharia Economics in Sharia Economic Empowerment (Study at BUMDes Kerto Raharjo Ecotourism Business Unit Boonpring Village, Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency). Thesis. Postgraduate Islamic Economics Masters Study Program at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor (1) Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI, (2) Prof. Dr. Siswanto, M.Si.

Keywords: Economic Empowerment, BUMDes, Maqasid Syariah

BUMDes Kertoraharjo is one of the Village-Owned Enterprises engaged in tourism, which in its management requires a lot of energy and if the business is successful, it will have an impact on other businesses around it such as lodging and trade. This study focuses on community empowerment which is the focus of research and how to improve the community's economy according to community empowerment with a sharia economic view.

The research method used in this research is qualitative research with the type of field research research which uses interview, observation, and documentation methods. As for the data analysis technique, data reduction is then drawn, then a triangulation technique is used to check the data.

Based on the research, it was found that the role of BUMDes Kertoraharjo in Sanankerto Village in the Implementation of Sharia Economics was as a facilitator who provided facilities for the community in the form of selling, capital, and becoming employees. Second, a mediator who mediates the entire business process and assists the community in solving all problems. BUMDes stabilizers help the community's economy to remain stable even though incomes fluctuate. Meanwhile, in the community's Economic Empowerment, the approach is Human Resources, BUMDes Training and Strengthening, Business Management Training, Household Economic Management Training, Capacity Building for Tourism Awareness Groups, Providing English Language Courses. The process of managing this BUMDes is in accordance with the Islamic economy where in the sharia economy the principle of managing this BUMDes is Syirkah or work, both in terms of capital and in terms of management. Participation in which the entire community is involved in the Kertoraharjo BUMDes and the management is carried out by the Sanankerto Community for the Sanankerto community themselves. Transparency, all activities are communicated to the public openly. Accountable, everything that will be done by BUMDes has been taken into account both in terms of funding, the impact on nature, to the welfare of the community so that the main aspects of Maqasid Syariah are achieved, namely maintaining Al-Daruriyat, Guarding from Al Hajiyat, and guarding from tahsiniah. in BUMDes their salary is deducted for Annual Zakat, or deductions are made for zakat savings. So that the salary received by the employee is the net salary that has been deducted by zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi merupakan sebuah ilmu yang mengatur urusan rumah tangga dimana anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh¹. Ekonomi merupakan salah satu ilmu yang penting kehidupan manusia karena Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan kita tinggal, apa yang kita makan, pendidikan, pekerjaan dan seberapa yang kita hasilkan.²

Sebuah perekonomian dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai pertumbuhan yang optimal. Dimana proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas yang nantinya akan meningkatkan pendapatan. Adam Smith juga menggarisbawahi pentingnya skala ekonomi, dengan meluasnya pasar akan terbuka inovasi-inovasi baru yang pada gilirannya akan mendorong perluasan pembagian kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.³

¹ Abdul aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro (Yogyakarta: graha Ilmu 2008), h. 1.

²Salvatore Dominick, prinsip-prinsip ekonomi, (Jakarta: Erlangga 1991) h. 2.

³Mardikanto totok dan soebiato Poerwoko, pemberdayaan masyarakat (Bandung: Alfaebeta, 2017) h. 11.

Menurut Ibnu Khaldun salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah dengan pembagian tenaga kerja dalam proses produksi sesuai dengan keahlian masing-masing. Selain dapat membuka lapangan kerja cara tersebut mampu untuk menghilangkan sifat egoistik yang dapat menimbulkan ketamakan dan menghasilkan kesengsaraan manusia.⁴ Manusia cenderung bersifat egoistik karena keinginannya untuk mencapai sebuah kehidupan yang layak serta mampu mensejahterakan hidupnya secara pribadi.

Kesejahteraan yang dimaksud adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Karena itu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.⁵

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ada lima faktor yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat dapat dikategorikan sejahtera, yaitu anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih, seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda dirumah, sekolah, bekerja dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, bila anak sakit

⁴Samsinas, kajian tokoh sejarah dan ilmu-ilmu sosial, (Jurnal Hunafa: Vol. 6, No. 3, Desember 2009) h. 329-346.

⁵www.bkbn.go.id (diakses pada 11 February 2018)

PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB (Keluarga Berencana) ke sarana petugas kesehatan serta diberi cara KB (Keluarga Berencana) modern.⁶

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, karena kesejahteraan itu sendiri mampu memberi dampak terhadap masyarakat. Beberapa dampak tersebut adalah pertama, masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, masyarakat memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain.⁷

Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan pemberdayaan atau *empowerment*. Pemberdayaan merupakan strategi atau paradigma pembangunan yang diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Paradigma ini muncul sebagai jawaban atau reaksi dari kegagalan pembangunan yang cenderung sentralistis. Model tersebut memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan,

⁶www.bkbn.go.id (diakses pada 11 February 2018)

⁷Nur Mahmudi Ismail, strategi pemberdayaan umat dan pencetakan SDM unggul (Bandung: ISTECS, 2001) h. 28.

terutama dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.⁸

Pemberdayaan adalah suatu program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dimana dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian bagi warga sekitar. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, langkah ini menjadi bagian dalam meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.⁹

Al-Qur'an telah menyebutkan dalam surat Ar-ra'd ayat 1¹⁰ Allah telah menyeru kepada seluruh umat manusia agar senantiasa berusaha untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Dalam ayat itu juga menjelaskan jika seburuk apapun keadaan manusia dapat berubah jika ada kemauan dalam dirinya. Menurut Mardi Yatmo Hutomo Pemberdayaan dapat dicapai melalui Bantuan Modal, Bantuan Pembangunan Prasarana, Bantuan Pendampingan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Kemitraan Usaha.¹¹

Bahkan pemerintah selalu menggalakkan program tentang pemberdayaan ekonomi salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat

⁸ Iswan gemayana, strategi pemerintah kabupaten sukamara dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, (jurnal Wacana Vol. 13 No. 1 Januari 2010) h. 188.

⁹ Abdul Bashith, Ekonomi Kemasyarakatan (Malang: UIN Maliki Press, 2012) h. 27.

¹⁰ Q.S. Ar rad ayat 11

¹¹ Mardi yatmo Hutomo, pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, h. 8-9

desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada setiap desa agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.¹²

Berdasarkan undang-undang yang terbaru sesuai dengan program Jokowi dan Jusuf Kalla yang akan membangun Indonesia melalui pinggiran yaitu daerah pedesaan. Maka muncullah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.¹³

Kawasan pinggiran memang selalu menjadi permasalahan bagi negara dimana kawasan desa yang identik dengan tertinggal, terisolasi bahkan mayoritas penduduk tidak mengenyam pendidikan, mereka hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai tingkat Sekolah Dasar. Hal ini

¹²<http://www.aminjaya.desa.id> (diakses pada 11 Februari 2018)

¹³Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia

mengindikasikan bahwa desa adalah salah satu daerah yang harus diperhatikan.¹⁴

Indonesia terdiri atas kurang lebih 82 ribu desa. Artinya, negeri ini punya lebih dari 80 ribu ciri khas dan potensi¹⁵ Pembangunan yang selalu berfokus di kota menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, desa tidak lagi menarik bagi warga usia produktif.

Mengelompokkan pengembangan ekonomi kreatif dan produktif di desa-desa seluruh Indonesia adalah salah satu cara agar urbanisasi tidak lagi terjadi, daerah perkotaan yang semakin sempit menjadi tujuan utama para pemuda untuk mengadu nasib meningkatkan pendapatan. Mereka menganggap bahwa desa tidak mempunyai sesuatu yang menjanjikan di masa yang akan datang sehingga mereka memilih untuk urbanisasi. Namun melihat jumlah desa yang lebih banyak dari daerah perkotaan seharusnya pandangan itu sudah tidak lagi berlaku karena setiap desa mempunyai potensi yang berbeda yang bisa dikembangkan oleh karena itu dalam mengembangkan potensi desa butuh banyak pihak yang terlibat seperti masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Desa menjadi agen

¹⁴www.kerjanya.id (diakses pada 4 Februari 2018)

¹⁵Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030.

pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberi mandat kepada pemerintah tingkat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri. salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDES juga diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur di desa. Maka dari itu, BUMDes sebagai sara instrumen penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.

Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya. Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah bagi pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa.¹⁶BUMDes adalah lembaga usah desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

¹⁶ Disampaikan oleh Yayasan Penabulu dalam Rapat Telaahan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa PDTT tentang Konteks Pemberdayaan Masyarakat dalam Permendesa No. 4/2015 dan Permendagri No. 39/2010 di Jakarta, 27 Mei 2016.

BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut: (1) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa). (2) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. (3) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. (4) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi

¹⁷www.kerjanyaata.id (diakses pada 4 Februari 2018)

Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.¹⁸

Namun cita-cita tersebut belum tercapai secara maksimal seperti yang diketahui bahwa masih banyak desa yang terkategori sebagai desa tertinggal daripada kategori desa maju. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf Agunggunanto bahwa belum tercapainya tujuan utama BUMDes yaitu meningkatkan perekonomian desa. Hal tersebut disebabkan oleh jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.¹⁹

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Aang Wints (2017) di BUMDes Maju Makmur menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Maju Makmur dalam mengelola Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan modal yang diberikan serta pemasaran yang telah dilakukan pihak BUMDes, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa BUMDes Maju Makmur efektifitas dalam pengembangan usaha dimana usaha masyarakat dapat dikatakan efektif bila usaha yang dijalankan dapat berkembang, baik dari hasil produksi usaha atau berdirinya usaha-usaha baru masyarakat.

¹⁸Kementrian Desa Daerah tertinggal (diakses pada 4 Februari 2018)

¹⁹Edy Yusuf Agunggunanto, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Miiik Desa (BUMDes), dalam (jurnal BISNIS, Vol. 4, No. 1, Juni 2016)

Penelitian yang berkenaan dengan peran BUMDes dalam pemberdayaan telah dilakukan oleh Hardijono (2014), Samadi (2016), dan Darwita dan Redana (2018) yang memperoleh hasil bahwa dengan keberadaan BUMDes kondisi ekonomi masyarakat cenderung meningkat, sehingga BUMDes cukup berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti Sebagai pemaksimal utilitas, stabilitas, dan efisiensi. Selain itu keberadaan BUMDes ini juga berperan sebagai Fasilitator, Stabilisator, dan Inovator dalam pengembangan potensi masyarakat.

Sedangkan hasil yang berbeda di peroleh dari penelitian yang telah dilakukan Dewi (2014) dan Yani (2012) yang memperoleh hasil bahwa BUMDes tidak cukup berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hal ini dikarenakan adanya aturan pemerintah yang cenderung mengikat dan menjadikan pengelolaan memiliki batasan pengelolaan sehingga ekonomi masyarakat tidak terberdaya dengan baik.

Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik Desa diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pegurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.²⁰ Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa sebagian atau seluruh modal berasal dari desa untuk

²⁰Dida Rahmadanik, Peran BUMDes dalam pemberdayaan dalam masyarakatcokro kembang kec, ngadirojo kabupaten pacitan, <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/1293>. h.2.

kesejahteraan masyarakat desa. Jenis usaha yang dapat dijalankan pun harus berorientasi untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 diantaranya bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sangat penting. Hal ini dilatar belakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad-akad ekonomi islam sangat relevan. Ekonomi islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Kegiatan bisnis yang menggunakan sistem kapitalis berusaha menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil maksimal tanpa peduli

dampak kerugian yang mungkin timbul dari usahanya tersebut. Memungkinkan resiko tidak terpenuhinya hak atau kewajiban salah satu pihak yang melakukan transaksi. Namun dalam ekonomi islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi islam diatur dan mengacu pada sumber hukum islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Ijma.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mampu mendorong kemandirian ekonomi melalui pengelolaan destinasi ekowisata unggulan.

Jika dilihat dari latar belakang desa, Desa Sanankerto mempunyai potensi untuk dijadikan sebuah tempat pusat perekonomian seperti tempat wisata di karenakan terdapat berbagai macam tanaman bamboo yang tumbuh di Desa Sanankerto. BUMDes Kertoraharjo mampu mendirikan sebuah wisata buatan ditengah-tengah desa dengan memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan taman bermain, ada beberapa macam tanaman bambu yang bisa dipelajari.

Salah satu unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Kerto Raharjo desa sanan kerto adalah unit usaha pariwisata, unit usaha wisata BUMDes kerto raharjo mengangkat ekowisata sebagai destinasi wisata yang dikeloladan menjadi unit usaha unggulan. Lokasi ekowisata tersebut

memiliki dua danau buatan yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung. Selain usaha dibidang pariwisata BUMDes juga memiliki beberapa usaha lain yaitu Unit agen BNI, Bank Sampah, UKM, Kuliner dan saat ini BUMDes menambah sektor binaan grosir sembako dan air mineral.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa unit usaha yang menjadi unggulan adalah unit usaha ekowisata yang bernama Boonpring, ekowisata boonpring sendiri awalnya merupakan tanah kas desa. Unit usaha Ekowisata Boonpring BUMDES Kerto Raharjo menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Malang, BUMDes Karto raharjo juga telah berhasil meraih juara satu tingkat Nasional dalam Jambore BUMDes yang diselenggarakan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (BPMD) Provinsi Jawa Timur. Jambore BUMDes ini merupakan format untuk membangun ekonomi dari desa dengan meningkatkan potensi yang ada.²¹

Desa wisata Boonpring di Desa Sanankerto ini juga meraih penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2019, even ini merupakan ajang penghargaan untuk wisata hijau dan pariwisata yang berkelanjutan pada ajang tingkat nasional yang digelar oleh kementrian

²¹ <https://www.malangpostonline.com/Malang-Raya/Kabupaten-Malang/2019-05/16848/jambore-BUMDes-bangun-ekonomi-masyarakat-desa> Diakses tanggal 10 November 2019.

pariwisata (kamenpar), Desa Sanankerto memperoleh Green Bronze untuk katagori manfaat ekonomi.²²

Jumlah pengunjung wisata boonpring milik BUMDES Kerto raharjopun terus bertambah tiap tahunnya, hal tersebut dapat kita lihat pada tabel jumlah pengunjung dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pengunjung Wisata Boonpring

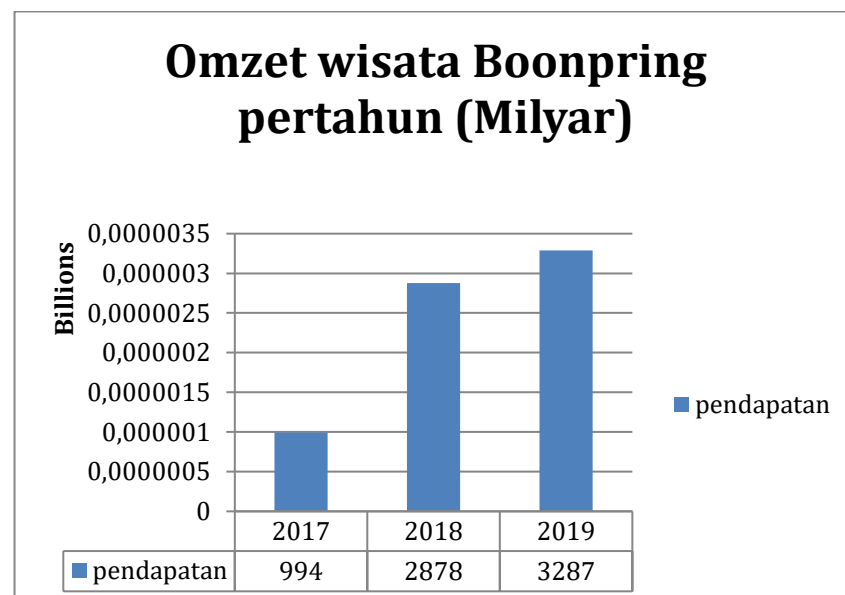
NO	BULAN	2017	2018	2019
1	Januari	3.569	13.163	20.484
2	Februari	2.864	8.652	10.372
3	Maret	3.389	8.331	9.087
4	April	4.065	9.274	11.685
5	Mei	4.299	4.913	6.247
6	Juni	4.525	20.837	7.812
7	Juli	13.932	16.654	13.173
8	Agustus	3.942	5.639	22.123
9	September	5.329	6.670	6.186
10	Oktober	6.303	7.833	8.229
11	November	5.212	10.513	9.321
12	Desember	18.613	23.022	17.017
TOTAL		76.042	135.501	141.732

²² <https://kumparan.com/tugumalang/wisata-boon-pring-dan-alas-lestari-raih-penghargaan-ista-2019-1rwaNUiOrJw> Diakses tanggal 10 september 2019.

Sumber : Dokumen BUMDes²³ (Diolah Peneliti, 2020)

Seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke ekowisata BUMDES Kerto Raharjo juga berdampak pada peningkatan jumlah pendapatannya, peningkatan jumlah pendapatan wisata BUMDES Kerto Raharjo dapat kita lihat pada diagram berikut:

Diagram 1.1
Omzet Wisata Boonpring Tahun 2017-2019



Sumber: Dokumen BUMDes Desa Sanankerto (Diolah Peneliti, 2021)

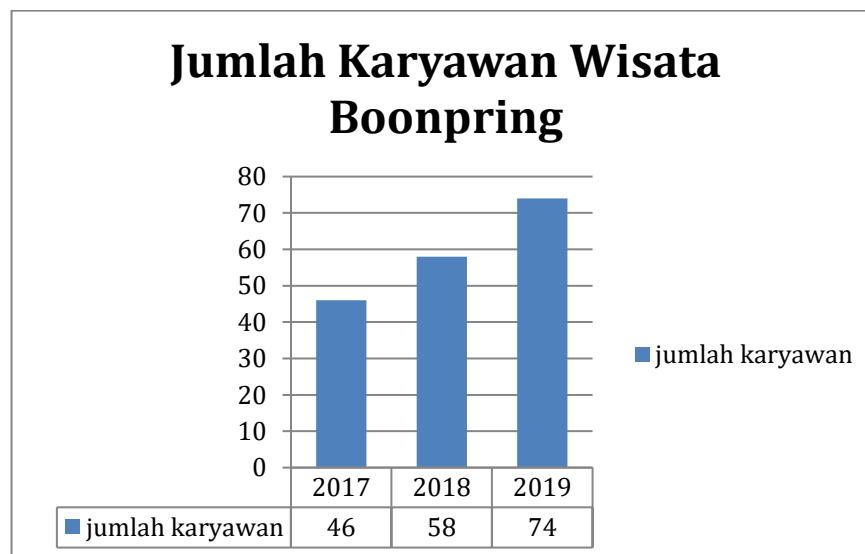
Dengan jumlah pengunjung yang banyak dan jumlah pendapatan yang juga besar ekowisata boonpring milik BUMDES Kerto Raharjo Saat ini, telah membuka lapangan kerja terhadap kurang lebih 75 orang warga Desa Sanankerto. Selain itu, pengembangan ekonomi juga dilakukan

²³ Data jumlah pengunjung unit usaha ekowisata BUMDes kerto raharjo desa sanankerto tahun 2017 sampai 2019.

melalui pembukaan kedai-kedai makanan yang ada di lokasi ekowisata Boonpring. Setidaknya, saat ini sudah ada 60 kedai atau warung yang dikelola oleh BUMDes dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sanankerto. Semua pelaku usaha yang ada, merupakan warga Desa Sanankerto dan tidak melibatkan pihak lain. Peningkatan jumlah karyawan pada ekowisata boonpring BUMDES Kerto Raharjo dapat dilihat pada dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1.2

Jumlah Karyawan Boonpring Tahun 2017-2019

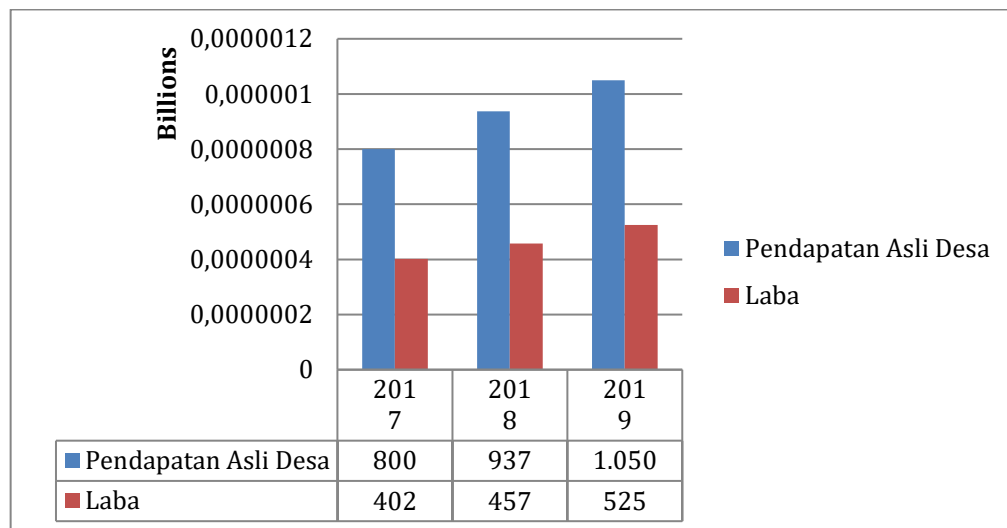


Sumber: Dokumen BUMDes Desa Sanankerto (Data diolah Peneliti, 2020)

Dengan jumlah karyawan yang terus mengalami peningkatan selama periode penelitian, berpengaruh terhadap omzet yang dihasilkan oleh BUMDes kerto raharjo pada 2017 tercatat sebesar Rp994 juta, dan naik menjadi Rp2,8 miliar pada 2018. Dari omzet tersebut, Boonpring mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) selama dua tahun

mencapai Rp517 juta pada tahun 2019,²⁴ peningkatan jumlah pendapatan BUMDes dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1.3
Pendapatan Asli Desa tahun 2017-2019



Sumber : Wawancara Direktur BUMDes (Data diolah peneliti, 2020)

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode penelitian yaitu tahun 2017-2019. Baik pendapatan maupun laba mengalami tren naik selama penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam pengelolaan BUMDes sehingga hasil usaha ini terus mengalami kenaikan.

Dari adanya sejumlah prestasi yang telah dicapai oleh unit wisata BUMDES Kerto Raharjo yaitu pada ajang jambore BUMDES, dan juga penghargaan Indonesia sustainable tourism award diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sanankerto

²⁴Samsul Arifin, wawancara, (Desa sanankerto, hari sabtu 23 November 2019).

Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Jika dilihat lebih dalam memang adanya prestasi tersebut terdorong dari berbagai hal salah satunya yakni Aspek usaha dari BUMDes ini bukan hanya berfokus pada pariwisata akan tetapi potensi lainnya yang dimiliki oleh Desa Salah satunya yakni potensi pertanian Bambu yang mana Wilayah ini merupakan wilayah penghasil Bambu paling banyak di Wilayah Kabupaten Malang dengan variasi Bambu yang bermacam-macam. Selain itu di wilayah ini juga terdapat komoditas pertanian lain seperti Mendong yang dapat diolah menjadi bahan kerajinan dan oleh-oleh. Selain itu BUMDes ini memiliki usaha yang bentuknya Swalayan dan menjalin kerja sama dengan Bank BNI Syariah. Pimpinan dari BUMDes Kertoraharjo ini memberikan kewajiban bagi para stafnya untuk melakukan pembayaran zakat penghasilan yang langsung dipotong dari gaji bulanan melalui tabungan zakat di Bank BNI syariah.

Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pendirian BUMDes karena tujuan dari didirikannya BUMDes adalah untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dari adanya hal tersebut pada penelitian ini akan membahas mengenai peran BUMDes Kerto Raharjo dalam memberdayakan masyarakat desa sanan kerto kecamatan turen kabupaten malang yang kemudian ditinjau dari ekonomi syariah.

Dari pemaparan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan objek penelitian yaitu DUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. BUMDes Kertoraharjo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang pariwisata, dimana dalam pengelolannya membutuhkan banyak tenaga serta jika usaha tersebut berhasil maka akan berdampak pada usaha-usaha lain disekitarnya seperti penginapan dan perdagangan. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) dengan perbedaan penelitian yang terletak pada adanya pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus penelitian, serta merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) dengan perbedaan penelitian terletak pada bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai melalui pemberdayaan masyarakat dengan pandangan ekonomi syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas mengenai bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, maka yang menjadi fokus pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BUMDES Kerto Raharjo dalam Implementasi Ekonomi Syariah masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

2. Bagaimana peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BUMDES Kerto Raharjo dalam Implementasi Ekonomi Syariah masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Khazanah Keilmuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan khususnya dalam Meningkatkan Ekonomi masyarakat Desa Sanankerto.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan mengembangkan potensi diri, memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto.

3. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN)

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pustaka di perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang (UIN) dan dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi mahasiswa khususnya diprogram studi Ekonomi Syariah.

4. Bagi Pengurus BUMDes.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan Kegiatan Kelembagaan BUMDes.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Agar memberikan gambaran secara komprehensif berkenaan dengan penelitian ini, maka peneliti memaparkan kajian-kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Suryati (2012) yang bertujuan untuk mengetahui prospek usaha pengrajin terasi Desa Kuala Merbau dalam meningkatkan pendapatan keluarga, faktor penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Kuala Merbau dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dan perspektif ekonomi Islam terhadap usaha pengrajin terasi Desa Kuala Merbau dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prospek pengrajin terasi desa Kuala Merbau sangat baik, faktor penghambat yang ditemui oleh pengrajin terasi Desa Kuala Merbau adalah biaya produksi, sumber daya manusia yang belum profesional, dan masih minimnya modal pemasaran. Usaha

pengrajin terasi ditinjau dari menurut ekonomi islam, tidak ditemukan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Sri Kusuma dewi (2014) yang bertujuan untuk melihat Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes. Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan untuk memajukan desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan Asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian secara utuh dan menyeluruh.²⁶

Penelitian yang dilakukan Rachmat Hardijono dkk (2014) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes di Ketindan Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, dan Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir sebagai lembaga desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa

²⁵ Suryati, Usaha Pengrajin Terasi dalam meningkatkan perekonomian keluarga menurut ekonomi Islam (studi kasus Desa Kualu merbau kecamatan merbau kepulauan meranti), Skripsi SE, (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 2.

²⁶ Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa, Jurnal of Rural and Development Volume V no 1, (Universitas Brawijaya, 2014)

yang selama ini dianggap sebagai penduduk yang terpencil dan terisolasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan BUMDes mengacu pada maksimalisasi utilitas sebagai tujuan, Struktur organisasi BUMDes yang berada di luar struktur pemerintah desa tidak selalu stabil dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada warga desa begitupun Warga desa ditugaskan sebagai petugas dan karyawan BUMDes lebih banyak motivasi dan orientasi berdasarkan non material, yaitu rasa hormat dan penghargaan secara sosial dan politik daripada ekonomi. Lembaga BUMDes mengedepankan tujuan memaksimalkan kegunaan air untuk pemenuhan masyarakat (kesejahteraan) warga desa, ketimbang memaksimalkan keuntungan bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa.²⁷

Penelitian yang dilakukan Umi Hidayati (2015) dengan tujuan untuk menguji kinerja perangkat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tiga indikator yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di Nganjuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan pekerjaannya, manajer tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya serta hanya beberapa tujuan BUMDes yang telah dicapai.²⁸

²⁷Rachmat Hardijono, Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes), dalam jurnal IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 3, Issue 2, Apr 2014

²⁸Umi Hidayati, Performance Analysis of Village-Owned Enterprise Managers as a Basic of Designing Education and Training, (European Journal of Business and Management, Vol.7, No.32, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Humaidi (2015) tujuan penelitiannya adalah untuk Mengkaji manajemen pengelolaan industri kerajinan tangan dan Untuk mengetahui taraf perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah menggeluti kerajinan tangan di desa tutul. Hasil dari penelitian ini yaitu manajemen pengelolaan di industri kerajinan tangan di Desa Tutul meliputi permodalan, bahan baku, produksi dan pemasaran. Keberadaan industri kerajinan tangan Desa Tutul mempunyai dampak positif terhadap masyarakat yaitu berkurangnya angka pengangguran, meningkatkan taraf perekonomian serta banyaknya masyarakat yang baralih profesi dari buruh tani menjadi karyawan dirumah produksi dikarenakan pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada saat menjadi buruh tani.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Samadi, dkk (2016) yang bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat, khususnya masyarakat pengguna dana BUMDes di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Hasil dari penelitiannya yaitu peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan

²⁹ Ismail Humaidi, Peningkatan perekonomian masyarakat melalui industri kecil: studi terhadap masyarakat industri kecil di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember jawa timur. (Universitas islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Erika Kusuma Yudha (2017) yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan bambu. Hasil Penelitian nya yaitu upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui kerajinan anyaman bambu yaitu menambah pendapatan ekonomi dengan mencukupi kebutuhan keluarga dan mampu membiyai sekolah anak atau cucunya. Selain itu juga masyarakat menjadi berkembang dalam segi kreatif dan terampil dalam mendesain dan menciptakan produk local dengan mendepankan bahan alami yang ramah lingkungan. Dengan adanya kerajinan anyaman bambu motivasi masyarakat untuk berfikir kearah lebih maju, selain itu juga merubah gaya hidup mereka yang awalnya tidak memiliki kendaraan sehingga memudahkan mereka dalam beraktifitas sehari-hari.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Sentosa Simbring, dengan judul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif yang

³⁰ Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal, Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (studi pada BUMDes desa pekan tebih kecamatan kepenuhan hulu kabupaten rokan hulu), Jurnal of Rural and Development, 2016.

³¹ Erika Kusuma Yudha, Peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan tangan anyaman bambo di desa rimpak kecamatan sapuran kabupaten wonosobo, (Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2017).

menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan tentang BUMDES yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.³²

Ramadana, dkk yang meneliti tentang Keberadaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, penelitian ini membahas tentang kesesuaian pembentukan BUMDES Desa Landung sari dengan peraturan desa dan melihat sumber dana yang dimiliki BUMDES Desa Landung sari dalam meningkatkan pendapatan desa.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Adhari dan Ismaidar yang berjudul Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat pada penelitian ini mendeskripsikan tentang kesesuaian proses pendirian/pembentukan BUMDes di kecamatan babalan dengan undang-undang BUMDES (Peraturan Menteri No. 4 tahun 2015).³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati, dkk pada tahun 2019 yang berjudul kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir (2014-2018). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

³²Sentosa Simbring, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Kertha Patrika Volume 39, No 1, April 2017.

³³Coristiya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa, Jurnal Administrasi publik(JAP), Vol. 1, No 6.

³⁴Agus Adhari, Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 1 November 2017,

kuantitatif dengan menggunakan analisis data terdiri dari analisis pertumbuhan, efektivitas, dan proposi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 110,68%, kemudian tingkat efektivitas penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 90,49 atau berada pada kategori efektif, selanjutnya kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 1,73 atau berada pada kategori sangat kurang³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Rumende, dkk yang dilakukan pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di Pt. Bank Sulutgo). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kontribusi PT. Bank SulutGo dalam PAD, dan mengetahui pertumbuhan kontribusi PT. Bank SulutGo terhadap PAD. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah ternyata mempunyai hubungan yang tidak terlalu besar dengan pembagian dividen badan usaha milik daerah sehingga kontribusi peningkatan yang terjadi pada pembagian dividen masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan

³⁵Nurmiati, dkk, Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Jurnal UIT: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIT

asli daerah. Pendapatan asli daerah juga masih belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara.³⁶

Budhisulistyawati, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penelitian ini bertujuan menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan BUMD pada umumnya dan BUMD perseroda secara khusus, yang mencakup jenis dan bidang usaha, corporate structure, sumber daya manusia yang mengelola BUMD, dan manajemen yang digunakan untuk mengelola BUMD, serta menemukan strategi pengelolaan BUMD persero dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan BUMD, dapat dirinci sebagai berikut :Terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD, permasalahan manajemen pengelolaan, permasalahan SDM, permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD, dan permasalahan restrukturisasi BUMD.³⁷

Darwita dan Redana dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2018 dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

³⁶Rumende, Dkk, Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di Pt. Bank Sulutgo), Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol.19 No.9. April 2019

³⁷Budhisulistyawati, dkk, Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2017.

dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Penelitian ini memperoleh hasil Temuan penelitian bahwa peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMDes dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.³⁸

Anggraeni dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses

³⁸Darwita dan Redana, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018

masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.³⁹

Dewi dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2014 dengan judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa yang menemukan bahwa kedudukan BUMDES belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.⁴⁰

Yani (2012) dalam penelitiannya yang Berjudul Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam pendirian BUMD harus selalu didasarkan pada aturan paten dari pemerintah setempat, sehingga tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat terlaksana⁴¹

³⁹Anggraeni, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Jurnal MODUS Vol. 28 (2), 2016.

⁴⁰Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Journal Of Rural And Development Volume V No. 1 Februari 2014.

⁴¹Yani, Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah Di Aceh), Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 56, Th. XIV (April, 2012), pp. 119-137

Tabel 1.2
Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	2012	Suryati	<p>untuk mengetahui prospek usaha pengrajin terasi Desa Kuala Merbau dalam meningkatkan pendapatan keluarga, faktor penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Kuala Merbau dalam meningkatkan pendapatan keluarga, dan perspektif ekonomi Islam terhadap usaha pengrajin terasi Desa Kuala Merbau dalam meningkatkan pendapatan keluarga.</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prospek pengrajin terasi desa kualu merbau sangat baik, faktor penghambat yang ditemui oleh penegrajin terasi Desa Kualu Merbau adalah biaya produksi, sumber daya manusia yang belum profesional, dan masih minimnya modal pemasaran</p>

2.	2014	Amelia Sri Kusuma dewi	untuk melihat Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan.	Kualitatif Deskriptif	Adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan untuk memajukan desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDes benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan Asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian secara utuh dan menyeluruh.
3.	2014	Rachmat Hardijono	untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes di Ketindan Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, dan Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir sebagai lembaga desa dapat meningkatkan perekonomian	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan BUMDes mengacu pada maksimalisasi utilitas sebagai tujuan, Struktur organisasi BUMDes yang berada di luar struktur pemerintah desa tidak selalu stabil dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada warga desa begitupun Warga desa ditugaskan sebagai petugas dan karyawan BUMDes lebih banyak motivasi dan orientasi

			masyarakat desa yang selama ini dianggap sebagai penduduk yang terpencil dan terisolasi.		berdasarkan non material, yaitu rasa hormat dan penghargaan secara sosial dan politik daripada ekonomi.
4.	2015	Umi Hidayati	untuk menguji kinerja perangkat BUMDes dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tiga indikator yaitu pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di Nganjuk.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan pekerjaannya, manajer tidak profesional dalam melakukan pekerjaannya serta hanya beberapa tujuan BUMDes yang telah dicapai.
5.	2015	Ismail Humaidi	untuk Mengkaji manajemen pengelolaan industry kerajinan tangan dan Untuk mengetahui taraf perekonomian	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu manajemen pengelolaan di industri kerajinan tangan di Desa Tutul meliputi permodalan, bahan baku, produksi dan pemasaran. Keberadaan industri kerajinan tangan Desa Tutul mempunyai dampak

			masyarakat sebelum dan sesudah menggeluti kerajinan tangan di desa tutul.		positif terhadap masyarakat yaitu berkurangnya angka pengangguran, meningkatkan taraf perekonomian serta banyaknya masyarakat yang baralih profesi dari buruh tani menjadi karyawan dirumah produksi dikarenakan pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada saat menjadi buruh tani.
6.	2016	Samadi,	untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat, khususnya masyarakat pengguna dana BUMDes di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian nya yaitu peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, pada perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa
7.	2017	Erika Kusuma Yudha	untuk	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian nya yaitu upaya

			mendesripsikan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan bamboo		dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui kerajinan anyaman bambu yaitu menambah pendapatan ekonomi dengan mencukupi kebutuhan keluarga dan mampu membiyai sekolah anak atau cucunya
8.	2019	Nurmiati,	untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir (2014-2018).	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 110,68%, kemudian tingkat efektivitas penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 90,49 atau berada pada kategori efektif, selanjutnya kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 1,73 atau berada pada kategori sangat kurang.

9.	2019	Rumende	Untuk mengetahui tingkat kontribusi PT. Bank SulutGo dalam PAD, dan mengetahui pertumbuhan kontribusi PT. Bank SulutGo terhadap PAD. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah ternyata mempunyai hubungan yang tidak terlalu besar dengan pembagian dividen badan usaha milik daerah sehingga kontribusi peningkatan yang terjadi pada pembagian dividen masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah juga masih belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara.
10.	2017	Budhisulistyawati	Untuk menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan BUMD pada umumnya dan BUMD perseroda secara khusus, yang mencakup jenis dan bidang usaha,	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan BUMD, dapat dirinci sebagai berikut :Terjadi tumpang tindih pengaturan sektoral tentang BUMD,permasalahan manajemen pengelolaan, permasalahan SDM, permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD, dan permasalahan

			<p>corporate structure, sumber daya manusia yang mengelola BUMD, dan manajemen yang digunakan untuk mengelola BUMD, serta menemukan strategi pengelolaan BUMD persero dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</p>		<p>restrukturisasi BUMD</p>
11.	2018	Darwita dan Redana	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Temuan penelitian bahwa peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMDes dalam pengembangan</p>

					potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.
12.	2016	Anggraeni	untuk menggali dampak keberadaan Badan Usaha Milik Desa pada kesejahteraan masyarakat.	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.
13.	2014	Dewi	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan	Kualitatif Deskriptif	Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes

			<p>Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa yang menemukan bahwa kedudukan BUMDES belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada.</p>		
14	2012	Yani	<p>Untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh).</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>bahwa dalam pendirian BUMD harus selalu didasarkan pada aturan paten dari pemerintah setempat, sehingga tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat terlaksana</p>
15.	2017	Adhari dan Ismaidar	<p>Untuk mengetahui bagaimana Analisis</p>	Kualitatif Deskriptif	<p>penelitian ini mendeskripsikan tentang kesesuaian proses pendirian/pembentukan</p>

			Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.		BUMDes di kecamatan babalan dengan undang-undang BUMDES (Peraturan Menteri No. 4 tahun 2015)
16.	2015	Ramadana	Untuk mengetahui bagaimana Keberadaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES Sebagai Penguatan Ekonomi Desa	Kualitatif Deskriptif	penelitian ini membahas tentang kesesuaian pembentukan BUMDES Desa Landung sari dengan peraturan desa dan melihat sumber dana yang dimiliki BUMDES Desa Lndung sari dalam meningkatkan pendapatan desa

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tabel 1.3
Kebaruan Penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN NAMA DAN TAHUN PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	ORISINALITAS PENELITIAN
1.	Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (studi pada BUMDes desa pekan tebih kecamatan kepenuhan hulu kabupaten rokan hulu) (Samadi dkk ,2016)	Peranan BUMDes dan peningkatan Ekonomi masyarakat	Peningkatan perekonomian hanya terjadi pada pengguna dana BUMDes dibidang perdagangan perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Sedangkan pada penelitian ini peningkatan perekonomian linier dengan semakin banyaknya jumlah pengungjung yang berdampak pada usaha-usaha masyarakat disekitar wilayah ekowisata.	Untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui unit usaha Pariwisata.
2.	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui industry kecil: studi terhadap masyarakat industri kecil di desa tutul kecamatan balung kabupaten jember jawa timur. (Ismail Humaidi, 2015)	Sama-sama membahas tentang upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat	Penelitian ini berfokus pada bagaimana industry kecil dapat dapat terangkat sebagai wujud peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, sedangkan pada penelitian selanjutnya lebih berfokus pada peningkatan industry kecil.	Fokus penelitian ini yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dengan unit usaha pariwisata sehingga masyarakat dengan industry kecil di sekitarnya usahanya dapat meningkat.

3.	Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014)	Sama-sama berfokus pada peranan BUMDes.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang bagaimana BUMDes dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah melalui unit-unit usaha perdagangan.	Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana ekonomi masyarakat bisa meningkat dengan adanya BUMDes ini.
4.	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan tangan anyaman bambo di desa rimpak kecamatan sapuran kabupaten wonosobo (Erika Kusuma Yudha, 2017).	Sama-sama membahas tentang peningkata ekonomi masyarakat	Penelitian sebelumnya berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui usaha kerajinan tangan atau potensi daerah yang dikembangkan secara individu.	Mendeskripsikan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui unit usaha yang dikelola BUMDes.
5.	Umi Hidayati, <i>Performance Analysis of Village-Owned Enterprise Managers as a Basic of Designing Education and Training</i> , European Journal of Business and Management, 2015	Sama-sama mendeskripsikan bagaimana unit usaha yang ada pada BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.	Pada penelitian sebelumnya mendeskripsikan kinerja manajer BUMDes dalam melaksanakan tugasnya melalui indikator pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.	Penelitian ini membahas bagaimana ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha yang dijadikan sebagai Program BUMDes.
7.	Rachmat Hardijono, <i>Economic Independence Of The Village</i>	Sama-sama mendeskripsikan peran	Unit usaha yang dijalankan dengan penelitian ini berbeda, sehingga	Penelitian ini membahas bagaimana ekonomi masyarakat

	<i>Through Institutional Village Enterprises (BUMDes)</i> ,2014	BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.	terdapat perbedaan tata cara pengelolaan.	melalui unit-unit usaha yang dijadikan sebagai Program BUMDes.
8	Sentosa sembiring, (2017) keberadaan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Sama-sama membahas tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat	Penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada bagaimana peraturan-peraturan dapat menukung pendapatan asli daerah.	penelitian ini lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes yang akan berdampak pada pendapatan asli daerah.
9	Coristiya berlian, dkk Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa (studi di desa Landung Sari kecamatan Dau kabupaten malang)	Sama-sama mendeskripsikan tentang kesesuaian BUMDes desa dengan peraturan daerah kabupaten malang yang kemudian di atur oleh desa dengan peraturan desa mengenai BUMD.	Unit usaha yang dilakukan berbeda, selain itu kondisi geografis yang berbeda memungkinkan adanya perbedaan pengelolaan.	Perekonomian penelitian ini lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.
10	Agus Adhari dan Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam	Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang kesesuaian	mendeskripsikan dengan jelas unit usaha BUMDes yang berfungsi sebagai upaya pemerintah meningkatkan	Penelitian ini lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes.

	Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten.	proses pendirian/pembentukan BUMDes dengan undang-undang BUMDES (Peraturan Menteri No. 4 tahun 2015).	perekonomian,	
11	Rumende, dkk (2019), Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi di PT. Bank Sulutgo).	Sama-sama membahas tentang peraranan atau kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.	Unit usaha yang dijadikan sumber pendapatan Daerah merupakan unit usaha yang berbeda. Sehingga kemungkinan akan terdapat perbedaan dalam sistem pengelolaan.	Penelitian ini lebih mengfokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui unit usaha Ekopariwisata yang di bermuara pada Badan Usaha Milik Desa.
12	Budhisulistyawati, dkk (2017), Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	Sama-sama berfokus pada bagaimana strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.	Tujuan dari pengelolaan yang dilakukan pada kedua penelitian berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Budhisulistyawati lebih berfokus pada tujuan pengelolaan untuk mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.	Fokus pengelolaan pada Penelitian ini yaitu untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

13	Darwita dan Redana (2018), Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.	Sama-sama membahas mengenai upaya pemberdayaan masyarakat.	Unit usaha yang dijalankan cenderung berbeda, budaya masyarakat dan potensi daerah cenderung berbeda sehingga kemungkinan tata pengelolaannya juga sudah berbeda.	Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bukan hanya dari unit usaha yang dijalankan melainkan juga usaha-usaha masyarakat kecil disekitarnya dapat meningkat.
14	Anggraeni (2016), Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta.	Sama-sama membahas mengenai peranan BUMDes terhadap masyarakat.	Unit usaha yang dijalankan berbeda, serta pada penelitian selanjutnya hanya berfokus pada bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.	Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana DUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bukan hanya dari unit usaha yang dijalankan melainkan juga usaha-usaha masyarakat kecil disekitarnya dapat meningkat.
15	Dewi (2014), Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades)	Sama-sama membahas mengenai peranan BUMDes terhadap masyarakat.	Penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada bagaimana BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.	Penelitian ini berfokus pada bagaimana DUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bukan hanya dari unit usaha yang dijalankan melainkan juga usaha-usaha masyarakat kecil disekitarnya

				dapat meningkat.
16	Yani (2012), Berjudul Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah di Aceh)	Sama-sama membahas mengenai peranan BUMDes terhadap masyarakat.	Wilayah dan unit usaha yang dijalankan berbeda sehingga terdapat perbedaan tata cara pengelolaan.	Penelitian ini menggunakan pariwisata sebagai unit usaha BUMDes yang ketika unit usahanya berkembang maka dapat dipstikan usaha-usaha dan perekonomian masyarakat sekitar juga akan meningkat.

Sumber : Data Primer Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel diatas, persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat diuraikan berikut :

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dimana BUMDes adalah salah satu program pemerintah yang di sahkan oleh undang-undang.
2. Sedangkan dari sisi perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan undang-undang pada BUMDes serta pengelolaan pada BUMDes sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sanankerto.

F. Definisi Istilah

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁴² Yang dimaksud Badan usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa berdasarkan Undang-undang yang berlaku sebagai upaya memperkuat perekonomian Desa Sanankerto KecamatanTuren Kabupaten Malang.

⁴² <http://bapenas.jatiprov.go.id/index.php/program/kegiatan-ppm/278-pengembangan-BUMDes> (diakses pada 4 Februari 2018)

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁴³

Yang dimaksud pemberdayaan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengubah dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Sanankerto agar lebih maju dan mandiri.

3. Maqasid Syariah

Secara Bahasa Maqasid Syariah berasal dari dua kata, ialah Al-Maqasid dan As-Syariah yang berarti mengeja dan sengaja. Sedangkan dari bahasa arab memiliki makna sumber air. Sedangkan secara istilah, Maqasid Syariah dapat dimaknai dengan sejumlah makna atau capaian hukum syara'. Sehingga dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Maqasid Syariah ialah tujuan atas hukum dan aturan syariah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang orientasinya pada kemaslahatan dunia serta akhirat.

⁴³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabeta 2013) h. 235.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian BUMDES menurut Peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES ialah usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang mana modalnya dimiliki oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan warga lokal. BUMDES merupakan institusi ekonomi desa yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat guna memperkuat perekonomian desa yang pembentukannya didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa, sedangkan dalam Peraturan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 mengenai pembentukan, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa BUMDES pada pasal 2 disebutkan bahwa pendirian BUMDES ditujukan sebagai upaya memfasilitasi kegiatan ekonomi atau pada bidang pelayanan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa atau melakukan kerjasama antar desa.⁴⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan

⁴⁴ Khairul Agusliansyah, "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016, h. 1785-1796

pemerintah desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

2. Tujuan Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah⁴⁵:

- a. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa.
- b. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.
- c. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan perekonomian asli desa.
- f. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- g. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- h. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan.

Pada dasarnya tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk mensejahterakan masyarakat kaitannya dengan sebuah masyarakat yang mempunyai perekonomian yang mandiri dengan menggali potensi desa masing-masing sehingga tercapai tujuannya.

⁴⁵<http://bapenas.jatiprov.go.id/index.php/program/kegiatan-ppm/278-pengembangan-BUMDes>

3. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terdapat banyak fungsi Badan Usaha Milik Desa bagi masyarakat, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya.
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa.

4. Klasifikasi dan jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di bawah ini merupakan klasifikasi jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes:⁴⁶

⁴⁶Sutoro Eko (2013) dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tabel 2.1
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Tipe	Deskripsi	Contoh
<i>Serving</i>	BUMDes menjalankan “bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan sosial benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar.	Usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.
<i>Banking</i>	BUMDes menjalankan “bisnis uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.	Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
<i>Renting</i>	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa. Terutama desa-desa di Jawa.	Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya
<i>Brokering</i>	BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan listrik 2. Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

<i>Trading</i>	BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.	Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll
<i> Holding</i>	BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari usaha-usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal desa bersekala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil. 2. Desa Wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat. Makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

5. Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengembangan BUMDes sebagai basis ekonomi warga desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain⁴⁷ :

⁴⁷Welli Indra Mayu, Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, JOM Fisip Vol. 3 No. 2 oktober 2016

- a. Kepemimpinan, Manajerial dan tata kelola merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan BUMDes.
- b. Skala dan jangkauan usaha, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan (produksi dan distribusi hasil pertanian keluar desa) umumnya rentan dan gulung tikar karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.
- c. Emansipasi lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tumbuh dari lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan ketimbang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang lahir dari pemerintah daerah.
- d. Adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menghambat pertumbuhan Usaha Milik Desa.
- e. Tradisi berdesa, tidak adanya tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti tidak adanya solidaritas kerjasama, swadaya dan gotong royong akan

menghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan sipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), Badan Pemerintah Desa (BPD), Pemerintah Kabupaten (PEMKAB), dan masyarakat. Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu⁴⁸ :

- a. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bersedia sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- c. Emansipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

⁴⁸Undang-undang no 14 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- d. Transparan, semua komponen yang terlibat di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

7. Indikator Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Beberapa ketentuan umum yang dapat dijadikan acuan dalam keberhasilan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di sebagaimana dipublikasikan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di tahun 2007, yaitu bahwa⁴⁹ :

- a. Meningkatnya perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatnya pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Meningkatnya pemerataan ekonomi desa.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan BUMDes dapat dilihat dari berbagai indikator di atas seperti meningkatnya

⁴⁹Ridlwan Zulkarnain, urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa, jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 3 2014

perekonomian desa, dan selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan melihat beberapa hal berikut :

- a. Tingkat pendapatan
- b. Tingkat pengeluaran masyarakat
- c. Tingkat pendidikan
- d. Tingkat kesehatan

8. Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

Peran merupakan aspek dinamis pada sebuah kedudukan atau status, ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan bahwa ia menjalankan suatu peran.⁵⁰ BUMDes. Peran dapat dilihat dari wujudnya atau tujuan dasarnya ataupun pada hasil akhirnya. Seyadi memaparkan peran BUMDes dalam upaya pemberdayaan, berikut:

- a. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, yang pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

⁵⁰Soejarno, Soekamto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.(Jakarta: Rajawali Press, 1987)hlm. 220

- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Siagian (2000) menyatakan bahwa BUMDes memiliki beberapa Peranan yang Dominan dalam Proses Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, diantaranya:

Stabilisator, peran BUMDes adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

Fasilitator dalam memainkan peran selaku Fasilitator, BUMDes sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan Fasilitas dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Mediator, melalui pembangunan, tentunya setiap pemerintahan menginginkan masyarakat yang kuat, mandiri, dan mencapai kesetaraan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

Kemudian menurut Musya Asy'arie juga berpendapat bahwa berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu adanya dorongan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat, maka perlu adanya dorongan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausaha, dengan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk mampu bersaing di dunia wirausaha. Adapun beberapa program pembinaan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut:

a. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan dari kelompok swadaya masyarakat adalah dengan memberikan

wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, disamping diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis. Dengan melalui pelatihan seperti ini peserta diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan.

b. Pendampingan

Pada tahap ini, yaitu ketika usaha itu dijalankan maka calon wirausaha akan didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional, yang berfungsi sebagai pengarah maupun sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar mampu dan berhasil dikuasai dan dijalankan.

c. Pemagangan

Pemagangan yang dimaksudkan adalah pemagangan peserta di perusahaan yang berkaitan dengan rencana usaha yang selanjutnya akan dipilihnya. Pemagangan dinilai sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan diluar usaha. Tanpa adanya pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik maka akan memberikan kesulitan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.

d. Permodalan

Permodalan merupakan aspek penting dalam dunia usaha, akan tetapi bukan terpenting. Sehingga untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, maka perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha itu sudah dirintis dan menunjukkan prospek cukup baik.

Dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila telah berdampak dalam kehidupan masyarakat seperti⁵¹ :

- a. Adanya nilai kelompok yang konsisten dan sangat penting bagi individu.
- b. Kelompok memiliki nilai yang jelas tentang apa yang baik dan yang harus dilaksanakan oleh anggota dan melakukan indoktrinasi yang efektif kepada anggota tentang model tersebut.
- c. Kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan dalam memberikan kesempatan kepada individu berpartisipasi.

⁵¹Bashith Abdul, Ekonomi Kemasyarakatan, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) h. 31.

- d. Individu ikut ambil bagian dalam aktivitas kelompok dan imbalan yang diperoleh merupakan usaha-usaha yang dilakukannya.

Secara umum sistem pemberdayaan ekonomi menurut Mardi Yatmo Hutomo meliputi:

- a. Bantuan Modal

Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital dikalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi pemecahan dalam aspek modal ini penting dan harus dilakukan.

- b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat kalau hasil produksinya tidak dapat di pasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal memang strategis.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting, tugas utama pendamping ialah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

d. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat yang lemah pada mulanya dilakukan dengan pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan dampak yang memuaskan. Oleh sebab itu semenjak tahun 80-an pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai oleh kalangan orang miskin, oleh karena itu akumulasi kapital

harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi secara melalui kelompok mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

e. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti menganalisa pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody* pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.⁵²

Pemberdayaan ekonomi akan sukses dilakukan apabila memiliki sistem yang digunakan yaitu memiliki bantuan modal, bantuan pembangunan, bantuan pendampingan, dan bantuan pembangunan kemitraan serta penguatan kemitraan usaha. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki strategi agar tidak mengalami kegagalan seperti yang dijelaskan oleh Mubyarto,

⁵²Mardi yatmo Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, h. 8-9

terdapat beberapa permasalahan dalam usaha masyarakat yang harus diselesaikan, pertama masalah pendanaan, informasi, dan pasar. Kedua, masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat. Ketiga, masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.⁵³ Oleh karena itu permasalahan itu harus diatasi dengan beberapa strategi yaitu:

- a. Peningkatan akses, program ini ditujukan untuk mengatasi masalah pendanaan bagi usaha masyarakat, masalah distribusi informasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, masalah intermediasi bisnis produk usaha ekonomi masyarakat, pengembangan basis data produk dan informasi pasar.
- b. Peningkatan kapasitas, program ini untuk mengatasi masalah peningkatan SDM dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas dalam penguasaan teknologi dan keterampilan.
- c. Peningkatan produktivitas usaha masyarakat, program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas usaha ekonomi masyarakat sekaligus perluasan skala usahanya. Beberapa program yang akan dilakukan adalah fasilitas

⁵³Mubyarto, *A Development Alternative for Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2003) h.. 281

pengembangan usaha mikro, fasilitas berbagai upaya peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat.

9. BUMDes dalam pandangan Ekonomi Syariah

Bambang (2017) menyebutkan bahwa peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, penerapan ekonomi islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diyakini sangat penting. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam⁵⁴

Di zaman modern seperti saat ini, semangat gotong-royong dirasa mulai menurun bahkan jarang terlihat lagi di kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan yang terkenal dengan sistem kekeluargaan yang kental. Padahal dalam Islam mengharuskan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ عَاوَنُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan)*

⁵⁴Bambang, Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer, Jurnal Uin Alauddin (2017), 2.

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”⁵⁵

10. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes dalam Perspektif Ekonomi Islam, diantaranya adalah:

Selain itu, apakah prinsip-prinsip pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes telah sesuai dengan ekonomi Islam guna membangun perekonomian dengan melihat dari usaha-usaha yang dimiliki oleh desa sehingga mampu membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Terbukti di dengan adanya usaha-usaha yang telah dijalankan BUMDes menguntungkan untuk desa itu sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para warganya, yang mana menurut ekonomi Islam adalah suatu usaha harus menguntungkan satu sama lain.

⁵⁵QS Al-Maidah Ayat 2

a. Kerja sama (Syirkah)

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan manusia lainnya sehingga antarmanusia tersebut saling melakukan kerjasama dalam menjalankan semua kegiatannya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam segala bidang, seperti dalam bidang ekonomu ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama bukan hanya untuk perorangan saja. Karena itu, dalam membangun sebuah usaha Islam juga memperhatikan tujuan utama ekonomi Islam tersebut.

Dalam Islam tidak diperkenankan orang yang mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya hanya untuk mencari keuntungan pada dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain yang terlibat dalam usahanya. Apabila dia mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan orang tersebut atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati berdua. Begitu juga apabila mereka melakukan proses kerjasama dengan pihak

lain dalam pengembangan usahanya. Proses kerjasama dalam Islam tersebut dikenal dengan istilah syirkah.⁵⁶

b. Keikutsertaan (Partisipatif)

Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Keikutsertaan atau kontribusi seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak akan lepas dari kewenangan dan tanggung jawab. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang dibebankan kepada seseorang. Tanpa adanya kewenangan, seseorang akan mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik⁵⁷.

⁵⁶Ismail Nawawi, *Bisnis Ekonomi* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 438.

⁵⁷Ibid.

c. Transparansi

Basel comitte mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah hasil dari transparansi, transparansi dapat diraih jika suatu pihak mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai⁵⁸

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۝١٠٥

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (QS. An-Nahl: 105)*

Maksud dari ayat tersebut adalah hanya orang-orang yang tidak beriman yang melakukan kebohongan dan tidak

⁵⁸M.Umar Chapra, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 87.

mengungkapkan informasi yang diperoleh sejelas, akurat, dan relevan.

d. Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDes berarti bahwa semua kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya dan semua kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi dan jelas. Prasetio (2017) menuliskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal⁵⁹

Menurut Triyuwono (2006), akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

⁵⁹Prasetio, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas, (Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, No. 1, 2017), 20.

Artinya: *Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.* (QS. Al-Isra': 36).

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Definisi lain menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, yang berarti masyarakat turut aktif berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi dapat diartikan sebuah keterlibatan seseorang secara sadar dalam interaksi sosial pada situasi tertentu

Pemberdayaan memiliki hubungan erat dalam dua konsep yakni *power* (daya) *disadvantaged* (ketimpangan). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan empat perspektif, yaitu : perspektif *pluralis*, *elitis*, *strukturalis*, dan *post-strukturalis*.⁶⁰

- a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran,

⁶⁰Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif (Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2007) h. 42-43.

menggunakan keahlian untuk melobi, menggunakan media untuk berhubungan dengan tindakan politik, dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang dan yang kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu dalam bagaimana bersaing di dalam peraturan.

- b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dan lain-lain. Selain itu, juga untuk membentuk aliansi dengan kalangan elite, serta melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen.
- c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminasi.

Umumnya masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktural sosial, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

- d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post strukturalis adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi, atau praksis. Dari perspektif ini pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti suatu upaya untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat perekonomian masyarakat dengan melihat potensi yang ada pada masing-masing masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di luar faktor ketiadaan daya adalah faktor ketimpangan. Ketimpangan yang sering kali terjadi di masyarakat.⁶¹

- a. Ketimpangan struktural yang terjadi di antara kelompok primer, seperti perbedaan kelas antara orang kaya (*the have*) dengan orang miskin (*the have not*) dan antara buruh dengan majikan, perbedaan ras maupun perbedaan etnis yang tercermin pada perbedaan antara lokal dengan pendatang dan antara kaum minoritas dengan kaum mayoritas.
- b. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental, dan intelektual.
- c. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai persoalan pribadi dan keluarga.

Oleh karena itu kegiatan merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah penyebab ketidak berdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumber daya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi di antara keduanya.

⁶¹Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif, (jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007) h. 292.

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Lebih lanjut prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain yang mencakup :

- a. Minat dan kebutuhan artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam, apa benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersedianya sumber daya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapa prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.
- b. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan atau menyentuh organisasi masyarakat bawah sejak dari setiap keluarga atau kekerabatan.
- c. Kerjasama dan partisipasi artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- d. Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif

yang ingin diterapkan. Yang dimaksud dengan demokrasi bukan terbatas pada tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metode pemberdayaan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarnya.

- e. Belajar sambil bekerja artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan perkataan lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.
- f. Penggunaan metode yang sesuai artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) sasarnya. Dengan perkataan lain tidak satupun metode yang dapat diterapkan dalam suatu kondisi sasaran dengan efektif dan efisien.
- g. Kepemimpinan artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasannya sendiri dan harus mampu mengembangkan

kepemimpinan. Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan pemberdayaannya.

3. Strategi Penerapan Pemberdayaan

Selain Mubyarto menurut Suharto, strategi penerapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5p yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat.
- b. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat dan kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- c. Penyokongan, memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- d. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

4. Definisi Pemberdayaan masyarakat dalam pandangan islam

Dalam Bahasa Arab Pemberdayaan disebut dengan *tamkin* yang memiliki arti memperkokoh atau mmebangun sebuah kekuatan⁶². Berdasarkan pengertian tersebut maka, pemberdayaan dapat diambil kesimpulan dengan pemberdayaan sama dengan pemberian kekuatan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya atau sebuah kemampuan untuk mengubah dirinya baik secara individu maupun secara berkelompok sehingga memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya.

⁶²Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik. Fiqih Tamkin, Cetakan Pertama (Jakarta: Qishi Press). H. 75

5. Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana hukum islam yang lainnya, sumber hukum pertama bagi umat islam yakni Al-qur'an dan Hadist. Begitupun dengan dasar hukum dari peberdayana masyarakat ini, diantaranya adalah

a. Al-Qur'an

Pemberdayaan Masyarakat dalam islam telah disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Furqon Ayat 49:

لَنُحْيِي بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

Artinya: *Agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.*

Maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah SWT tidak pernah menciptakan satu halpun secara sia-sia. Semua hal yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan dan bermanfaat bagi makhluk lainnya selama manusia bersedia untuk memberdayakannya dengan baik dan mengelola lebih dalam agar dapat diambil manfaatnya.

Konsep lainnya dinyatakan dalam QS Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.

Maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah telah menurunkan anugerah yang sangat banyak kepada manusia untuk bekal kehidupan di muka bumi ini. Allah telah memberikan bumi beserta kebaikannya. Maka dari itu dibutuhkan usaha dan sarana untuk mengambil manfaat yang kemudian akan berguna bagi kehidupan manusia. Maka dari itu hendaknya manusia memperbanyak bersyukur.

Bersyukur yang dimaksudkan disini bukan semata mengucapkan Alhamdulillah akan tetapi juga bersyukur kemudian bersedia mendayagunakan apa yang telah Allah anugerahkan dan mengambil manfaatnya sehingga dapat mensejahterakan beberapa pihak.

b. Hadist

Dalam sebuah hadist Rasulullah juga menjelaskan bahwa Allah sangat senang terhadap orang yang bersedia bersyukur kepada apa yang telah Ia karuniakan.

“Sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan tersebut” (HR Muslim).

Yang menjadikan perbedaan sistem ekonomi muslim dengan ekonomi kapitalis adalah bagaimana ekonomi kapitalis berpusat kepada keuntungan pribadi sedangkan ekonomi islam menekankan untuk mencari kesejahteraan bersama. Oleh karena itu dengan salah wujud syukur dapat dilakukan dengan mendayagunakan atau memberdayakan apa yang ada untuk memperoleh kesejahteraan bersama.

6. Pemberdayaan Ekonomi menurut pandangan Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits. Pelaku ekonomi Islam dalam setiap kegiatannya selalu mengedepankan adanya nilai ketuhanan dan dalam setiap kegiatannya selalu dibarengi adanya niat dan harapan untuk mencari ridho berkah dari Allah SWT⁶³

Nilai-nilai universal yang mendasar pada pelaksanaan ekonomi Islam yaitu terdiri dari empat nilai. Pertama, adanya nilai tauhid, dalam nilai ini manusia menyatakan akan adanya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha

⁶³Nurfaqih dan Fahmi, Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam, Working Paper Keuangan Publik Islam, No. 8 Seri 1 (2018), 7.

Esa. Kedua, Prinsip keadilan, yang dimaksudkan disini adalah sebuah bentuk perasaan yang sama rata, tidak merasa adanya perbedaan dan tidak dibedakan dalam segala hal. Keadilan juga diartikan sebagai suatu bentuk yang dapat menghilangkan adanya kesenjangan yang terjadi dalam lingkungan kondisi perekonomian sosial antar manusia. Ketiga, nilai al-ma'ad yang membahas mengenai hasil daripada kegiatan para pelaku ekonomi dalam menjalankan prosesnya. Adanya hasil dan kemampuan dalam mengembangkan usaha dari apa yang dilakukan pelaku ekonomi merupakan suatu tatanan nilai yang memang sudah seharusnya ada dan dilaksanakan oleh para pelaku transaksi ekonomi. Keempat, adanya nilai keikhlasan dan sukarela yang dimaksudkan yaitu mengenai kebebasan pada keberadaan dan kelangsungan kegiatan ekonomi Islam. Tidak adanya unsur paksaan dalam melaksanakan program. Dengan kata lain nilai dari sukarela ini yaitu adanya perasaan ikhlas dalam menjalani proses dan mampu untuk menerima tanggungjawab mengenai segala resiko yang mungkin akan dihadapi.⁶⁴

Dalam Islam pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi saling menghormati, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok.⁶⁵ Memberdayakan ekonomi merupakan hal sangat penting karena beberapa alasan :

⁶⁴Ibid h 7-8.

⁶⁵Ibid h 25

- a. Karena ancaman Allah terhadap para pendusta agama.

Allah berfirman :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
 قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

Artinya : *tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*

Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.⁶⁶

Dalam ayat yang lain, Allah juga tidak menyukai orang yang membanggakan hartanya, untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti yang Allah kisahkan dalam kisah Qarun.

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
 لَتَنْتُوا بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُ الْفَرْحِينَ ۝

Artinya : *Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum Musa[1138], Maka ia Berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu*

⁶⁶(QS.al-Ma'un:1-5)

bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".⁶⁷

فَحَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُونِ
اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ^ل

Artinya: *Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan Tiadalah ia Termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya).⁶⁸*

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa konsep harta dalam Islam tidak boleh stagnan, artinya harta itu harus mengalir sehingga kekayaan tidak hanya pada bergulir pada satu persatu orang terlebih orang tersebut mempunyai kekayaan lebih, mereka harus memperhatikan orang sekitar seperti anak yatim, orang miskin dll.

- b. Karena harapan janji Allah terhadap orang yang membantu atau memberdayakan orang lain. Allah berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُدْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَذَكَّرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَدًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

⁶⁷(QS.al-Qashas: 76)

⁶⁸(al-Qashas:81)

Artinya: *perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*⁶⁹

Umat Islam merindukan kejayaan dan kemakmuran seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abd al-‘Aziz. r.a. khalifah yang terkenal adil, padahal beliau menjabat khalifah hanya tigapuluh bulan, pada waktu itu semua orang yang punya hutang bisa mendapatkan bantuan dari khas Negara, semua kebutuhan pokok terpenuhi, setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi beliau memberikan bantuan kepada para petani kecil untuk mengelola

⁶⁹(QS. Al-Baqarah: 261-262)

lahannya dengan baik, dengan memberikan kredit dari khas Negara. Kebijakan ini sudah ada beberapa ratus tahun sebelum dunia mengenal bank perkreditan untuk pertanian.

Sebelum masa Umar bin Abd ‘Aziz yaitu pada masa Umar bin Khattab pada waktu itu tidak ada seorangpun yang mau menerima zakat. Demikian kesejahteraan di bawah naungan keadilan Islam sampai pada taraf di mana semua yang memiliki hak bisa mendapatkannya. Itulah prestasi bagus yang sebagai dampak dari penerapan tatanan Islam, ketika kondisi Negara memberikan kemungkinan penerapannya.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini mengandung makna pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat pada arah kehidupan yang lebih baik⁷⁰. Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan. Dengan adanya pemaparan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah minimum harus mengutamakan keperluan mutlak dimana mencakup kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar⁷¹

⁷⁰Rintuh, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat (Yogyakarta, 2005) h.87

⁷¹Suryana, Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan (Jakarta, 2006)

2. Ruang Lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat dua hal yang menjadi lingkup peningkatan pemberdayaan⁷², diantaranya adalah:

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pendidikan Formal

Satuan pendidikan di Indonesia terdiri dari 3 kelompok yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Pemberdayaan ekonomi ini dilakukan guna mendukung pendidikan formal di Indonesia. pendidikan dapat diketahui sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk dapat melakukan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan⁷³.

Tahapan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendukung pendidikan formal yakni, mendiskusikan rancangan program yang prioritaskan, mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan yang mereka rasakan, dan hambatan-hambatan yang akan muncul ketika

⁷²Ach Wazir Ws, Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta, 1999)

⁷³UU No.20 Tahun 2003

melaksanakan proses tersebut.⁷⁴

b. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Mendukung Objek Wisata**

Produk pariwisata merupakan suatu rangkaian jasa yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial, psikologis, dan alam walaupun produk wisata itu sendiri di pengaruhi oleh tingkah laku ekonomi .

Daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata disebuah destinasi. Dengan demikian yang dimaksud pembangunan ekonomi di objek wisata merupakan bentuk potensi untuk mengusai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. Pembangunna ekonomi yang dapat dilakukan dari sektor pawriwisata yakni pengembangan pemberdayaan usaha kecil di sekitarnya.

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu prinsip akan berlaku umum dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang

⁷⁴Sudjana, Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat dan Teori Pendukung serta Asas (Bandung, 2004)

beragam dengan demikian prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip⁷⁵ :

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilan) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat, karena, perasaan senang atau puas atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa-masa mendatang.
- c. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada

⁷⁵Mardikanto totok dan soebiato Poerwoko, pemberdayaan masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 105.

pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, melihat tanaman yang kerdil atau subur akan mengingatkannya kepada usaha-usaha pemupukan dll.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Implementasi program yang sudah disusun tidak terlepas dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis. Apabila rencana tersebut berhasil dilaksanakan tentunya ada faktor yang menyebabkan rencana tersebut sukses dilaksanakan. Menurut Sujianto dalam implementasi program yang dapat menyebabkan masyarakat berhasil untuk memberdayakan ekonomi masyarakat adalah⁷⁶ :

- a. Adanya keinginan masyarakat untuk mengubah nasibnya, kemauan yang muncul dari dalam diri masyarakat keluar dari ketidakberadaan ekonominya.
- b. Adanya dorongan dan dukungan pemerintah sehingga memotivasi masyarakat agar keluar dari ketidakberdayaannya.
- c. Adanya peranan dari seluruh komponen masyarakat adalah dukungan elit lokal bagi keberdayaan masyarakat.

Dalam upaya pemberdayaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, terdapat faktor pendukung yakni faktor yang memperkuat pemberdayaan masyarakat serta terdapat faktor penghambat atau faktor

⁷⁶Eni Maryani dan Zulkmaini, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 5 no 1, 2014, h 94

yang mampu memperlemah pemberdayaan yang telah diupayakan. Dapat diketahui faktor yang mampu mendukung pemberdayaan, diantaranya adalah:

a. Dukungan dari pemerintah

Pemerintah merupakan penentu kebijakan dalam badan-badan usaha yang dibentuk untuk upaya pemberdayaan. Dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan ini, mengingat pusat kebijakan ada pada pemerintah. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ini tidak hanya memerlukan fasilitas namun juga memerlukan perlindungan yang dapat tercipta dari berbagai aturan pemerintah.

b. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat

Dukungan selanjutnya yang diperlukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Baik tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum. Keterlibatan masyarakat umum sangat dibutuhkan sebagai objek sasaran utama dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikembangkan oleh lembaga bentukan pemerintah seperti BUMDes.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Kurangnya fasilitas yang mampu mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Banyaknya masyarakat yang merasa sudah berpengalaman dan enggan menerima bimbingan dan arahan.
- c. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat sararan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Menurut Pandangan Konvensional dan Syariah

Jika dilihat dari bagaimana prinsip pengelolaan BUMDes secara syariah dan secara konvensional tidaklah jauh berbeda. Secara Konvensional terdapat 6 Prinsip pengelolaan BUMDes, Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Trnasparan, Akuntabel, dan Sustainebel. Jika dilihat dari seluruh prinsip pengelolaan BUMDes ini maka seluruh aktivitas pengelolaan didasarkan pada kepentingan masyarakat seperti diharuskannya ada kerja sama yang baik demi mengembangkan usaha dan kelangsungan hidupnya. Semua aspek pengelolaan hanya bertujuan untuk keberlangsungan usaha bersama yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dari segi ekonomi.

Jika dilihat dari pandangan Syariah, Pemberdayaan ini erat kaitannya dengan Maqasid Syariah atau adanya kemaslahatan bersama. Prinsip Pengelolaan BUMDes dalam islam meliputi Syirkah, Keikutsertaan, Transparansi, dan Akuntabel. Jika pada konvensional fokus dari pengelolaan ini hanyalah untuk kesejahteraan ekonomi maka dalam islam prinsipnya dijelaskan secara lebih lanjut, jika terjadi syirkah maka

ukhuwah antar masyarakat juga terjalin dengan baik. Adanya keikutsertaan dalam prinsip ini dimaksudkan agar seluruh elemen yang diberdayakan mendapatkan pembagian tugas yang sama sehingga tidak terjadi adanya ketimpangan.

Allah SWT Berfirman dalam Surat Al-Hars Ayat 7, yang berbunyi;

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.*

Dalam Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa konsep pemberdayaan masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk menakar pertumbuhan ekonomi dalam islam. Dimana takaran pertumbuhan ekonomi dalam islam cenderung berberda dengan konvensional. Pada ekonomi konvensional penakaran yang dilakukan menggunakan PDB (Produk Domestic Bruto)

pendapat kotor pada sertiap daerah, sedangkan dalam islam pertumbuhan ekonomi hasrus seiring dengan pemerataan kesejahteraan dan meniadakan kesejangan ekonomi sosial. Sehingga pemberdayaan ditujukan bukan hanya untuk peningkatan ekonomii salah satu atau beberapa kalangan akan tetapi juga pemeranaan dan kesejahteraan semua kalangan sehingga kemiskinan dapat terangkat.

Berfokus pada ekonomi dan usaha, jika dalam ekonomi konvensional hanya memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana memperoleh keuntungan yang sebsar-besarnya dengan modal yang seminimal mungkin. Maka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pandangan islam harusnya juga mempehatikan etika bisnis dalam islam.

Jika proses pemberdayaan sudah bertujuan untuk kemaslahatan maka dalam islam sangat dianjurkan bahwa dalam menjalankan bisnis bersama ini juga memperhatikan etika bisnis secara islam dimana dalam islam bukan semata keuntungan yang hendak diraih akan tetapi juga keberkahan. Pengelolaan BUMdes harusnya dilakukan secara jujur, *Shidiq, amanahm*, dan adil. Produk atau bisnis yang dijalankan bukanlah produk yang diharamkan atau dilarang dalam islam, dan menghindari kecurangan-kesurangan seperti rekayasa permintaan barang dan sebagainya.

Meskipun sifat dari pemberdayaan ini adalah mengangkat ekonomi masyarakat secara bersama-sama akan sangat dimungkinkan terjadi

diskriminasi atau kecurangan dalam pengelolaan. Sedangkan dalam pandangan etika bisnis islam dan maqasid syariah hendaknya kecurangan semacam ini dihindari. Dalam bisnis harusnya mengedepankan nilai islami seperti kesatuan, keseimbangan, kebenaran, dan kejujuran.⁷⁷

D. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Secara Bahasa Maqasid Syariah berasal dari dua kata, ialah Al-Maqasid dan As-Syariah yang berarti mengeja dan sengaja. Sedangkan dari bahasa arab memiliki makna sumber air. Sedangkan secara istilah, Maqasid Syariah dapat dimaknai dengan sejumlah makna atau capaian hukum syara'. Sehingga dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Maqasid Syariah ialah tujuan atas hukum dan aturan syariah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang orientasinya pada kemaslahatan dunia serta akhirat.

Maqāṣid as-syarīah ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqāṣid (المقاصد) dan as-syarīah (الشريعة). Akar kata maqāṣid adalah qaṣada yaqṣidu (يقصد - قصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, maqāṣid merupakan bentuk jamak (plural) dari maqṣid/maqṣad (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.⁷⁸ Sedangkan syarī'ah (شريعة) dalam Bahasa Arab

⁷⁷ Muhamad Fauroni dan Luqman, Visi Al-Qur'an tentang Etika Bisnis, (JAKARTA: Salemba Diniyah, 2002) Hal. 10

⁷⁸ Mahmud Yunus, Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990), h. 343-344.

berarti jalan menuju sumber air.⁷⁹ Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan.⁸⁰ Jadi maqāṣid as-syarīah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syāri‘ (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.⁸¹

Teori maqāṣid pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syāṭibi (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu ‘mengkomunikasikan’ teori tersebut dalam bentuk yang well-designed sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu maqāṣid as-syarīah hingga dijuluki dengan Bapak maqāṣid as-syarīah dengan bukunya yang terkenal Al-Muwāfaqāt.⁸²

Mengkaji teori maqāṣid asy-syarī‘ah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan maṣlaḥah. Maqāṣid asy-syarī‘ah bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah maṣlaḥah bagi seluruh umat. Maṣlaḥah merupakan manifestasi dari maqāṣid asy-syarī‘ah (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan maṣlaḥah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Kata maṣlaḥah berasal dari Bahasa Arab حُلْصِيْ-حُلْصٍ menjadi

⁷⁹Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, Lisān al-‘Arab (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII, h. 175.

⁸⁰Asafri Jaya Bakri, Maqashid Syari‘ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61

⁸¹Ahmad Raisūni, Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām asy-Syāṭibi (Riyadh: Ad-Dār al-‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), h. 18

⁸²Raisūni, Naẓariyyah.h. 17.

مَصْلَحَةً atau مَصْلَحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah mafsadah (مفسدة) yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin. Dalam perjalanan sejarah, lafal masalah sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.⁸³

2. Definisi Maqasid Syariah Berdasar Pendapat Ahli

Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan masalah sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh Syāri' bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.⁸⁴

Muṣṭafā Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah masalah didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: pertama, masalah tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, kedua, masalah mengandung aspek positif dan

⁸³Al Yasa' Abubakar, Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2016), h.36.

⁸⁴Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, D

negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, ketiga, semua maşlahah harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (al-kulliyah al-khamsah).⁸⁵

Muhammad ‘Abd al-‘Ati Muhammad Ali menyebutkan bahwa maşlahah mempunyai tiga ciri utama: pertama, sumber dari maşlahah itu adalah hidayah Allah, kedua, maşlahah mencakupi kehidupan dunia dan akhirat, ketiga, maşlahah tidak hanya terbatas pada kelezatan material⁸⁶

Dengan demikian, sebuah maşlahah dan mafsadah yang masyrū’ (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun maşlahah dan mafsadah di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, maşlahah itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

3. Maqasid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Dalam perjalanannya tentu mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Hal-hal yang tidak terpikir pada zaman dahulu kala, menjadi kenyataan zaman sekarang. Maqāsid asy-syarī‘ah yang melahirkan maşlahah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan

⁸⁵Muşţafā Zaid, *Al -Maşlahah Fī Tasyrī‘ al-Islāmi wa Najm ad-Dīn aţ-ţūfī*, cet. 2 (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1964), h. 22

⁸⁶Muhammad ‘Abd al-‘Ati Muhammad Ali, *Al-Maqāsid asy-syarī‘ah wa Aşaruhā Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Ḥadīş, 2007), h. 103.

berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan masalah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.⁸⁷

Menurut Al Yasa' AbuBakar, penetapan hukum dengan metode istislāhiyah (masalah) dapat digunakan dalam menyelesaikan dalam empat jenis masalah, yaitu:⁸⁸

- a. Mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai Naşkhusus (langsung) sebagai dalil. Ini adalah tujuan utama dari konsep masalah.
- b. Sebagian dari penalaran ini, paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai Naşkhusus, tetapi tidak secara sempurna.
- c. Sampai batas tertentu, pola dan metode istislāhiyah ini tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama.
- d. Suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai Naşkhusus, tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat, sehingga butuh metode istislāhiyah.

⁸⁷Waryani fajar Riyanto, ,Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah, Dalam Jurnal Hukum Islam(JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.

⁸⁸Al Yasa' Abubakar, Metode Istislāhiyah, h. 58-60.

Secara konsep Maqasid sayriah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariah atau secara mudah dapat dipahami bahwa Maqasid Syariah yakni Tujuan-tujuan syariah yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan utama dari adanya Maqasid Syariah ini adalah untuk kemaslahatan. Masalah sendiri artinya adalah segala sesuatu yang dapat diraih atau diperoleh manusia dengan manfaat atau menghindari kerusakan.

Dalam Maqasid Syariah ini terdapat 3 Aspek utama yang diklasifikasikan berdasarkan kepentingan masing-masing, diantaranya:

a. Menjaga Al- Daruriyat

Ad daruriyat ini adalah sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan. Jika tidak dapat dilakukan maka dapat dipastikan akan membawa ketidak berartian kehidupan. Dalam Ad-Daruriyat terdapat beberapa hal yang harus di jaga yakni menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga akal, Menjaga keturunan, Menjaga harta.

Dalam hal pemberdayaan ini Menjaga Ad daruriyat adalah dapat diartikan dengan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan agama, tidak melanggar larangan dan selalu mentaati perintah agama. Menjaga jiwa yakni melindungi sarana dan prasarana agar tidak menyebabkan kerugian, menjaga akal dari fikiran-fikiran

untuk berbuat buruk, menjaga harta agar tetap berkembang dan mensejahterakan umat.

b. Menjaga Al Hajiyat

Al Hajiyat adalah persoalan atau hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk menghindari kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Hal ini berfungsi untuk meringankan masalah dan mempermudah manusia. Hukum islam tidak serta merta kaku, pada beberapa hal dan beberapa kondisi yang tentunya darurat hukum islam memiliki fleksibilitas sehingga memudahkan dan membuat umat selalu mendapatkan jalan setiap permasalahan.

c. Menjaga Tahsiniah

Menjaga Tahsiniah yakni menjaga maslahat yang fungsinya untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Jika kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan maka tidak menyebabkan kegoncangan atau tatannan manusia, karena kemaslahatan ini hanya merujuk pada memperindah.

Dalam hal yang berkaitan erat dengan Maqasid Syariah diperoleh pandangan dari Umar Capra, diantaranya⁸⁹:

a. Hifz Al-din atau Menjaga Agama

Iman ialah seperangkat nilai yang berawal dari modal. Agama juga dapat menimbulkan suatu Motivasi

⁸⁹M. Umer Chapra *The Future Of Economic; an Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000). h.121

serta dapat menurunkan Preferensi pribadi atas seseorang dengan mengutamakan pada kepentingan sosial yang berdasar atas kebersamaan, kekeluargaan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif dengan tujuan perkuatan solidaritas sosial serta kerja sama antar individu. Kemudian agama juga berfungsi untuk mengontrol perilaku seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab bukan hanya pada dunia akan tetapi juga diakhirat.

b. Hifz Al-Nafs atau Menjaga Jiwa

Dalam rangka untuk memelihara serta mengembangkan jiwa dapat dilakukan dengan pemenuhan pada kebutuhan utama. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah bukan hanya menjamin kesejahteraan jiwa dan juga memastikan peranan kepemimpinan dengan lebih efektif. Hal tersebut dapat memenuhi martabat, pengahragaan, persaudaraan, persamaan sosial, serta kebutuhan akan rasa adil, jaminan hidup, hak milik, serta kehormatan.

Selain itu kebutuhan lainnya yang harus tersedia ialah pemerintahan yang baik untuk stabilisasi sosial serta politik, adanya kebutuhan hidup, ketersediaan lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan dan kekayaan, menikah dan berkeluarga, merasa damai dan berbahagia.

c. Hifz Al-Aql atau Menjaga Akal

Hal ini memiliki airti bahwa akal ialah sebuah anugerah yang begitu agung yang dapat membedakan setiap manusia serta butuh pengembangan yang kontuni sehingga kemaslahan pribadi dan pihak lain. Kemudian untuk memelihara dan mengembangkan akal dibutuhkan dorongan untuk menyediakan kualitas pendidikan yang baik dengan harga yang terjangkau, ketersediaan fasilitas pendukung ini seperti perpustakaan untuk keperluan penelitian, kebebasan dalam berfikir serta berekpektasi, memberikan penghargaan atas prestasi kerja serta keuangan.

d. Hifz Al-Nasl atau Menjaga Keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik serta bertahan dibutuhkan generasi yang lebih berkualitas, baik secara disik maupun mental sehingga dapat merespon dari tantangan zaman. Karena pendidikan modal sejak dini dalam keluarga juga penting mengingat keluarga ialah penddixn pertama yang bertanggung jawab untuk memberikan moral serta akhlak yang mulia. Untuk menjaga keturunan maka dapat dilakukan dengan menikah serta berkeluarga yang memiliki integritas. Meningkatkan kesehatan ibu serta mencukupkan gizi yang baik untuk

pertumbuhan serta perkembangan anak, memenuhi kebutuhan hidup, menjamin tersedianya sumber daya ekonomi baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adanya lingkungan yang sehat dan bersih dengan konsep pembangunan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan bebas dari konflik dan menjamin keamanan.

e. Hifz Al-Mal atau Menjaga Harta

Harta merupakan aspek penting yang dapat menunjang aspek lain karenanya tanpa aspek harta keempat aspek tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Konsekuensi dalam menjaga dan mengembangkan harta, diantaranya:

- 1) Manusia berhak untuk memperkaya sumber daya ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam harta ini mengandung fungsi sosial untuk membaikkan hak terhadap pihak lain atau masyarakat secara menyeluruh.
- 2) Kegiatan ekonomi hanya dalam memperbanyak pilihan sehingga bebas memiliki konsumsi.
- 3) Potensi alam yang dimiliki masyarakat pada suatu wilayah harus dapat dikelola demi

kemakmuran masyarakat daerah tersebut. Karena untuk dapat memanukan ekonomi masyarakat akan terwujud aktifitas lainnya seperti produksi barang serta jasa untuk dapat mendistribusikan konsumsi yang dilandaskan atas aturan agama.

E. Kerangka Konseptual

Munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.⁹⁰ Sedangkan Indonesia terdiri atas kurang lebih 82 ribu desa. Artinya, negeri ini punya lebih dari 80 ribu ciri khas dan potensi⁹¹ dan pembangunan yang selalu berfokus di kota menghasilkan dampak urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, desa tidak lagi menarik bagi warga usia produktif.

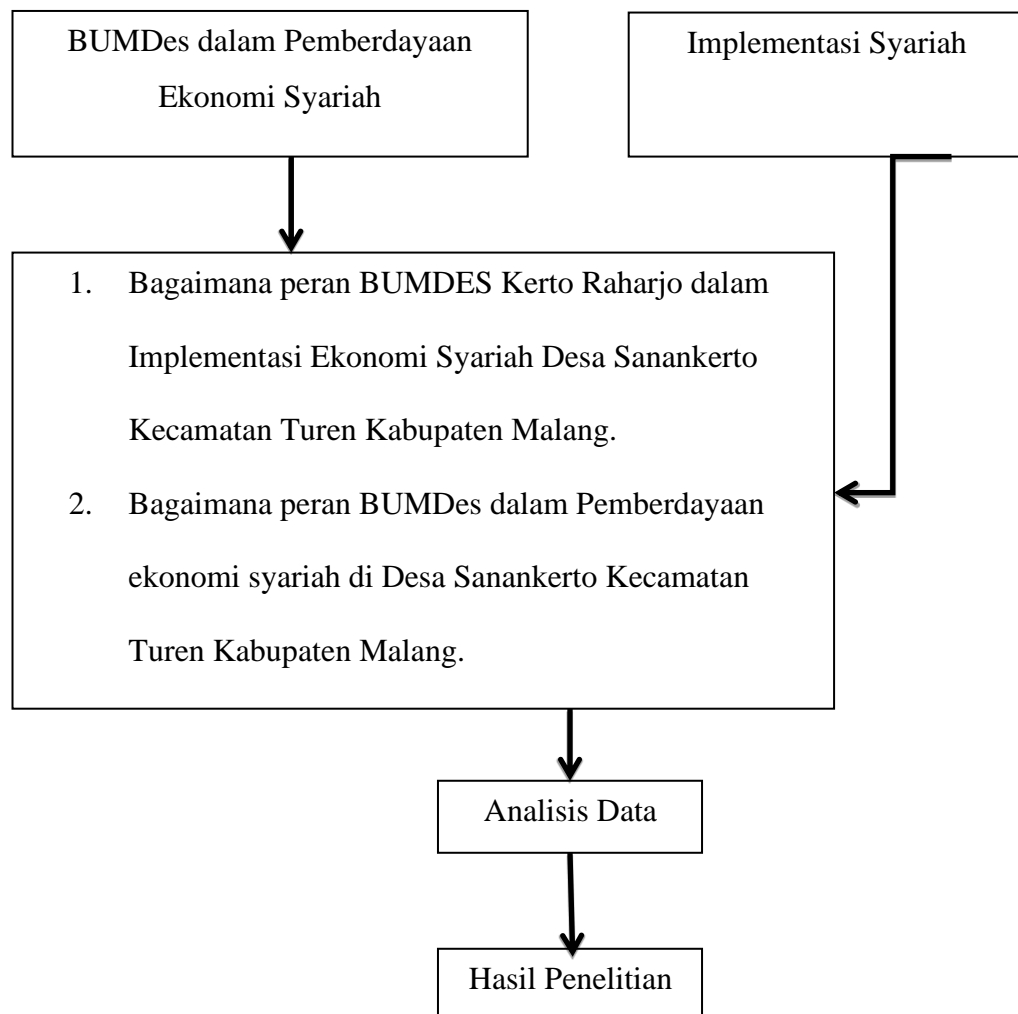
Mengelaborasi pengembangan ekonomi kreatif dan produktif di desa-desa seluruh Indonesia adalah salah satu cara agar urbanisasi tidak lagi terjadi. Jika desa mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan warganya, maka desa telah mampu mensejahterakan warga sekaligus mengadakan pendapatan bagi dirinya.

⁹⁰Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia

⁹¹Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030.

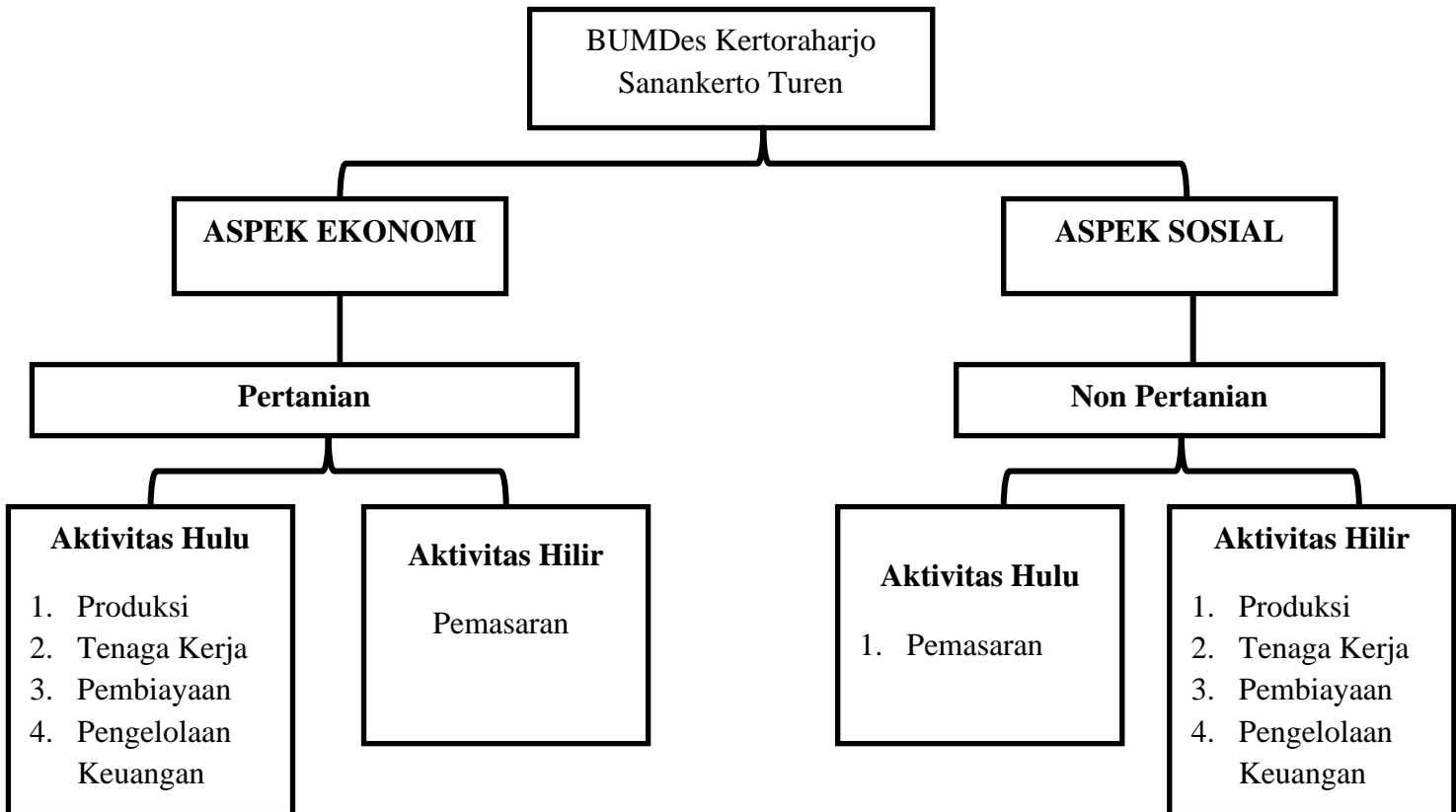
Dalam rangka mengakomodasi potensi desa dan pemenuhan kebutuhan warga desa, pemerintah memberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah Peneliti (2021)

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang sentral.⁹² Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Studi kasus merupakan suatu *inquiry* empiris yang mendalam fenomena dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas.⁹³

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan alasan, untuk memahami perspektif atau cara pandang melihat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sanankerto sehingga tercapai tujuan meningkatnya perekonomian masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan diorientasikan untuk mengungkap dan mendiskripsikan PeranBUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sanankerto.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai pengamat. Pendekatan ini menghasilkan sebuah data deskriptif berupa

⁹²Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (jakarta: PT grasindo, 2010) h. 5.

⁹³Herdiansyah Haris, metode penelitian kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika 2010) h. 76.

ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui pendekatan ini pula peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti, memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti.

Berdasarkan pendekatan yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui Alasan pengamatan adalah⁹⁴ :

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung.
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti untuk mencatat peristiwa yang terjadi pada tempat penelitian.
4. Meminimalisir adanya kekeliruan dalam penelitian pada saat wawancara atau hal lain oleh karena itu perlu adanya pengecekan dengan pengamatan.
5. Pengamatan dapat digunakan pada situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati keadaan BUMDes Kerto raharjo mengikuti semua kegiatan yang ada sekitar kurang lebih satu bulan. oleh karena itu peneliti dapat mengetahui apa yang mereka kerjakan

⁹⁴Lexy J Moleong, penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya) h. 175.

dan terfokus pada kegiatan sehari-hari hingga kegiatan diluar BUMDes seperti mengikuti kegiatan sosialisasi, studi banding dan lain-lain.

C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih penelitian di Desa Sanankerto Kecamatananturen sebagai tempat penelitian. Alasan peneliti yaitu :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto raharjo memiliki pengelolaan yang baik terbukti dengan pencapaiannya sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) predikat juara pertama di tingkat Nasional dan meraih penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) 2019.
2. Belum adanya deskripsi tentang Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kawasan tersebut.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan.⁹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dalam

⁹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h. 38

bentuk kualitatif yaitu yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan, pengambilan foto, perekam audio.⁹⁶

Ditinjau dari cara memperolehnya data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu terdiri atas data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah bahan yang berupa sumber utama dalam pengambilan data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini Adalah para informan seperti Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kepala Desa Sanankerto, Perangkat Desa SananKerto, Pelaku UMKM di Boonpring, Masyarakat pengelola Boonpring. Sumber sekunder adalah bahan yang erat sekali hubungannya dengan data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, arsip-arsip, dokumentasi dari pihak kepala desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga cara yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak

⁹⁶Sutopo ariesto Hadi, terampil mengolah data kualitatif dengan NVIVO, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010) h. 6.

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁹⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip wawancara tak berstruktur atau wawancara bebas. Dimana wawancara bebas adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁹⁸

Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai narasumber yang dianggap paling memahami mengenai unit usaha ekowisata BUMDES Kerto Raharjo, Karena teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹⁹ narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Bapak samsul Arifin selaku direktur BUMDes Kerto Raharjo.
- b. Bapak Mahrodi selaku kepala unit.
- c. Bapak M. Subur S.E selaku kepala desa
- d. Bapak Drs Abdulloh Faqih bendahara BUMDes

⁹⁷Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers) hal. 35

⁹⁸Sugiono, memahami penelitian kualitatif (Bandung:Alfabeta, 2008) h. 74.

⁹⁹ Sugiono, memahami penelitian kualitatif (Bandung, Alfabeta, 2008) h. 68

- e. Bapak/ibuk Nanik, Sumiati, Yura, Suyitno, Suhar, Kayat, Tanjung, Luqman selaku masyarakat/pedagang.

Dari sepuluh orang narasumber yang dipilih Karena para nara sumber tersebut dianggap paling paham dan paling tau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BUMDes Kerto Raharjo dan pemberdayaan masyarakat yang ada diDesa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

2. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya.¹⁰⁰ Dalam observasi ini peneliti datang langsung ketempat penelitian selama kurang lebih satu bulan dan mengikuti semua kegiatan BUMDes baik di dalam maupun diluar BUMDes seperti sosialisai dari pemerintah, pameran produk BUMDes dan lain sebagainya.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan

¹⁰⁰Sugiono, memahami, h. 19.

masalah yang akan diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁰¹

Dokumen-dokumen yang diambil peneliti sebagai data berupa tulisan, gambar-gambar dan lainnya yang bersifat catatan yang berasal dari internet, dokumentasi dari kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kantor Kelurahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data tentang latar belakang berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), struktur organisasi, konsep pemberdayaan ekonomi, data kegiatan formal dan informal yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto raharjo.

F. Tahapan Analisis Data

Pada prinsipnya analisa data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan model analisa data Spradley, adapun proses penelitian terdiri atas analisis domain, taksonomi, komponensial serta analisa tema budaya¹⁰² :

1. Analisa Domain

Setelah peneliti memasuki objek penelitian yaitu BUMDes Kerto raharjo, selanjutnya peneliti melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, dan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Analisis domain

¹⁰¹Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka cipta 2009) h. 160.

¹⁰²Sugiono, Memahami penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 99

dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, Yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisa ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari maningkatkan pertumbuhan Ekonomi masyarakat di BUMDes Kerto Raharjo.

2. Analisa Taksonomi

Setelah peneliti melakukan analisa domain, sehingga ditemukan domain-domain pada meningkatkan pertumbuhan Ekonomi masyarakat melalui BUMDes, selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian. Diperdalam menggunakan pengamatan, wawancara, dokumentasi, sehingga perlu di analisis menggunakan analisa taksonomi. Analisa taksonomi adalah analisa terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

3. Komponensial

Menurut Sugiyono (2012:264), pada Analisis Komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan adalah perbedaan dalam domain atau kesenjangan yang kontras dalam domain. Data ini dicari melalui observasi, wawancara lanjutan, atau dokumentasi terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

Setelah ditemukan kesamaan ciri atau kesamaan pola dari data dari analisis taksonomi, selanjutnya peneliti melakukan pengamatan yang lebih dalam untuk mengungkapkan gambaran atau pola-pola tertentu dalam data. Dalam hal ini, peneliti melakukannya dengan meraka-reka data dengan rasio-rasio yang digunakan dan hal-hal lain. Setelah ditemukan gambaran tertentu, atau pola-pola tertentu dari data, selanjutnya peneliti melanjutkan pembuatan pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mampu mengkonfirmasi temuan peneliti dalam analisis komponensial

4. Analisis Tema Budaya

Analisis Tema Kultural, menurut Faisal (1990) dalam Sugiyanto (2012: 264) merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas.

Gambaran atau pola-pola tertentu yang ditentukan dalam data, kemudian oleh peneliti dihubung-hubungkan, dan direka-reka sehingga bisa terlihat gambaran secara utuh dan menyeluruh dari data yang telah terkumpul. Data keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah diolah dalam Analisis

Komponensial, bisa jadi muncul hubungan saling mempengaruhi atau pengungkapan penyebab terjadinya pola-pola tertentu yang muncul. Sehingga sampai di sini, peneliti sudah mampu membuat kesimpulan awal mengenai “benang merah” atas permasalahan yang muncul di awal.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pembuatan pedoman wawancara, dengan menambahkan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi temuan dari peneliti. Selanjutnya, peneliti melakukan kembali analisis data dengan urutan yang sama dengan metode wawancara untuk mendapatkan konfirmasi dari temuan peneliti. Setelah analisis yang sama dilakukan pada data hasil wawancara, kemudian peneliti melakukan analisis tema kultural antara hasil analisa data hitungan dengan hasil analisa data wawancara. Bisa saja terjadi, saat analisa tema kultural antara hasil analisa hitungan wawancara, ditemukan “benang merah” yang berbeda dengan kesimpulan awal dari peneliti. Sehingga ketika analisis ini sudah selesai, peneliti sudah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada.

G. Keabsahan Data

Agar suatu penelitian kualitatif teruji dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi yaitu:¹⁰³

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

¹⁰³Bungin Burhan, penelitian kualitatif (Jakarta: Kencana, 2007) h. 258.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda¹⁰⁴. Tahap ini peneliti lakukan dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan terkait pemberdayaan ekonomi dengan hasil wawancara dengan informan.
2. Membandingkan wawancara antara informan satu dengan yang lainnya.
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh masyarakat Desa Sanankerto tentang situasi BUMDes Kerto raharjo dengan wawancara yang telah dilakukan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat, kebijakan pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya.¹⁰⁵

¹⁰⁴Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: 1995) h. 178.

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 331

BAB IV

PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kerto Raharjo terletak di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Jawa Timur. BUMDEs ini terletak di kawasan pedesaan yang asri dan terdapat sangat banyak tanaman Bambu. Oleh karena itu desa ini menjadi desa yang sangat memungkinkan untuk pengembangan sosial ekonomi kemasyarakatan. Desa ini hanya berjarak sekitar kurang lebih dari kecamatan turen 7 KM.

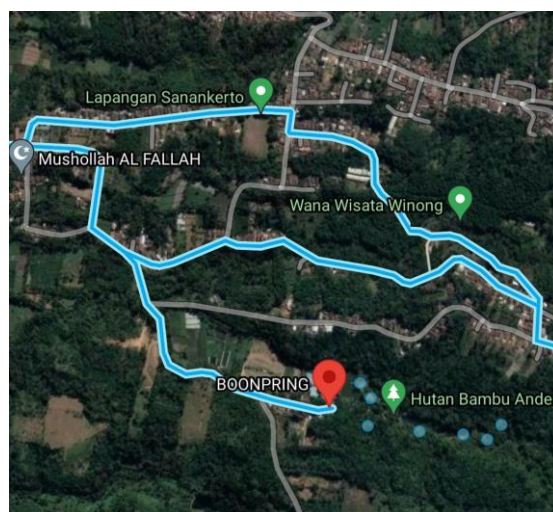
Desa ini memiliki Luas wilayah sekitar 363,848 ha, dengan ketinggian rata-rata sekitar kurang lebih 600 meter diatas permukaan laut dengan suhu minimum 27 derajat celcius dan suhu maksimum sampai dengan 35 derajat celcius. Adapun batas-batas wilayah desa Sanankerto, Kecamatan Turen Kabupaten Malang ini, diantaranya adalah:

- a. Sebelah Utara: Sebelah Utara Desa Sanankerto ini berbatasan dengan Desa Bringin
- b. Sebelah Timur: SebelahTimur desa Sanankerto ini berbatasan dengan Desa Bringin dan juga Desa Sumber Putih.

- c. Sebelah Selatan: Sebelah Selatan Desa Sanankerto ini berbatasan dengan desa Jambangan.
- d. Sebelah Barat. Sebelah Barat Desa Sanankerto ini Berbatasan dengan Desa Sananrejo.

Gambar 4.1

Peta BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring



Sumber: Google Maps

Gambar 4.2

Lokasi BUMDes Kerjo Raharjo Unit usaha Boonpring



Sumber: Google Maps

2. Profil Wisata BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring

BUMDes Kerto Raharjo Sanankerto sudah berdiri sejak Bulan Desember 2016, namun Badan Usaha Milik Desa ini baru beroperasi pada 1 Maret 2017. Lokasi pendirian Badan Usaha Milik Desa ini yakni terletak di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kab. Malang.

3. Sejarah Berdirinya BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring

Samsul Arifin, selaku Direktur BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang menyatakan bahwa Boonpring menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Masyarakat. Bahkan sangat banyak Masyarakat yang mengartikan bahwa Boonpring ini merupakan kebun bambu atau anugrah yang berasal dari bambu. BUMDes Kerto Raharjo ini bukan hanya berfokus pada pengembangan Objek Pariwisata Boonpring akan tetapi juga produk usaha lainnya seperti pengembangan Bank Sampah sebagai sarana pengelolaan sampah, Agen Link BNI, UKM Kuliner, dan pada tahun 2021 ini BUMDes Kertoraharjo menambah usahanya pada Sektor Binaan Sembako dan Air mineral.

Boonpring ini pada awalnya merupakan kawasan ekowisata yang berawal dari tanah kas desa yang diolah menjadi objek wisata. Tepatnya pada tahun 1975 lalu pemerintah kabupaten malang mengetahui bahwa terdapat salah satu daerah yang terletak di desa Sanankerto yang cukup

berpotensi. Maka dari itu pemerintah melalui Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah membangun daerah tersebut menjadi kawasan wisata. Lalu pada tahun 1980 kawasan tersebut dikembangkan menjadi wisata desa, pada tahun 2021 barulah dibangun kolam renang yang dikhususkan untuk anak-anak. Barulah pada tahun 2014 kawasan tersebut dicanangkan sebagai sentra bambu karena memang tanaman komoditi kawasan tersebut adalah bambu. Pada tahun yang sama yakni 2014 pemerintah juga menetapkan desa tersebut sebagai desa wisata. Dari tahun 2014 itulah terus dilakukan pembangunan untuk dapat menarik minat wisatawan. Terlebih peluang minat berwisata pada tahun-tahun berikutnya memang cenderung naik.

Pada tahun 2017 lalu omset wisata Boonpring ini tercatat sampai dengan Rp. 994 juta dan meningkat menjadi sebanyak Rp. 2,8 Miliar pada tahun 2018 dan dari omset yang telah diperoleh BUMDes ini mampu menyumbang PAD atau Pendapatan Asli Desa selama dua tahun sampai dengan Rp. 517 Juta. Lalu pada tahun berikutnya, BUMDes ini tidak lagi meminta Dana Desa sebagai modal karena pihak BUMDes ingin dana desa dapat dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur lainnya. Namun meskipun BUMDes ini tidak lagi mendapatkan suntikan modal dari dana desa, BUMDes masih saja mampu menyumbang pendapatan asli desa pada tahun 2019 sampai dengan sebesar Rp. 600 juta.

Boonpring menjadi salah satu destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Malang bahkan hal ini bukan hanya diakui oleh warga

Kabupaten Malang saja. BUMDes Kertoraharjo ini berhasil meraih juara pertama tingkat nasional dan Jambore BUMDes yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau BPMD Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya BUMDes ini tentunya menjadi sebuah sarana untuk dapat meningkatkan perekonomian desa melalui potensi yang telah ada. Saat ini BUMDes telah membuka lapangan pekerjaan terhadap terhadap kurang lebih sebanyak 75 orang yang berasal dari warga desa sanankerto. Keberadanaan Ekowisata Boonpring sebagai produk utama BUMDes ini membawa banyak pengaruh, salah satunya banyaknya kedai-kedai makanan yang ada di lokasi wisata Boonpring. Sampai dengan tahun 2021 sedikitnya terdapat 60 kedai atau warung makan yang telah berdiri dibawah pengelolaan BUMDes dan turut dimanfaatkan oleh warga desa Sanankerto.

4. Tujuan Pendirian BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring

Berdasarkan sejarah pendirian BUMDes yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui tujuan pendirian BUMDes diantaranya adalah:

- a. Untuk dapat mengurangi angka pengangguran
- b. Untuk dapat meningkatkan Peluang usaha bagi Masyarakat.
- c. Untuk membuka kesempatan masyarakat untuk berinvestasi.

d. Sebagai sumber pendapatan asli desa.

5. Struktur Organisasi BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring

Dalam pengoperasiannya Badan Usaha Milik Desa ini memiliki Karyawan yang cukup banyak dan jumlahnya berbeda pada setiap tahunnya. Dalam setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah karyawan seiring dengan semakin majunya usaha dari BUMDes Kerto Raharjo ini. Seluruh Karyawan BUMDes Kerto Raharjo ini terdiri atas Pokdarwis, Poktan, Karang Taruna, dan juga masyarakat umum. Berikut data jumlah karyawan setiap tahun:

Tabel 4.1
Jumlah Karyawan BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha Boonpring

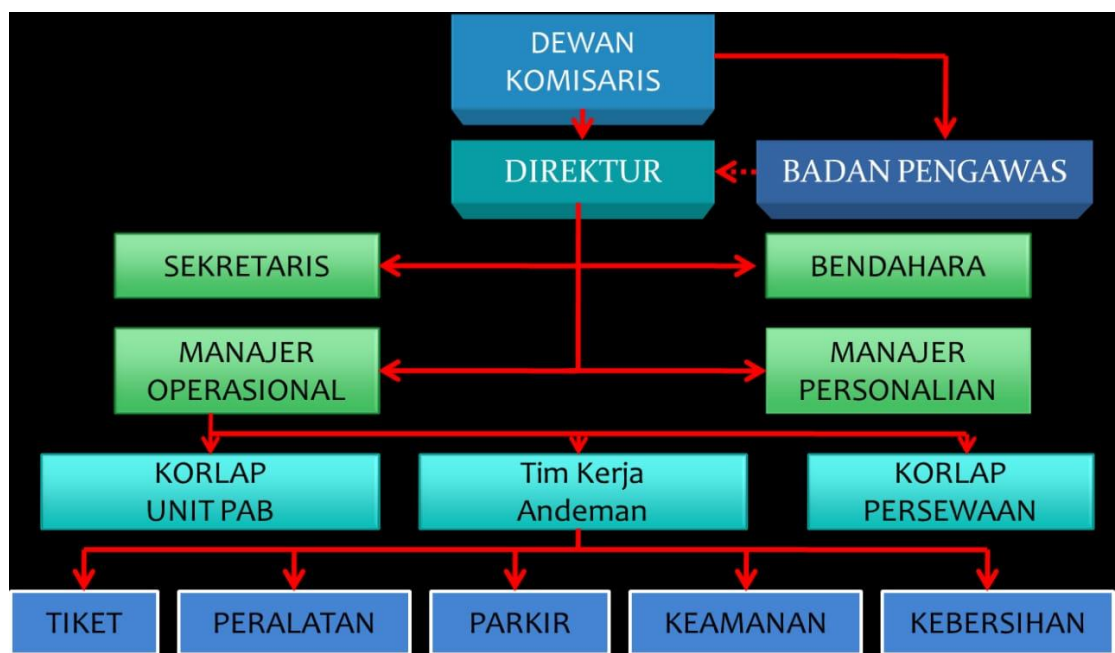
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
47	58	74

Sumber: Data Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah karyawan BUMDes Boonpring Kerto Raharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen pada tahun 2017 adalah sebanyak 47 orang. Sementara pada tahun 2018 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya hasil usaha dan pengembangan yakni sebanyak 58 orang. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah karyawannya mencapai 74 orang.

Dengan jumlah karyawan tersebut, dapat diketahui susunan Struktur Organisasi BUMDes Kerto Raharjo Sanankerto Kecamatan Turen sebagaimana pada Gambar Berikut:

Gambar 4.3
Gambar Struktur Organisasi BUMDes Kerto Raharjo



Sumber: Data Diolah Peneliti (2021)

Berdasarkan gambar struktur organisasi tersebut, dapat diuraikan mengenai pembagian tugas, wewenang dari setiap karyawan yang tersusun dalam struktur organisasi DUMDes Kertoraharjo, sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kepala Desa

Anggota Komisaris :

- 1) Kafid Muzadi

- 2) Djamaludin
- 3) Susiadi
- 4) Lukman Al-Hakim
- 5) Laila Yuniarti, SE
- 6) Subakri
- 7) Muhamad Sulkan
- 8) Biismilatif

b. Badan Pengawas

- 1) Sigit Pribadi, S.Pt
- 2) Ya'kub
- 3) Muhtarom
- 4) Aris Wibowo
- 5) Samsul Arifin

c. Badan Pengurus

Direktur 1 : Drs. H. Samsul Arifin, MSi

Direktur 2 : Drs. H. Moch Yatim

Bendahara : Drs. Abdulloh Faqih

Sekretaris 1 : Diyan Agus Sukarno, S.PdI

Sekretaris 2 : Sulistyaningari, S.Pd

6. Kegiatan Utama BUMDes Kerto Raharjo Unit Usaha

Boonpring

Kegiatan Utama dari BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah fokus terhadap Optimalisasi Objek Pariwisata boonpring sebagai tempat wisata, perkemahan, Out Bond, dan juga Wisata Edukasi tentang tanaman Bambu. Petugas BUMDes ini setiap tahunnya akan merumuskan perencanaan Pembangunan dan pada tahun 2021 terdapat sejumlah perencanaan yang harus dijalankan dan pada tahun 2022 mendatang segala aspek yang termasuk dalam perencanaan sudah terpenuhi. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan sumber modal, perencanaan pendekatan Sektoral. Perencanaan pembangunan Sumber Daya Manusia BUMDes, dan juga perencanaan dari segi teknologi.

BUMDes pada tahun 2021 ini menekankan pada konsep pengembangan yang dilakukan pendekatan spasial yakni tata rang wilayah Ekowisata Boonpring sehingga dalam hal ini pihak BUMDes menggunakan Panduan kerangka dasar Pengembangan serta dokumen-dokumen yang mencerminkan adanya keseluruhan perencanaan pengembangan dalam wilayah kerja BUMDes.

Selain Optimalisasi pembangunan Kegiatan Utama dari BUMDes dengan Unit usaha Boonpring ini adalah memberdayakan masyarakat melalui program Pendekatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Dilain sisi BUMDes juga melakukan pendekata secara sektoral untuk

mencapai dan merealisasikan perencanaan yang sudah dirumuskan. Pendekatan sektoral yang dilakukan BUMDes yakni pendekatan terhadap Sektor Rill dan juga Sektor Keuangan dengan cara mengembangkan Komoditas dan usaha produktif dengan caea mengoptimalisasikan peranan BUMBes sebagai Lokomotif pembangunan Ekonomi Desa. Dalam hal ini BUMDes juga senantiasa memposisikan diri untuk Wirausaha yaitu BUMDes memfokuskan Energinya untuk memperoleh pendapatan atau hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya modal yang ada di BUMDes.

Sumber Daya modal BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang ini berasal dari Tiga Sumber yakni Penyertaan Modal Desa, Investasi Masyarakat, dan juga Berasal dari Hutang kepada pihak ke 3 atau Investor lain yang kemudian setelah modal terkumpul dan dikelola sehingga mendapatkan hasil usaha kemudian hasil Usaha BUMDes tersebut disalurkan kepada beberapa aspek, seperti disumbangkan terhadap Pendapata Asli Desa satau PAD, Penguatan Modal usaha Boonpring, Pengembangan Usaha Boonpring dalam hal ini pembangunan dan lain sebagainya, Peningkatan Kapasitas Usaha, Pendidikan Masyarakat sebagai Sumber Utama Daya Manusia Utama di BUMDes, dan juga Asuransi kesehatan masyarakat yang berkecimpung dalam BUMDes.

Secara tidak langsung keberadaan BUMDes ini mendukung serta memberikan dorongan yang kuat terhadap masyarakat untuk melakukan

Investasi dan merubah paradigma dari kebiasaan konsumtif menjadi lebih produktif melalui Investasi. BUMDes ini memfasilitasi masyarakat untuk dapat berinvestasi melalui Obligasi yang dijual kepada masyarakat mulai dari angka terkecil yakni sebesar Rp.100.000 rupiah dengan nama Obligasi kecil, Kemudian Obligasi Sedang dengan nilai Rp.1.000.000. Kemudian Obligasi Besar dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000. Return yang dijanjikan dari masing-masing besaran jumlah investasi juga bermacam-macam bergantung besaran investasi. Sedangkan untuk hasil usaha dari BUMDes ini dipetakan sebagai berikut:

- a. 25% : disetorkan kepada APBD.
- b. 25% : digunakan untuk pengembangan usaha BUMDes.
- c. 5% : digunakan sebagai cadangan Umum.
- d. 9% : digunakan sebagai dana pengurus.
- e. 5% : digunakan sebagai dana pendidikan masyarakat.
- f. 5% : digunakan untuk dana RT atau RW.
- g. 5% : digunakan untuk asuransi atau jaminan hari tua atau imbal jasa.
- h. 8,5% : digunakan untuk dana dewan komisaris.
- i. 7,5% : digunakan untuk dana karyawan.
- j. 5% : digunakan untuk dana sosial.

7. Profil Singkat Informan

Sebelum penelitimemaparkan hasil penelitian dan juga wawancara dengan informan berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Peneliti akan menjelaskan secara singkat karakteristik dari Informan yang ada dalam penelitian ini. Dalam peneltian ini, peneliti akan membagi informan menjadi dua bagian yang kemudian akan diwawancarai. Dua bagian tersebut adalah informan yang berasal dari Anggota BUMDes kertoraharjo Desa Sanankerto Kabupaten Malang dan kedua yakni pihak luar BUMDes yang terdiri dari perangkat desa yang terlibat dan juga masyarakat. Berikut Informan mengenai pembedayaan Masyarakat oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai berikut:

- a. Pihak Pegawai BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kab Malang.

Pihak Pegawai BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto yang terlibat sebagai Informan, diantaranya adalah:

- 1) Bapak Samsul Arifin selaku direktur BUMDes Kertoraharjo.

Adapun Informasi yang dibutuhkan dari Direktur BUMDes ini adalah bagaimana Strategi untuk Menyadarkan Masyarakat serta memperkenalkan

BUMDes terhadap masyarakat. Selain itu juga bagaimana caranya mengelola membuat Strategi penguatan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di BUMDes ini sehingga upayanya dalam pemberdayaan masyarakat dan memajukan BUMDes ini dapat terlaksanakan dengan maksimal.

- 2) Bapak Mahrodi selaku Kepala Unit Usaha Boonpring. Adapun Informasi yang dibutuhkan dari Kepala Unit Usaha Boonpring ini adalah Bagaimana cara melakukan pelatihan dan pendidikan terhadap para pedagang yang turut serta menjadi produk pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga bagaimana meningkatkan kapasitas kelompok sadar wisata di unit usaha Boonpring.
- 3) Bapak Drs Abdulloh Faqih bendahara BUMDes. Adapun Informasi yang dibutuhkan dari Bendahara BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen adalah bagaimana pengelolaan sumber daya keuangan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dan pembagian keuntungan dari BUMDes ini. Selain itu juga bagaimana pemberdayaan yang dilakukan untuk pelatihan terhadap Manajemen Rumah Tangga.

- b. Pihak di Luar BUMDes Kertoraharjo Desa Sanan Kerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Dalam hal ini pihak luar usaha BUMDes yang terlibat sebagai Informan adalah:
- 1) Bapak M. Subur S.E selaku kepala desa Sanankerto. Adapun Informasi yang dibutuhkan dari Kepala Desa Sanankerto ini adalah Upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat desa sanankerto mengenai keberadaan BUMDes dimana hal ini dapat searah dengan tujuan BUMDes. Selain itu juga aspek apa saja yang diperhatikan agar BUMDes tetap berjalan dan berkembang disertai dengan fasilitas desa terpenuhi dengan baik.
 - 2) Ibu Nanik Yakni pedagang Kripik Pisang dan Oleh-oleh Olahan Pisang yang lokasi usahanya terletak di Wisata Boonpring. Adapun informasi yang diperlukan dari Pedagang di Boonpring ini adalah adakah dampak yang dirasakan oleh pedagang dari adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes.
 - 3) Ibu Sumiati Pedagang Makanan Ringan dan Kopi di Unit Usaha Boonpring. Adapun informasi yang diperlukan dari Pedagang di Boonpring ini adalah adakah dampak yang dirasakan oleh pedagang dari

adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes.

- 4) Yura Selaku Masyarakat lulusan SMA yang Aktif menerima Program pembelajaran Bahasa Inggris dan pelatihan menjadi Tour Guide. Adapun informasi yang diperlukan dari Pedagang di Boonpring ini adalah adakah dampak yang dirasakan oleh pedagang dari adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes.
- 5) Bapak Suyitno Pedagang Kopi dan Gorengan di Unit Usaha Boonpring. Adapun informasi yang diperlukan dari Pedagang di Boonpring ini adalah adakah dampak yang dirasakan oleh pedagang dari adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes.
- 6) Pak Suhar Petugas Persewaan Ban dan Pelampungdi Unit Usaha Boonpring. Adapun informasi yang diperlukan dari Pedagang di Boonpring ini adalah adakah dampak yang dirasakan oleh pedagang dari adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes.
- 7) Pak Kayat Pedagang Kopi dan Gorengan di Unit Usaha Boonpring. Adapun informasi yang

diperlukan dari Pedagang di Boonpring ini adalah adakah dampak yang dirasakan oleh pedagang dari adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes.

- 8) Pak Tanjung Pedagang Baju Renang dan Mainan di Unit Usaha Boonpring. Adapun informasi yang diperlukan dari Pedagang di Boonpring ini adalah adakah dampak yang dirasakan oleh pedagang dari adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan BUMDes.
- 9) Luqman selaku Salah satu anggota penggiat Kelompok Sadar Wisata. Adapaun informasi yang dibutuhkan adalah apakah terdapat upaya yang berarti dari BUMDes untuk kelompok Sadar Wisata ini sebagai bentuk proses pembedayaan.

Dari sembilan orang narasumber yang dipilih Karena para nara sumber tersebut dianggap paling paham dan paling tau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BUMDes Kerto Raharjo dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

B. Hasil Penelitian

1. Peran BUMDES Kerto Raharjo dalam Implementasi Ekonomi Syariah Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto ini merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat, bidikan utama dari pemerintah Desa Sanankerto ini adalah masyarakat dengan penghasilan harian yang minim dan masyarakat pada usia produktif namun tidak mampu berpenghasilan karena minim pengetahuan dan beberapa alasan lainnya. Lembaga Ekonomi tingkat pedesaan ini memang memegang peranan yang cukup penting sebagai penggerak ekonomi desa dan warga sekitar. Dengan adanya lembaga ekonomi Seperti BUMDes ini tentunya pemerintah mengharapkan dukungan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan ekonomi kerakyatan sehingga seluruh masyarakat dapat hidup dengan sejahtera terutama masyarakat miskin. Lembaga Ekonomi seperti BUMDes ini dikelola sendiri oleh masyarakat desa. Sehingga nantinya hasilnya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat di desa tersebut.

Fungsi Lembaga ekonomi BUMDes ini adalah sebagai Fasilitator dan Mediator penggerak dalam hal perencanaan badan usaha dan unit-unit usaha yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta bertugas untuk memberikan sosialisai terkait dengan hasil-hasil usulan rencana

usaha yang sudah ditetapkan di Badan Usaha Milik Desa, serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang berujung pada Pendapatan asli Desa atau PAD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dengan menggunakan metode penelitian wawancara, observasi, dan studi literasi peneliti memperoleh hasil bahwa keberadaan BUMDes Kertoraharjo di Desa Sanankerto kecamatan Turen ini membawa dampak bagi perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini sebagaimana pernyataan dari beberapa pedagang dan masyarakat yang menjadi informan. Dilakukan wawancara langsung pada informan yang berkaitan dengan penelitian, sehingga diperoleh hasil berikut:

Suhar : *“Terbantu sekali dengan adanya BUMDes ini, selain diberi ide untuk berjualan dan berirusaha juga diberikan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat tahu tatacara berwirausaha. Awalnya dulu warga yang beprofesi sebagai pedagang di Boonpring sedikit. Namun melihat keberhasilan warga lain terlihat menjanjikan dan ekonominya meningkat. Jadi sekarang ada sekitar 60 an lapak usaha yang sudah terisi, belum juga pedagang yang hanya membawa motor dan pedagang-pedagang persewaan”¹⁰⁶*

Kayat : *“sejak mendapatkan fasilitas dari BUMDes ini*

¹⁰⁶Suhar, Wawancara, (Desa Sanankerto, 23 Januari 2021)

penghasilannya lumayan, dibandingkan jika hanya bertani saja. Jadi ketika sedang tidak mengelola lahan bisa berjualan, jika mengelola lahan pertanian nanti usahanya dijaga anak atau istri jadi tetap berpenghasilan tidak menunggu masa panen dari pertanian. Apalagi fasilitas yang diberikan BUMDes ini bukan hanya sewa tempat yang murah tapi juga dipinjami modal usaha, bayarnya bisa dicicil seperti koperasi. Masih juga diberi pembelajaran mengelola keuangan, jadi usahanya berjalan terus”¹⁰⁷

Syamsul :*“Secara mudahnya, Peranan dari BUMDes ini meliputi 3 hal yakni berperan sebagai Fasilitator yang memberikan Fasilitas bagi masyarakat baik pedagang, warga yang belum memiliki pekerjaan untuk dipekerjakan di BUMDes sampai dengan kelompok sadar Wisata”.*

Mahrodi :*“peran utama BUMDes di bagian ekonomi masyarakat lebih kepada memberikan fasilitas, memberikan tempat untuk jualan, memberi pelatihan biar pegawai ngga asal jualan, lihat dan mengontrol apa masih punya modal apa tidak”*

Abdullah :*“Fasilitas yang diberikan BUMDes bukan hanya lapak yang sewanya murah akan tetapi juga modal dan berbagai pelatihan. Selanjutnya BUMDes juga berperan sebagai Mediator yang memediasi permasalahan ekonomi dan juga usaha yang ada di masyarakat Desa Sanankerto melalui pelatihan dan kontroling di Manajemen Rumah tangga. Terakhir BUMDes sebagai stabilisator yang turut menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat kembali lagi dari pelatihan yang diberikan. Sehingga pihak*

¹⁰⁷ Kayat, Wawancara, (Desa Sanankerto, 23 Januari 2021)

BUMDes bukan hanya memenuhi kebutuhan fasilitas akan tetapi juga didampingi betul jangan sampai ekonomi setiap rumah tangga merosot”¹⁰⁸

Subur :*“dengan adanya BUMDes ini, pembangunan di desa terbantu ya karena pengelolaannya baik dan keuntungannya berlebih, jadi pembangunan bisa di bantu dari BUMDes itu. Kemudian untuk masyarakatnya sendiri pendapatannya jadi lebih banyak juga karena ada fasilitas yang mereka sediakan, di kasih tempat jualan meskipun sewa tapi masih relatif murah, adanya pinjaman modal tanpa bunga, masyarakat juga diberi ide usaha. Jadi bukan hanya BUMDesnya yang pendapatannya terus meningkat tapi ekonomi masyarakat sekitar juga terdukung”*

Nani :*“perannya BUMDes dalam ekonomi yang paling kelihatan ya dari tempat jualan itu, dulu sebelum ada tempat jualan hanya bertani saja. Sekarang dikasih sewa tempat jualan jadinya ekonomi lebih baik”.*

Sumiati :*“BUMDes sering ngasih pelatihan, di kasih ide-ide masukan jualan. Dicarikan bahan—bahan dan sebagainya, jadi ngga buntu dan laku. Trus diajarin juga cara-cara atur uang, biar ada sisa keuntungan”*

Yura :*“BUMDes emang bener-bener berperan disini, buktinya banyak ada kita dikasih tempat jualan, dikasih pinjaman modal, kemudian diberikan pelatihan, dan terus di kontrol. Jadi ekonomi kami ngga sampe merosot, apalagi ini nggak pernah tutup, jadi pendapatan ada terus”*

¹⁰⁸Syamsul Arifin, Wawancara, (Desa Sanankerto, 20 Januari 2021)

Suyitno :*“peran yang paling kelihatan di ekonomi ya ada pada pemberian fasilitas, warga desa sini yang awalnya cuma bertani trus nganggur sekarang bisa jualan dan itu untungnya lumayan menjanjikan. Jadi perekonomian itu lambat laun meningkat. Trus di kontrol jangan sampe ngga ada sampe kosong dan bangkrut”*.

Tanjung:*“BUMDes ini membantu banget ke ekonomi, jualan di tempat yang disediakan oleh BUMDes ini rame banget karenanya pengunjungnya banyak jadi pendapatannya banyak. Apalagi ada pelatihan-pelatihan jadi ngga ada jualan pengelolaan uang juga jadi baik”*

Luqman:*“pada bidang ekonomi, BUMDes membantu masyarakat dengan ngasih fasilitas seperti tempat jualan, belum lagi banyak warga sini yang direkrut jadi pekerja termasuk anak saya kerja disini trus saya jualan. Ada pelatihannya juga jadi bagus pokoknya”*

Berdasarkan jawaban kedua Informan tersebut maka dapat diperoleh hasil bahwa Bagi masyarakat Peran BUMDes dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian melalui pemberdayaan sangat baik. Melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BUMDes perekonomian masyarakat cukup terbantu untuk dapat meningkatkan perekonomiannya mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai dengan pengelolaan usaha dan perkembangan usahanya. Direktur Utama dari BUMDes ini Kertoraharjo Bapak Syamsul Arifin berpendapat mengenai peranan BUMDes ini sebagai berikut:

Berdasarkan pemaparan dari Direktur BUMDes Kertoraharjo dapat diketahui bahwa pada dasarnya peran dari BUMDes Kertoraharjo ini meliputi tiga hal yang tersebar dalam seluruh proses pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan yang sudah di paparkan pada sub bab sebelumnya. Ketiga peran dari BUMDes tersebut yakni sebagai Fasilitator yang memberikan fasilitas untuk masyarakat yang dalam Unit Usaha Boonpring ini tentunya ada fasilitas Lapak berjualan, Modal, serta menjadi Karyawan pengelolaan Unit Usaha Boopring. Kedua, yakni Berperan sebagai mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan dalam usaha mulai dari masalah modal, marketing, sampai dengan pengelolaan keuangan Rumah tangga melalui pelatihan rutin yang diberikan. Ketiga yakni berperan sebagai Stabilisator dimana BUMDes melalui program pemberdayaan Masyarakat ini berusaha membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun.

Tabel 4.2

**Data Tanggapan Informan BUMDes Desa Sanankerto Kecamatan
Turen Kabupaten Malang**

No.	Nama Responden	Pernyataan	Simpulan
1.	Suhar	Terbantu sekali dengan adanya BUMDes ini, selain diberi ide untuk berjualan dan berirusaha juga diberikan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat tahu tatacara berwirausaha. Awalnya dulu warga yang beprofesi sebagai pedagang di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Mediator 3. Stabilisator

		Boonpring sedikit. Namun melihat keberhasilan warga lain terlihat menjanjikan dan ekonominya meningkat. Jadi sekarang ada sekitar 60 an lapak usaha yang sudah terisi, belum juga pedagang yang hanya membawa motor dan pedagang-pedagang persewaanetiap rumah tangga merosot.	
2	Kayat	sejak mendapatkan fasilitas dari BUMDes ini penghasilannya lumayan, dibandingkan jika hanya bertani saja. Jadi ketika sedang tidak mengelola lahan bisa berjualan, jika mengelola lahan pertanian nanti usahanya dijaga anak atau istri jadi tetap berpenghasilan tidak menunggu masa panen dari pertanian. Apalagi fasilitas yang diberikan BUMDes ini bukan hanya sewa tempat yang murah tapi juga dipinjami modal usaha, bayarnya bisa dicicil seperti koperasi. Masih juga diberi pembelajaran mengelola keuangan, jadi usahanya berjalan terus.	1.Fasilitator 2.Mediator
3.	Syamsul	Secara mudahnya, Peranan dari BUMDes ini meliputi 3 hal yakni berperan sebagai Fasilitator yang memberikan Fasilitas bagi masyarakat baik pedagang, warga yang belum memiliki pekerjaan untuk dipekerjakan di BUMDes sampai dengan kelompok sadar Wisata.	1. Fasilitator

4.	Mahrodi	peran utama BUMDes di bagian ekonomi masyarakat lebih kepada memberikan fasilitas, memberikan tempat untuk jualan, memberi pelatihan biar pegawai ngga asal jualan, lihat dan mengontrol apa masih punya modal apa tidak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Mediator 3. Stabilisator
5	Abdullah	Fasilitas yang diberikan BUMDes bukan hanya lapak yang sewanya murah akan tetapi juga modal dan berbagai pelatihan. Selanjutnya BUMDes juga berperan sebagai Mediator yang memediasi permasalahan ekonomi dan juga usaha yang ada di masyarakat Desa Sanankerto melalui pelatihan dan kontroling di Manajemen Rumah tangga. Terakhir BUMDes sebagai stabilisator yang turut menjaga dan meningkatkan perekonomian masyarakat kembali lagi dari pelatihan yang diberikan. Sehingga pihak BUMDes bukan hanya memenuhi kebutuhan fasilitas akan tetapi juga didampingi betul jangan sampai ekonomi setiap rumah tangga merosot.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Mediator 3. Stabilisator
6.	Subur	dengan adanya BUMDes ini, pembangunan di desa terbantu ya karena pengelolaannya baik dan keuntungannya berlebih, jadi pembangunan bisa di bantu dari BUMDes itu. Kemudian untuk masyarakatnya sendiri pendapatannya jadi lebih banyak juga karena ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Mediator 3. Stabilisator

		fasilitas yang mereka sediakan, di kasih tempat jualan meskipun sewa tapi masih relatif murah, adanya pinjaman modal tanpa bunga, masyarakat juga diberi ide usaha. Jadi bukan hanya BUMDesnya yang pendapatannya terus meningkat tapi ekonomi masyarakat sekitar juga terdukung.	
7	Nani	perannya BUMDes dalam ekonomi yang paling kelihatan ya dari tempat jualan itu, dulu sebelum ada tempat jualan hanya bertani saja. Sekarang dikasih sewa tempat jualan jadinya ekonomi lebih baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Mediator 3. Stabilisator
8.	Sumiati	BUMDes sering ngasih pelatihan, di kasih ide-ide masukan jualan. Dicarikan bahan—bahan dan sebagainya, jadi ngga buntu dan laku. Trus diajarin juga cara-cara atur uang, biar ada sisa keuntungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Mediator
9	Yura	BUMDes emang benar-bener berperan disini, buktinya banyak ada kita dikasih tempat jualan, dikasih pinjaman modal, kemudian diberikan pelatihan, dan terus di kontrol. Jadi ekonomi kami ngga sampe merosot, apalagi ini nggak pernah tutup, jadi pendapatan ada terus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Kontrolling
10	Suyitno	peran yang paling kelihatan di ekonomi ya ada pada pemberian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Kontrolling

		fasilitas, warga desa sini yang awalnya cuma bertani trus nganggur sekarang bisa jualan dan itu untungnya lumayan menjanjikan. Jadi perekonomian itu lambat laun meningkat. Trus di kontrol jangan sampe ngga ada sampe kosong dan bangkrut.	
11	Tanjung	BUMDes ini membantu banget ke ekonomi, jualan di tempat yang disediakan oleh BUMDes ini rame banget karenanya pengunjungnya banyak jadi pendapatannya banyak. Apalagi ada pelatihan-pelatihan jadi ngga ada jualan pengelolaan uang juga jadi baik.	1. Fasilitator 2. Kontrolling
12	Luqman	pada bidang ekonomi, BUMDes membantu masyarakat dengan ngasih fasilitas seperti tempat jualan, belum lagi banyak warga sini yang direkrut jadi pekerja termasuk anak saya kerja disini trus saya jualan. Ada pelatihanya juga jadi bagus pokoknya	1. Fasilitator 2. Kontrolling

Berdasarkan pemaparan dari Direktur BUMDes Kertoraharjo dapat diketahui bahwa pada dasarnya peran dari BUMDes Kertoraharjo ini meliputi tiga hal yang tersebar dalam seluruh proses pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan yang sudah di paparkan pada sub bab sebelumnya. Ketiga peran dari BUMDes tersebut yakni sebagai

Fasilitator yang memberikan fasilitas untuk masyarakat yang dalam Unit Usaha Boonpring ini tentunya ada fasilitas Lapak berjualan, Modal, serta menjadi Karyawan pengelolaan Unit Usaha Boonpring. Kedua, yakni Berperan sebagai mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan dalam usaha mulai dari masalah modal, marketing, sampai dengan pengelolaan keuangan Rumah tangga melalui pelatihan rutin yang diberikan. Ketiga yakni berperan sebagai Stabilisator dimana BUMDes melalui program pemberdayaan Masyarakat ini berusaha membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun.

2. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengembangan terhadap kemandirian dan juga kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan beberapa aspek seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, lkesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan berbagai kebijakan, penetapan program, adanya kegiatan dan juga proses pendampingan yang disesuaikan dengan esensi masalah dan juga prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang didirikan dengan tujuan dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat Desa Sanankerto melalui pemanfaatan Potensi yang ada pada masyarakat Desa Sanankerto untuk berbagai unit usaha salah satunya Ekowisata Boonpring. Proses Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Oleh BUMdes adalah dengan berbagai hal, diantaranya:

Samsul Arifin:

“Hambatan masyarakat tidak dapat memaksimalkan potensinya adalah tidak mampu mengelola dan mengoptimisasikan sumber daya alam yang memang sifatnya masih mentah. Oleh karena itu pihak BUMDes ini mendatangi masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai cara memanfaatkan Sumber Daya Alam secara maksimal. Seperti membuat kerajinan dari Bambu, menjual berbagai olahan makanan khas yang bahan bakunya langsung dari alam sekitar, dan beberapa potensi lainnya”¹⁰⁹

Abdullah Faqih:

“Sebelum BUMDes ini berdiri dan berkembang sangat sedikit masyarakat yang memanfaatkan potensi alam secara maksimal untuk kebutuhan usahanya. Banyak dari masyarakat yang menjual hasil alam seperti pisang, bijih kopi, padi, ketela, dan hasil pertanian lainnya secara mentah tanpa bisa menambah nilai jual. Bahkan beberapa waktu tanaman mendong yang hanya ada di wilayah sanan dan wajak dijual bahan, bukan berbentuk kerajinan yang bisa di bawa sebagai oleh-oleh. Selain itu sangat banyak warga yang menganggur dan hanya menjadi buruh tani dengan pendapatan yang sangat minim. Namun setelah

¹⁰⁹Samsul Arifin, Wawancara (Desa Sanankerto, 20 Januari 2021)

BUMDes ini ada BUMDes bersama dengan pemerintah pelan-pelan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk pentingnya meningkatkan pendapatan dan itu bisa dari mana termasuk mengolah bahan mentah seperti menjual pisang goreng, dan membuat kripik pisang, dan lain sebagainya. Selain itu dengan adanya BUMDes warga-warga yang sebelumnya menganggur dan memiliki pendapatan yang minimum bisa berjualan di Ekowisata Boonpring sebagai penambah penghasilan. Para pedagang ini diizinkan berjualan apapun boleh produk olahan makanan seperti gorengan, makanan berat sampai ke baju dan oleh-oleh khas. Pihak BUMDes tidak mematok produk yang dijual”¹¹⁰

Mahrodi:

“Hal dasar selain menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup melalui potensi daerah yakni penguatan dari Sumber Daya manusia yang ada di BUMDes itu sendiri sehingga pihak BUMDes dapat meningkatkan unit-unit usaha dan memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika sumber daya BUMDes sudah berkualitas maka, proses yang dilakukan dapat optimal”¹¹¹

Subur:

“pelatihan yang diberikan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat yakni dalam hal pengelolaan usaha terutama pada pengelolaan sumber daya modal dan hasil usaha.

¹¹⁰Drs Abdullah Faqih, Wawancara (Desa Sanankerto, 20 Januari 2021)

¹¹¹Samsul Arifin, Wawancara (Desa Sanankerto, 20 Januari 2021)

Biasanya kebanyakan orang awam menganggap bahan omset hasil usaha adalah keuntungan. Hal ini yang perlu diluruskan keuntungan adalah omset setelah dikurangi modal. Selain itu seringkali masyarakat juga tidak menghitung tenaganya, jadi hanya memotong pendapatan dengan modal fisik saja, dan itu kurang benar sehingga dalam hal ini masyarakat perlu pengetahuan lebih lanjut. Lalu umumnya ketika omset penjualan meningkat masyarakat cenderung terus menggunakannya untuk kebutuhan pribadi, sehingga usahanya hanya sebatas itu-itu saja. Tidak ada pengembangan produk usaha, tidak ada perbaikan tempat dan sebagainya. Tentunya hal ini membuat pendapatan hanya terbatas itu-itu saja. Sehingga peran pelatihan BUMDes ini adalah memberikan pembelajaran agar para pedagang dalam mengelola usahanya”¹¹²

Yura:

“Dengan adanya pelatihan dan manajemen usaha yang diberikan oleh BUMDes ini yang awalnya penjualannya sepi sekarang jadi lumayan. Biasanya produksi goreng kripik pisang ini dua hari sekali atau kadang seminggu sekali, sekarang harus setiap hari kerena banyak peminat. BUMDes juga mengajarkan gimana ngelola keuangan dan tabungan supaya usahanya lebih besar”¹¹³

¹¹²Mahrodi, Wawancara, (Desa Sanankerto, 22 Januari 2021)

¹¹³Mahrodi, Wawancara, (Desa Sanankerto, 22 Januari 2021)

Abdullah Faqih:

“Peningkatan Kapasitas Kelompok sadar wisata ini sangat penting tentunya karena Wisata Boonpring ini merupakan kombinasi antara wisata alam dengan wisata modern bahkan bisa dibilang lebih banyak wisata alamnya. Karena pengunjung sangat banyak secara otomatis volume sampah juga meningkat. Nah ini pada awalnya baik pengunjung maupun pedagang suka membuang sampah sembarangan, baik itu di ladang sekitar atau di tempat-tempat yang jika dibiarkan bisa merusak potensi alam. Trus belum lagi bagi pihak-pihak yang melaksanakan kemah di lokasi wisata Boonpring seringkali melakukan tindakan yang dapat merusak alam, ya seperti membuat sampah sembarang, sampai penebangan pohon untuk keperluan mereka, dan masih banyak lagi permasalahan yang berkaitan dengan sadar wisata. Bahkan peningkatan ini juga dari segi tenaga BUMDes ini sendiri karena beberapa lahan juga merupakan habitat dari beberapa hewan lainnya sehingga jangan sampai kita membuat tempat wisata yang dapat merusak habitat makhluk hidup lainnya”¹¹⁴

Tabel 4.3 Jawaban Informan berkenaan dengan BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang

No.	Nama Responden	Pernyataan	Simpulan
1.	Samsul Arifin	Hambatan masyarakat tidak dapat memaksimalkan potensinya adalah tidak mampu mengelola dan	Pendekatan Sumber Daya Manusia

¹¹⁴Samsul Arifin, Wawancara, (Desa Sanankerto, 22 Januari 2021)

		<p>mengoptimalkan sumber daya alam yang memang sifatnya masih mentah. Oleh karena itu pihak BUMDes ini mendatangi masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai cara memanfaatkan Sumber Daya Alam secara maksimal. Seperti membuat kerajinan dari Bambu, menjual berbagai olahan makanan khas yang bahan bakunya langsung dari alam sekitar, dan beberapa potensi lainnya.</p>	
2.	Abdullah Faqih	<p>Sebelum BUMDes ini berdiri dan berkembang sangat sedikit masyarakat yang memanfaatkan potensi alam secara maksimal untuk kebutuhan usahanya. Banyak dari masyarakat yang menjual hasil alam seperti pisang, bijih kopi, padi, ketela, dan hasil pertanian lainnya secara mentah tanpa bisa menambah nilai jual. Bahkan beberapa waktu tanaman mendong yang hanya ada di wilayah sanan dan wajak dijual bahan, bukan berbentuk kerajinan yang bisa di bawa sebagai oleh-oleh. Selain itu sangat banyak warga yang menganggur dan hanya menjadi buruh tani dengan pendapatan yang sangat minim. Namun setelah BUMDes ini ada BUMDes bersama dengan pemerintah pelan-pelan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk pentingnya meningkatkan pendapatan dan itu bisa dari mana termasuk mengolah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Sumber Daya Manusia. 2. Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata. 3. Pemberian kerumah tanggaan 4. Pelatihan bahasa inggris.

	<p>bahan mentah seperti menjual pisang goreng, dan membuat kripik pisang, dan lain sebagainya. Selain itu dengan adanya BUMDes warga-warga yang sebelumnya menganggur dan memiliki pendapatan yang minimum bisa berjualan di Ekowisata Boonpring sebagai penambah penghasilan. Para pedagang ini diizinkan berjualan apapun boleh produk olahan makanan seperti gorengan, makanan berat sampai ke baju dan oleh-oleh khas. Pihak BUMDes tidak mematok produk yang dijual.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Kelompok sadar wisata ini sangat penting tentunya karena Wisata Boonpring ini merupakan kombinasi antara wisata alam dengan wisata modern bahkan bisa dibilang lebih banyak wisata alamnya. Karena pengunjung sangat banyak secara otomatis volume sampah juga meningkat. Nah ini pada awalnya baik pengunjung maupun pedagang suka membuang sampah sembarangan, baik itu di ladang sekitar atau di tempat-tempat yang jika dibiarkan bisa merusak potensi alam. Trus belum lagi bagi pihak-pihak yang melaksanakan kemah di lokasi wisata Boonpring seringkali melakukan tindakan yang dapat merusak alam, ya seperti membuat sampah sembarang, sampai penebangan pohon untuk keperluan mereka, dan masih banyak lagi</p>	
--	---	--

		permasalahan yang berkaitan dengan sadar wisata. Bahkan peningkatan ini juga dari segi tenaga BUMDes ini sendiri karena beberapa lahan juga merupakan habitat dari beberapa hewan lainnya sehingga jangan sampai kita membuat tempat wisata yang dapat merusak habitat makhluk hidup lainnya	
3.	Mahrodi	Hal dasar selain menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup melalui potensi daerah yakni penguatan dari Sumber Daya manusia yang ada di BUMDes itu sendiri sehingga pihak BUMDes dapat meningkatkan unit-unit usaha dan memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika sumber daya BUMDes sudah berkualitas maka, proses yang dilakukan dapat optimal	Pelatihan dan Penguatan BUMDes.
4.	Subur	pelatihan yang diberikan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat yakni dalam hal pengelolaan usaha terutama pada pengelolaan sumber daya modal dan hasil usaha. Biasanya kebanyakan orang awam menganggap bahan omset hasil usaha adalah keuntungan. Hal ini yang perlu diluruskan keuntungan adalah omset setelah dikurangi modal. Selain itu seringkali masyarakat juga tidak menghitung tenaganya, jadi hanya memotong pendapatan dengan modal fisik	Pelatihan Manajemen Usaha untuk para Pedagang dan UMKM

		<p>saja, dan itu kurang benar sehingga dalam hal ini masyarakat perlu pengetahuan lebih lanjut. Lalu umumnya ketika omset penjualan meningkat masyarakat cenderung terus menggunakannya untuk kebutuhan pribadi, sehingga usahanya hanya sebatas itu-itu saja. Tidak ada pengembangan produk usaha, tidak ada perbaikan tempat dan sebagainya. Tentunya hal ini membuat pendapatan hanya terbatas itu-itu saja. Sehingga peran pelatihan BUMDes ini adalah memberikan pembelajaran agar para pedagang dalam mengelola usahanya.</p>	
5.	Yura	<p>Dengan adanya pelatihan dan manajemen usaha yang diberikan oleh BUMDes ini yang awalnya penjualannya sepi sekarang jadi lumayan. Biasanya produksi goreng kripik pisang ini dua hari sekali atau kadang seminggu sekali, sekarang harus setiap hari karena banyak peminat. BUMDes juga mengajarkan gimana ngelola keuangan dan tabungan supaya usahanya lebih besar.</p>	<p>Pelatihan Manajemen Usaha untuk para Pedagang dan UMKM</p>

Berdasarkan jawaban informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Informan menjawab bahwa BUMDes memiliki peranan berikut ini dalam pemberdayaan masyarakat:

- a. Pendekatan Sumber Daya Manusia
- b. Pelatihan serta penguatan BUMDes

- c. Pelatihan Manajemen Usaha untuk para Pedagang dan UMKM
- d. Pemberian pelatihan
- e. Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa peranan dari BUMDes ini sangat baik bagi peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat. Masyarakat Desa Sanankertopun merasa sangat terbantu dengan adanya BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Namun yang tidak kalah penting adalah mayoritas masyarakat di Desa Sanankerto Bergama Islam oleh karena itu sangatlah penting untuk diketahui apakah Pengelolaan BUMDes sebagai upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini sudah sesuai dengan Syariah.

Jika melihat dari bagaimana pemberdayaan ekonomi ini sendiri tentunya sangat erat dengan *Maqasid Syariah* yang menitikberatkan pada bagaimana dengan adanya Badan Usaha ini dapat menjadi Maslahat bagi umat.

Samsul Arifin:

“Baik dalam BUMDesnya sendiri maupun dalam Unit usaha Boonpring ini. Sampai saat ini belum ada masalah besar yang sampai menyebabkan perpecahan. Seluruh fasilitas kita peruntukkan untuk umum dan terbuka bagi siapapun baik fasilitas lapak, modal usaha, sampai menjadi pengelola BUMDes, selama memenuhi syarat kami tidak membeda-bedakan dari dusun mana atau saudara siapa. Sehingga sampai saat ini tidak ada masalah atau dapat dikatakan bahwa BUMDes sebagai lembaga kepentingan bersama yang bergerak di Bidang Ekonomi sangat bisa memenuhi ekspektasi warga desa. Pengelolaan dilakukan sendiri oleh warga, hasilnya juga dirasakan sendiri

*oleh warga*¹¹⁵

Mahrodi:

*“di BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto ini seluruhnya kerja sama. Mulai dari kerja sama dengan pemerintah sebagai sumber permodalan utamanya dulu sampai ingin mengembangkan usaha berusaha bekerja sama dengan Investor. Investornya ini sendiri berasal dari masyarakat. Secara sederhana kami menjual obligasi atau saham untuk pengelolaan BUMDes nanti imbal hasil dari usahanya berikan kepada masyarakat sebagai keuntungan dari masyarakat. Jika untung lebih masyarakat juga mendapatkan hasil lebih, jika kurang atau standar ya masyarakat imbal hasilnya sesuai. Semua tercatat dan tertata secara transparan kami berikan catatannya sampai ke catatan keuangan sifatnya tahunan. Begitu juga dengan investor luar. Kami memilih investor perorangan bukan dari bank, karena ingin menyesuaikan imbal hasil tadi. Semua proses pelaksanaan BUMDes ini melibatkan masyarakat Sanankerto sini, semua proses kegiatan tentunya sudah dihitung secara matang dan ditransparasikan. Sehingga tidak ada masyarakat yang protes karena berbagai hal”*¹¹⁶

¹¹⁵Syamsul Arifin, Wawancara, (Desa Sanankerto, 20 Januari 2021)

¹¹⁶Bendahara, Wawancara, (Desa Sanankerto, 20 Januari 2021)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran BUMDES Kertoraharjo dalam Implementasi Ekonomi Syariah Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Peran BUMDes Kertoraharjo dalam Implementasi Ekonomi masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang adalah sebagai Fasilitator, Mediator, dan Stabilisator. Adapun untuk mengetahui peran BUMDes ini perlu memperhatikan beberapa poin berikut:

1. Fasilitator

Pada tahun 2017 lalu omset wisata Boonpring ini tercatat sampai dengan Rp. 994 juta dan meningkat menjadi sebanyak Rp. 2,8 Miliar pada tahun 2018 dan dari omset yang telah diperoleh BUMDes ini mampu menyumbang PAD atau Pendapatan Asli Desa selama dua tahun sampai dengan Rp. 517 Juta. Lalu pada tahun berikutnya, BUMDes ini tidak lagi meminta Dana Desa sebagai modal karena pihak BUMDes ingin dana desa dapat dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur lainnya. Namun meskipun BUMDes ini tidak lagi mendapatkan suntikan modal dari dana desa, BUMDes masih saja mampu menyumbang pendapatan asli desa pada tahun 2019 sampai dengan sebesar Rp. 600 juta.

Boonpring menjadi salah satu destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Malang bahkan hal ini bukan hanya diakui oleh warga Kabupaten Malang saja. BUMDes Kertoraharjo ini berhasil meraih juara pertama tingkat nasional dan Jambore BUMDes yang diselenggarakan

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau BPMD Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya BUMDes ini tentunya menjadi sebuah sarana untuk dapat meningkatkan perekonomian desa melalui potensi yang telah ada. Saat ini BUMDes telah membuka lapangan pekerjaan terhadap terhadap kurang lebih sebanyak 75 orang yang berasal dari warga desa sanankerto. Keberadanaan Ekowisata Boonpring sebagai produk utama BUMDes ini membawa banyak pengaruh, salah satunya banyaknya kedai-kedai makanan yang ada di lokasi wisata Boonpring. Sampai dengan tahun 2021 sedikitnya terdapat 60 kedai atau warung makan yang telah berdiri dibawah pengelolaan BUMDes dan turut dimanfaatkan oleh warga desa Sanankerto.

Tolak ukur keberhasilan badan usaha tentunya sangat beragam, dalam penelitian ini keberhasilan badan usaha dapat diukur berdasarkan indikator keberhasilan. Beberapa ketentuan umum yang dapat dijadikan acuan dalam keberhasilan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di sebagaimana dipublikasikan oleh Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di tahun 2007, yaitu bahwa¹¹⁷ :

- a. Meningkatnya perekonomian desa
- b. Meningkatkannya pendapatan asli desa

¹¹⁷Ridlwan Zulkarnain, urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa, jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 3 2014

- c. Meningkatnya pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Meningkatnya pemerataan ekonomi desa.

Hasil dari penelitian tersebut yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa dari BUMDes meningkat, serta adanya peningkatan pemanfaatan potensi desa dan perekonomian masyarakat ini menjadi salah satu bukti bahwa penelitian ini relevan dengan teori pengukuran keberhasilan BUMDes sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes Kertorahajo ini cukup berhasil melakukan pemberdayaan Ekonomi.

BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto ini merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat, bidikan utama dari pemerintah Desa Sanankerto ini adalah masyarakat dengan penghasilan harian yang minim dan masyarakat pada usia produktif namun tidak mampu berpenghasilan karena minim pengetahuan dan beberapa alasan lainnya. Lembaga Ekonomi tingkat pedesaan ini memang memegang peranan yang cukup penting sebagai penggerak ekonomi desa dan warga sekitar. Dengan adanya lembaga ekonomi Seperti BUMDes ini tentunya pemerintah mengharapkan dukungan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan ekonomi kerakyatan sehingga seluruh masyarakat dapat hidup dengan sejahtera terutama masyarakat miskin. Lembaga Ekonomi seperti BUMDes ini dikelola sendiri oleh masyarakat

desa. Sehingga nantinya hasilnya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan jawaban dari informan tersebut diketahui bahwa peran dari BUMDes dalam Implementasi Ekonomi Syariah yakni sebagai fasilitator yang mana BUMDes memberika Fasilitas yakni berupa lapangan pekerjaan serta memberikan tempat untuk berjualan dengan sewa yang harganya relatif murah.

2. **Mediator**

BUMDes Berperan sebagai mediator memediasi permasalahan ekonomi yang muncul dengan memberikan pelatihan manajemen keuangan rumah tangga. Berdasarkan jawaban Informan maka dapat diperoleh hasil bahwa Bagi masyarakat Peran BUMDes dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian melalui pemberdayaan sangat baik. Melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BUMDes perekonomian masyarakat cukup terbantu untuk dapat meningkatkan perekonomiannya mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-harinya sampai dengan pengelolaan usaha dan perkembangan usahanya. BUMDes juga berperan sebagai mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan dalam usaha mulai dari masalah modal, marketing, sampai dengan pengelolaan keuangan Rumah tangga melalui pelatihan rutin yang diberikan

Fungsi Lembaga ekonomi BUMDes ini adalah sebagai Fasilitator dan Mediator penggerak dalam hal perencanaan badan usaha dan unit-unit usaha yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta bertugas untuk memberikan sosialisasi terkait dengan hasil-hasil usulan rencana usaha yang sudah ditetapkan di Badan Usaha Milik Desa, serta membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang berujung pada Pendapatan asli Desa atau PAD.

3. Stabilisator

Berperan sebagai Stabilisator dimana BUMDes melalui program pemberdayaan Masyarakat ini berusaha membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun. Berperan stabilisator menjaga stabilitas ekonomi dengan melakukan kontroling pada para pedagang dan masyarakat sekitar.

Sejak mendapatkan fasilitas dari BUMDes ini penghasilannya lumayan, dibandingkan jika hanya bertani saja. Jadi ketika sedang tidak mengelola lahan bisa berjualan, jika mengelola lahan pertanian nanti usahanya dijaga anak atau istri jadi tetap berpenghasilan tidak menunggu masa panen dari pertanian. Apalagi fasilitas yang diberikan BUMDes ini bukan hanya sewa tempat yang murah tapi juga dipinjami modal usaha, bayarnya bisa dicicil seperti koperasi. Masih juga diberi pembelajaran mengelola keuangan, jadi usahanya berjalan terus menerus.

Dengan adanya ketiga peran yang diemban oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang ini tentunya mencakup peranan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dimana BUMDes berperan sebagai pembangun dan pembangkit pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi desa serta meningkatkan kualitas kehidupan. Selain itu BUMDes juga memperkokoh perekonomian masyarakat secara nasional dengan BUMDes yang menjadi pondasinya.

Selain itu BUMDes ini memiliki usaha yang bentuknya Swalayan dan menjalin kerja sama dengan Bank BNI Syariah. Pimpinan dari BUMDes Kertoraharjo ini memberikan kewajiban bagi para stafnya untuk melakukan pembayaran zakat penghasilan yang langsung dipotong dari gaji bulanan melalui tabungan zakat di Bank BNI syariah. Pemotongan Penghasilan untuk Zakat menggunakan akad Mudharabah yang mana mekanisme pemotongan zakat yang diambil dari bagi hasil tabungan atau deposito yang khusus menggunakan akad *mudhārabah* yang diperoleh oleh nasabah.

Mekanisme dilakukan atas izin dari pihak nasabah yang bersangkutan, jika ada nasabah yang ingin membuka tabungan atau deposito maka di dalam kontrak akan ditanyai terlebih dahulu apakah ingin bagi hasil tabungan atau depositonya dipotong untuk zakat atau tidak, jika nasabah menyetujui maka pemotongan zakat dari bagi hasil tabungan atau deposito akan terproses secara otomatis oleh sistem BNI Syariah, dan di dalam kontrak tersebut disebutkan apabila tidak mencapai nisab maka

akan dijadikan sedekah, dan tanda buktinya akan tercantum dalam buku tabungan nasabah. Mekanisme pemotongan zakat tabungan dan deposito pada BNI Syariah dilakukan dalam sebulan sekali, diambil dari bagi hasil yang diperoleh nasabah. Dengan adanya Sistem Pemotongan tersebut maka Sistem pengelolaan penggajian di BUMDes Kertoraharjo menerapkan sistem Ekonomi Syariah.

B. Peran BUMDES Kertoraharjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Proses Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1. Pendekatan Sumber Daya Manusia

Hal pertama yang dilakukan oleh pengelola BUMDes sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat yakni melakukan pendekatan terhadap Masyarakat Desa Sanan Kerto. Pendekatan ini dilakukan untuk perlahan memberikan kesadaran kepada Masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh Pengurus BUMDes sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ini yakni dengan menggunakan pendekatan Mezzo. Pendekatan Mezzo yakni pendekatan yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap beberapa kelompok penerima manfaat yang dalam hal ini adalah para pedagang yang berdagang di Kawasan wisata Boonpring. Pemberdayaan ini dilakukan dengan membuat kelompok-kelompok pelatihan yang secara

tidak langsung akan mendorong kesadaran bagi masyarakat sehingga memiliki kemampuan dalam memecahkan berbagai macam permasalahan yang muncul.

Fokus dari pendekatan ini yakni meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya sebuah perubahan serta bagaimana menumbuhkan keyakinan pada masyarakat bahwa keberhasilan dalam upaya-upaya pembawa perubahan ini dapat dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat. Dalam hal ini pihak pengelolaan BUMDes ingin menyadarkan masyarakat berkenaan dengan pentingnya meningkatkan kemampuan diri dengan memanfaatkan potensi alam yang telah ada di Desa Sanankerto.

Sasaran Sosialisasi ini ditujukan kepada Masyarakat yang memiliki potensi usaha dan beberapa masyarakat yang memiliki usaha berskala kecil. Sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan kesadaran ini berikan oleh BUMDes dengan cara memperkenalkan BUMDes terlebih dahulu yang berfungsi sebagai naungan kemudian barulah pihak BUMDes perlahan memberikan kesadaran kepada masyarakat.

Pada awalnya Masyarakat masih merasa ragu, kurang tertarik, dan bahkan tidak memiliki keinginan untuk menciptakan usaha atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Seringkali ketakutan yang muncul dalam benak masyarakat adalah tidak laku dan banyaknya pesaing yang menjual produk serupa. Dengan demikian setelah adanya BUMDes yang berfungsi sebagai penabung dan fasilitator. Pihak pengelola BUMDes

bekerja sama dengan pemerintah setempat memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk dapat mengembangkan usahanya. Awalnya masyarakat tidak tertarik, namun terdapat satu dua masyarakat yang berniat untuk mencoba dan ternyata berhasil. Hal utama dalam pemberdayaan masyarakat yakni menanamkan kesadaran untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Jika masyarakat sudah sadar maka beberapa masyarakat lain akan ikut tersadarkan. Dengan demikian maka kondisi masyarakat akan turut meningkat. Baik dari segi pendapatan rumah tangga maupun dari segi fasilitas desa. Setelah beberapa masyarakat dapat membuktikan bahwa dengan berjualan produk olahan dengan BUMDes sebagai Fasilitator banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan hal serupa

2. Pelatihan dan Penguatan BUMDes

Pihak BUMDes memberikan pelatihan untuk memberdayakan Ekonomi Masyarakat. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan penguatan BUMDes ini dilakukan sendiri oleh Direktur BUMDes Bapak Samsul Arifin. Pelatihan dan Penguatan BUMDes ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dasar mengenai Manajemen Usaha, Pendampingan, Serta Hukum-hukum usaha. Jika pihak BUMDes belum mengetahui secara pasti Praktik dari Manajemen usaha, Pendampingan, dan juga Hukum usaha. Maka di khawatirkan pihak BUMDes kurang maksimal dalam mengelola usaha Masyarakat.

Sebelum BUMDes memberikan nauangan kepada masyarakat Manajemen Usaha Badan Usaha Milik Desa ini harus kuat terlebih dahulu baik dari segi Struktur, Kualitas Sumber Daya Manusia, maupun Kuat dari Segi Finansial.

Pelatihan dan Penguatan BUMDes ini dilakukan dengan memberikan pembelajaran atau kegiatan seminar usaha kepada para pengurus BUMDes. Selain itu kegiatan ini juga sering kali mengunjungi badan usaha desa lainnya untuk mempelajari hal-hal baru yang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pihak BUMDes Kertoraharjo selanjutnya setelah melakukan penyadaran terhadap masyarakat yakni penguatan dan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia dari BUMDes itu sendiri. Sama seperti perusahaan pada umumnya Pihak Direktur BUMDes ini sangat mengerti bahwa Penguatan BUMDes ini dapat terjadi ketika tingkat kebutuhan dari anggota tersebut terpenuhi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dimana kebutuhan dari manusia terutama karyawan terdiri dari lima hal. Pertama adalah Kebutuhan Fisiologis seperti sandang, pangan, papan. Dalam hal ini meskipun BUMDes merupakan badan usaha bersama milik desa namun pihak BUMDes memberikan gaji dan pemenuhan Fisiologis yang cukup kepada anggota BUMDes, hal ini bertujuan agar

pengelola BUMDes dapat memberikan upaya yang optimal untuk mengelola BUMDes. Kedua yakni kebutuhan akan rasa aman, pihak BUMDes sudah melengkapi Dokumen BUMDes agar segala upaya yang dilakukan oleh pengelola sudah memenuhi badan hukum dan perlindungan, selain itu pihak BUMDes juga memberikan Asuransi untuk perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Ketiga, yakni kebutuhan adalah rasa memiliki, dalam hal ini Direktur BUMDes senantiasa menanamkan rasa kepemilikan usaha BUMDes ini terhadap pengelolanya sebagaimana prinsip koperasi dari anggota, untuk anggota, oleh anggota. Sehingga direktur BUMDes memberikan penekanan bahwa usaha ini adalah usaha milik bersama dan kalau maju dampaknya juga akan dinikmati bersama. Keempat, Kebutuhan akan penghargaan dalam hal ini di BUMDes Kertoraharjo ini penghargaan yang diberikan yakni berupa pemberian sebagian kecil obligasi yang digunakan sebagai investasi dari anggota, sehingga pengelola BUMDes juga mendapatkan investasi. Selanjutnya ada Aktualisasi diri, dalam hal ini pihak BUMDes berupaya memenuhi aktualisasi diri dengan berbagai penghargaan yang diberikan.

3. Pelatihan Manajemen Usaha untuk para Pedagang dan UMKM

Pemberdayaan Selanjutnya yang dilakukan oleh BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang yakni memberikan Pelatihan Manajemen usaha untuk para Pedagang dan

UMKM yang ada di Wisata lokasi Ekowisata Boonpring. Kegiatan pelatihan manajemen usaha dilakukan oleh Kepala Unit Usaha Boonpring yakni Bapak Mahrodi, pelatihan ini diberi nama “Pelatihan Manajemen Usaha dan UMKM” dalam kegiatan pelatihan ini pihak BUMDes bekerja sama dengan melibatkan beberapa pihak seperti Badan pemerintahan desa dan pemerintah kabupaten bagian kepariwisataan, pihak kabupaten bagian perdagangan dan pemberdayaan UMKM, Dosen dari beberapa kampus yang konsen menangani pemberdayaan UMKM. Pelatihan manajemen usaha dilakukan setiap tahun untuk kontroling terhadap usaha dan UMKM yang beroperasi di kawasan Wisata Boonpring. Dengan adanya pelatihan manajemen usaha ini masyarakat dapat mengerti bagaimana mengatur dan mengelola usaha meskipun sifatnya pedagang kecil dan UMKM.

BUMDes berfungsi membimbing dan memberikan pengarahan terhadap pihak pedagang agar usahanya lambat laun dapat meningkat atau setidaknya bisa bertahan lama meskipun kondisinya usahanya pasang surut. Pihak BUMDes memberikan pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan dan sumber daya modal usaha

4. Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga

Setelah pihak BUMDes melakukan pelatihan terhadap manajemen usaha dan juga pengelolaan UMKM selanjutnya pihak BUMDes memberikan pendampingan yang berupa pelatihan pengelolaan ekonomi

rumah tangga. Pendampingan pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga ini dilakukan lebih intens dari pada Pelatihan manajemen usaha.

Pihak BUMDes secara sengaja melakukan pendampingan ini lebih sering dibandingkan pelatihan manajemen usaha lantaran pihak BUMDes merasa bahwa pendampingan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes sebagai bentuk penyertaan masyarakat dalam hal pengembangan berbagai potensi yang ada sehingga masyarakat mampu mencapai kualitas kehidupan yang terus meningkat. Selain itu pendampingan terhadap ekonomi rumah tangga ini diarahkan untuk memberikan pertimbangan dalam hal memutuskan penggunaan uang untuk kebutuhan primer dan kebutuhan tersier.

Tujuan utama dilakukannya pelatihan terhadap ekonomi rumah tangga ini adalah kemandirian. Jika pada awal usahanya pihak pedagang beberapa bagian mendapatkan bantuan dari pihak BUMDes dengan adanya manajemen terhadap ekonomi rumah tangga ini setiap pedagang dapat berupaya secara mandiri dalam mengelola keuangan rumah tangganya. Dengan adanya pelatihan manajemen keuangan rumah tangga ini pada pedagang dapat meminimalisir pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan yang bersifat bisa di tunda atau tidak terlalu penting. Dalam hal ini pihak BUMDes juga menekankan untuk tidak menggunakan pinjaman modal untuk kebutuhan pribadi sehingga kegiatan usaha tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini kegiatan pendampingan ini pelatihan ekonomi rumah tangga ini dilakukan bapak Abdullah Faqih beserta anggota BUMDes kertoraharjo lainnya. Sehingga masyarakat selain sadar juga tertanam pola pikir dan pola pengelolaan keuangan rumah tangga yang baik. Meskipun pada awalnya beberapa masyarakat merasa acuh dan merasa ini kurang perlu namun pihak BUMDes perlahan terus meyakinkan masyarakat bahwa hal ini perlu dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga yang diukur dari usaha.

5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata.

Upaya pemberdayaan selanjutnya yakni peningkatan Kapasitas kelompok Sadar Wisata. Hal ini sangat penting mengingat saat ini kapasitas sampah yang dihasilkan oleh kegiatan wisata cenderung meningkat dan banyaknya wisata alam yang bukan merawat justru merusak alam.

Pihak BUMDes memang tidak dapat mengawasi satu persatu wisatawan yang berkunjung ke wisata Boonpring akan tetapi dengan peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata ini diharapkan setiap orang dapat lebih tertib untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjadikan lingkungan wisata lebih asri dan terjaga. Selain itu peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata ini bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat agar jika berwisata tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merusak alam.

Dapat diketahui bahwa pada Ekowisata Boonpring ini kelompok sadar wisata yang ingin ditingkatkan menekankan pada aspek kebersihan dan perawatan tempat wisata. Sebagaimana secara umum Kelompok Sadar Wisata ini memiliki fungsi yakni Penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata. Sehingga bisa jadi bukan hanya Boonpring saja yang dapat menjadi destinasi wisata akan tetapi juga terdapat banyak lokasi lainnya yang dapat digunakan sebagai tempat wisata di Desa Sanankerto tanpa merusak lingkungan. Selain itu Kelompok sadar wisata ini juga berperan sebagai Mitra dari pemerintah untuk mewujudkan pengembangan sadar wisata daerah. Jika kelompok sadar wisata ini aktif dan meningkat, pihak BUMDes memprediksi bukan hanya masalah kebersihan di lingkungan Boonpring yang dapat teratasi namun juga muncul lokasi wisata lainnya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan di Desa Sanankerto.

6. Pemberian Kursus Bahasa Inggris

Selanjutnya yakni Kursus Bahasa Inggris, pemberdayaan dengan memberikan kursus bahasa inggris ini tentunya berkaitan dengan tujuan Boonpring jangka panjang. Bidikan Wisatawan dari Boonpring ini bukan saja penduduk domestik akan tetapi juga wisatawan manca negara. Sehingga untuk dapat memperkenalkan Wisata Boonpring ini kepada wisatawan manca negara memerlukan adanya Tour Guide. Kursus Bahasa Inggris ini diberikan kepada para masyarakat yang telah tamat pendidikan

Menengah Atas atau SMA. Diharapkan kelak ketika banyak wisatawan manca negara ini berdatangan, masyarakat dapat menjadi Tour Guide di Wilayah Ekowisata Boonpring ini. Mimpi ini bukan tidak mungkin, jika melihat dari pencapaian Usaha Boonpring dan BUMDes ini setiap tahunnya terus meningkat, bukan tidak mungkin untuk mengembangkan wisata sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk kunjungan wisatawan manca negara.

Hasil Tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Musya Asy'Arie dimana ia berpendapat bahwa berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka perlu adanya dorongan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat, maka perlu adanya dorongan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausaha, dengan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk mampu bersaing di dunia wirausaha. Adapun beberapa program pembinaan berkelanjutan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut:

a. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini, peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan, dengan segala macam permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan dari kelompok swadaya masyarakat adalah dengan memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual, sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta, disamping

diharapkan peserta memiliki pengetahuan teoritis. Dengan melalui pelatihan seperti ini peserta diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan.

b. Pendampingan

Pada tahap ini, yaitu ketika usaha itu dijalankan maka calon wirausaha akan didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional, yang berfungsi sebagai pengarah maupun sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar mampu dan berhasil dikuasai dan dijalankan.

c. Pemagangan

Pemagangan yang dimaksudkan adalah pemagangan peserta di perusahaan yang berkaitan dengan rencana usaha yang selanjutnya akan dipilihnya. Pemagangan dinilai sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan diluar usaha. Tanpa adanya pengenalan terhadap realitas usaha secara intens dan empirik maka akan memberikan kesulitan bagi seseorang yang akan memulai usahanya.

d. Permodalan

Permodalan merupakan aspek penting dalam dunia usaha, akan tetapi bukan terpenting. Sehingga untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, maka perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha itu sudah dirintis dan menunjukkan prospek cukup baik.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai peran Pemberdayaan Ekonomi masyarakat dalam pandangan syariah, terlebih dahulu membahas aspek-aspek berikut:

1. Penerapan Maqasid Syariah dalam BUMDes melalui Pemberdayaan

BUMDes kertoraharjo ini berdiri lantaran adanya kepentingan bersama dan tujuannya untuk kesejahteraan bersama melalui program-programnya. BUMDes Keroraharjo di Unit usaha Boonpring juga sudah memenuhi konsep Ekonomi syariah Maqasid Syariah dimana pada Prinsip Maqasid Syariah ini yang dikedepankan adalah Kemaslahatan bersama. Terlebih konsep ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional jelas berbeda. Jika pada ekonomi Konvensional fokus memperkaya individu

atau dalam hal ini bisa jadi pihak BUMDes menerapkan uang sewa yang mahal dan tidak memberikan modal maupun pelatihan, atau acuh tak cuh terhadap perkembangan ekonomi sekitar dan yang penting pendapatan BUMDes meninggi. Dalam Hal ini Sebagaimana Konsep Ekonomi Syariah yang mengedepankan nilai kebersamaan bahkan sampai ke taraf perekonomian, berusaha meminimalisir ketimpangan ekonomi. Hal yang dilakukan pengelola BUMDes adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat baik lapak, modal sampai dengan pelatihan. Sehingga bukan hanya BUMDes yang tumbuh akan tetapi juga perekonomian masyarakat sekitar yang dalam hal ini pedagang di Ekowisata Boonpring.

Temuan penelitian ini searah dengan teori dari Maqasid Syariah ini yakni Secara konsep Maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariah atau secara mudah dapat dipahami bahwa Maqasid Syariah yakni Tujuan-tujuan syariah yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan utama dari adanya Maqasid Syariah ini adalah untuk kemaslahatan. Masalah sendiri artinya adalah segala sesuatu yang dapat diraih atau diperoleh manusia dengan manfaat atau menghindari kerusakan.

Dalam Maqasid Syariah ini terdapat 3 Aspek utama yang diklasifikasikan berdasarkan kepentingan masing-masing, diantaranya:

a. Menjaga Al- Daruriyat

Ad daruriyat ini adalah sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan. Jika tidak dapat dilakukan

maka dapat dipastikan akan membawa ketidak berartian kehidupan. Dalam hal pemberdayaan ini Menjaga Ad daruriyat adalah dapat diartikan dengan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan agama, tidak melanggar larangan dan selalu mentaati perintah agama. Menjaga jiwa yakni melindungi sarana dan prasarana agar tidak menyebabkan kerugian, menjaga akal dari fikiran-fikiran untuk berbuat buruk, menjaga harta agar tetap berkembang dan mensejahterakan umat.

b. Menjaga Al Hajiyat

Al Hajiyat adalah persoalan atau hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk menghindari kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Hal ini berfungsi untuk meringankan masalah dan mempermudah manusia. Hukum islam tidak serta merta kaku, pada beberapa hal dan beberapa kondisi yang tentunya darurat hukum islam memiliki fleksibilitas sehingga memudahkan dan membuat umat selalu mendapatkan jalan setiap permasalahan.

c. Menjaga Tahsiniah

Menjaga Tahsiniah yakni menjaga maslahat yang fungsinya untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Jika kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan maka tidak

menyebabkan kegoncangan atau tatannan manusia, karena kemaslahatan ini hanya merujuk pada memperindah.

2. Prinsip Pengelolaan BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Proses pengelolan BUMDes ini sudah sesuai dengan ekonomi Syariah dimana dalm ekonomi syariah Prinsip pengelolaan BUMDes ini terdapat Syirkah atau kerja baik dari segi permodalan sampai dengan segi pengelolaan. Keikutsertaan dimana dalam BUMDes Kertoraharjo ini seluruh masyarakat terlibat dan pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat Sanankerto untuk masyarkat sanankerto sendiri. Transparansi, seluruh kegiatan, pembiayaan, pengeluaran, rencana pembangunan, sampai dengan keuntungan seluruhnya tercatat secara rinci dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Akuntabel, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh BUMDes sudah diperhitungkan baik dari sisi pendanaan, dampak terhadap alam, sampai dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sampai saat ini tidak ada masalah berarti yang menimbulkan perpecahan masyarakat dan pelanggaran Norma Syariah.

Hal ini relevan dengan teori mengenai prinsip pengelolaan BUMDes menurut Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Kerja sama (Syirkah)

Antar manusia harusnya saling melakukan kerjasama dalam mejalankan semua kegiatannya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam segala bidang,

seperti dalam bidang ekonomu ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan secara bersama-sama bukan hanya untuk perorangan saja. Karena itu, dalam membangun sebuah usaha Islam juga memperhatikan tujuan utama ekonomi Islam tersebut.

Dalam Islam tidak diperkenankan orang yang mempunyai usaha kemudian melibatkan orang lain dalam usahanya hanya untuk mencari keuntungan pada dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain yang terlibat dalam usahanya. Apabila dia mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberikan upah yang sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan orang tersebut atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati berdua. Begitu juga apabila mereka melakukan proses kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usahanya. Proses kerjasama dalam Islam tersebut dikenal dengan istilah syirkah.¹¹⁸

b. Keikutsertaan (Partisipatif)

Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang

¹¹⁸Ismail Nawawi, *Bisnis Ekonomi* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 438.

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Keikutsertaan atau kontribusi seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan tidak akan lepas dari kewenangan dan tanggung jawab. Pemberian kewenangan ini mutlak dalam suatu sistem manajemen untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas atau kerja yang dibebankan kepada seseorang. Tanpa adanya kewenangan, seseorang akan mengalami keraguan dalam melaksanakan tugasnya, yang pada akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik¹¹⁹.

c. Transparansi

Basel comitte mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik, sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah hasil dari transparansi, transparansi dapat diraih jika suatu pihak

¹¹⁹Ibid.

mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai¹²⁰

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (QS. An-Nahl: 105)*

Maksud dari ayat tersebut adalah hanya orang-orang yang tidak beriman yang melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan informasi yang diperoleh sejelas, akurat, dan relevan.

d. Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDes berarti bahwa semua kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya dan semua kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi dan jelas. Prasetio (2017) menuliskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah

¹²⁰M.Umar Chapra, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 87.

kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal¹²¹

Menurut Triyuwono (2006), akuntabilitas sebenarnya terdiri dari dua bagian besar yaitu akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas secara vertikal adalah akuntabilitas yang menyangkut pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. (QS. Al-Isra': 36).

3. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen menurut Pandangan Syariah.

BUMDes Kertoraharjo ini berperan sebagai penggerak perekonomian dimana dalam hal ini BUMdes mengemban peranan yang

¹²¹Prasetio, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas, (Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, No. 1, 2017), 20.

cukup penting yakni sebagai Fasilitator, Mediator, serta stabilisator. Seluruh kegiatan yang ada di BUMDes ini selalu mengedapnkan kerja sama baik dari segi permodalan sampai dengan segi pengelolaan. Keikutsertaan dimana dalam BUMDes Kertoraharjo ini seluruh masyarakat terlibat dan pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat Sanankerto untuk masyarkat sanankerto sendiri. Transparansi, seluruh kegiatan, pembiayaan, pengeluaran, rencana pembangunan, sampai dengan keuntungan seluruhnya tercatat secara rinci dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Akuntabel, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh BUMDes sudah diperhitungkan baik dari sisi pendanaan, dampak terhadap alam, sampai dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sampai saat ini tidak ada masalah berarti yang menimbulkan perpecahan masyarakat dan pelanggaran Norma Syariah.

Dalam pelaksanaanya pihak BUMDes memang tidak membatasi seluruh masyarakat untuk berperan dan aktif dalam kegiatan BUMDes, pihak BUMDes tidak membatasi masyarakat berasal dari dusun manapun atau keluarga siapapun atau bahkan beragama apapun. Seluruh warga masyarakat berhak mendapatkan peningkatan kualitas ekonomi dan pendapatan. Sehingga merasakan bahwa kehadiran BUMDes ini bukan saja demi kepentingan pemerintah desa akan tetapi juga demi kepentingan masyarakat. Bahkan beberapa informan menyatakan peran BUMDes dalam pemberdayaan ini sangat terasa, ukurannya bukan saja hanya dari PAD yang diberikan desa akan tetapi kentungan penjualan dan

peningkatan ekonomi masyarakat sekitar juga turut meningkat.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori bahwa Jika proses pemberdayaan sudah bertujuan untuk kemaslahatan maka dalam islam sangat dianjurkan bahwa dalam menjalankan bisnis bersama ini juga memperhatikan etika bisnis secara islam dimana dalam islam bukan semata keuntungan yang hendak diraih akan tetapi juga keberkahan. Pengelolaan BUMdes harusnya dilakukan secara jujur, *Shidiq, amanah*, dan adil. Produk atau bisnis yang dijalankan bukanlah produk yang diharamkan atau dilarang dalam islam, dan menghindari kecurangan-kesurangan seperti rekayasa permintaan barang dan sebagainya.

Meskipun sifat dari pemberdayaan ini adalah mengangkat ekonomi masyarakat secara bersama-sama akan sangat dimungkinkan terjadi diskriminasi atau kecurangan dalam pengelolaan. Sedangkan dalam pandangan etika bisnis islam dan maqasid syariah hendaknya kecurangan semacam ini dihindari. Dalam bisnis harusnya mengedepankan nilai islami seperti kesatuan, keseimbangan, kebenaran, dan kejujuran.¹²²

¹²²Muhamad Fauroni dan Luqman, *Visi Al-Qur'an tentang Etika Bisnis*, (JAKARTA: Salemba Diniyah, 2002) Hal. 10

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya mengenai Peran BUMDes Kertoraharjo Dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sanankerto adalah sebagai berikut:

1. Peran BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto dalam Implementasi Ekonomi Syariah masyarakat Desa Sanankerto adalah sebagai Fasilitator yang memberikan fasilitas untuk masyarakat yang dalam Unit Usaha Boonpring ini tentunya ada fasilitas Lapak berjualan, Modal, serta menjadi Karyawan pengelolaan Unit Usaha Boonpring. Kedua, yakni Berperan sebagai mediator yang memediasi seluruh proses usaha dan membantu masyarakat dalam pemecahan seluruh permasalahan dalam usaha mulai dari masalah modal, marketing, sampai dengan pengelolaan keuangan Rumah tangga melalui pelatihan rutin yang diberikan. Ketiga yakni berperan sebagai Stabilisator dimana BUMDes melalui program pemberdayaan Masyarakat ini berusaha membantu ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun pendapatan naik turun.
2. BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa Sanankerto melakukan pendekatan Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Penguatan BUMDes, Pelatihan Manajemen Usaha untuk para Pedagang dan UMKM,

Pelatihan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga, Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata, Pemberian Kursus Bahasa Inggris. Proses pengelolaan BUMDes ini sudah sesuai dengan ekonomi Syariah dimana dalam ekonomi syariah Prinsip pengelolaan BUMDes ini terdapat Syirkah atau kerja baik dari segi permodalan sampai dengan segi pengelolaan. Keikutsertaan dimana dalam BUMDes Kertoraharjo ini seluruh masyarakat terlibat dan pengelolaan dilakukan oleh Masyarakat Sanankerto untuk masyarakat sanankerto sendiri. Transparansi, seluruh kegiatan, pembiayaan, pengeluaran, rencana pembangunan, sampai dengan keuntungan seluruhnya tercatat secara rinci dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Akuntabel, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh BUMDes sudah diperhitungkan baik dari sisi pendanaan, dampak terhadap alam, sampai dengan kesejahteraan masyarakat sehingga dicapailah aspek utama Maqasid Syariah yakni terjaganya Al-Daruriyat yakni terhindar dari pelanggaran seperti diskriminasi dan perbuatan buruk. Terjaga dari Al Hajiyat sehingga permasalahan dapat dipermudah, dan terjaga dari tahsiniah yakni budi pekerti manusianya dapat diperbaiki. Selain itu untuk para pegawai di BUMDes dipotong gajinya untuk Zakat Tahunan, atau dilakukan pemotongan untuk simpanan zakat. Sehingga gaji yang diterima pegawai adalah gaji bersih yang sudah dikurangi zakat.

B. Implikasi

Implikasi Teoritis dari penelitian ini erat hubungannya dengan temuan peneliti di lapangan bahwa Implikasi BUMDes dalam Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sudah sesuai dengan point teori serta maqasid syariah. Dalam Implikasi Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah menjadikan aspek Maqasid Syariah sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan unit usahanya.

C. Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ditujukan untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Pihak BUMDes Kertoraharjo

Peneliti berhadap pihak BUMDes Kertorahajo dapat membaca peluang pariwisata lainnya yang terletak di Desa Sanankerto agar Potensi Desa tersebut dapat digunakan secara maksimal. Misalnya pembuatan pemandian air hangat disekitar Boonpring, atau wisata lainnya atau juga terdapat wahana dan spot foto yang terus dilakukan pembaharuan sehingga wisatawan selain bertujuan ke Boonpring ada lokasi lain yang hendak dituju sehingga wisatawan tidak bosan dan selalu penasaran untuk berkunjung.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap bahwa akan terdapat lanjutan penelitian lain sebagai penyempurna dari penelitian ini tentunya dengan menambahkan variabel lain seperti Pendapatan Asli Desa atau prinsip syariah lain yang belum dicantumkan dalam penelitian ini demi kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alqur'an Alkarim

Ariesto Hadi,Sutopo, terampil mengolah data kualitatif dengan NVIVO, Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup 2010

Arikunto,Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

aziz,Abdul, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro Yogyakarta: graha Ilmu
2008

Bashith Abdul, Ekonomi Kemasyarakatan, Malang: UIN-Maliki Press, 2012

Bashith,Abdul, Ekonomi Kemasyarakatan Malang: UIN Maliki Press, 2012

Basrowi,Suwandi, Memahamami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka cipta 2009

Burhan,Bungin, penelitian kualitatif Jakarta: Kencana, 2007

Data jumlah pengunjung unit usaha ekowisata BUMDes kerto raharjo desa
sanankerto tahun 2017 sampai 2019.

Dominick,Salvatore, prinsip-prinsip ekonomi, Jakarta: Erlangga 1991

Herdiansyah Haris, metode penelitian kualitatif Jakarta: Salemba Humanika 2010

Humaidi,Ismail, Peningkatan perekonomian masyarakat melalui industry kecil:
studi terhadap masyarakat industri kecil di desa tutul kecamatan balung
kabupaten jember jawa timur. Universitas islam negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2015

Kementrian Desa Daerah tertinggal diakses pada 4 Februari 2018

Kusuma Yudha,Erika, Peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kerajinan
tangan anyaman bambo di desa rimpak kecamatan sapuran kabupaten
wonosobo, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, 2017

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta: 1995

- Mahmudi Ismail,Nur, strategi pemberdayaan umat dan pencetakan SDM unggul
Bandung: ISTECS, 2001
- Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa
jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030.
- Moleong, Lexy J, penelitian kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 1995
- Mubyarto, A Development Alternative for Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada
Press, 2003
- Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Grasindo, 2010
- Siagian, S.P, Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. Jakarta: Rineka
Cipta. 1992
- Sugiono, memahami penelitian kualitatif Bandung: Alfabeta, 2008
- Suryati, Usaha Pengrajin Terasi dalam meningkatkan perekonomian keluarga
menurut ekonomi Islam (studi kasus Desa Kualu merbau kecamatan
merbau kepulauan meranti), Skripsi SE, Riau: Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau, 2012
- Sutoro Eko. dalam Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi. 2013
- Totok, Mardikanto, dan Soebiato Poerwoko Pemberdayaan Masyarakat, Bandung:
Alfabeta, 2017
- totok, Mardikanto, dan soebiato Poerwoko, pemberdayaan masyarakat Bandung:
Alfabeta
- Undang-undang no 14 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Yatmo Hutomo, Mardi, pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ekonomi :
Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000

Yatmo,Mardi, Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi:
Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000

Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternatif Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2007

JURNAL

Adhari Agus, Ismaidar, Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 1 November 2017

Agusliansyah, Khairul, “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 4, 2016

Berlian Ramadana, Coristya, Heru Ribawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 1, No. 6

Disampaikan oleh Yayasan Penabulu dalam Rapat Telaahan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kementerian Desa PDTT tentang Konteks Pemberdayaan Masyarakat dalam Permendesa No. 4/2015 dan Permendagri No. 39/2010 di Jakarta, 27 Mei 2016.

Eni Maryani dan Zulkmaini, *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 5 no 1, 2014

Gemayana,Iswan, strategi pemerintah kabupaten sukamara dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat,jurnal Wacana Vol. 13 No. 1 Januari 2010

Hardijono,Rachmat, Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes), dalam jurnal IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), Volume 3, Issue 2, Apr 2014

- Hidayati, Umi. Performance Analysis of Village-Owned Enterprise Managers as a Basic of Designing Education and Training, *European Journal of Business and Management*, Vol.7, No.32, 2015
- Indra Mayu,Welli, Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, *JOM Fisip* Vol. 3 No. 2 oktober 2016
- Prasetio, Januar Eko, Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas, *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, No. 1, Vol. 12017.
- Rahmadanik,Dida Peran BUMDes dalam pemberdayaan dalam masyarakat cokro kembang kec, ngadirojo kabupaten pacitan, <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/1293>.
- Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal, Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (studi pada BUMDes desa pekan tebih kecamatan kepenuhan hulu kabupaten rokan hulu), *Jurnal of Rural and Development*, 2016.
- Samsinas, kajian tokoh sejarah dan ilmu-ilmu sosial, *Jurnal Hunafa*: Vol. 6, No. 3, Desember 2009
- Sembiring,Sentosa, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, *Kertha Patrika* Volume 39, Nomor 1, April 2017
- Sri Kusuma Dewi,Amalia, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa, *Jurnal of Rural and Development* Volume V no 1, Universitas Brawijaya, 2014
- Yusuf Agunggunanto,Edy, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Miik Desa (BUMDes), dalam *jurnal BISNIS*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016

Zulkarnain,Ridlwana, urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pembangunan perekonomian desa, jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 3 2014

INTERNET/WEBSITE

<https://bapenas.jatiprov.go.id/index.php/program/kegiatan-ppm/278-pengembangan-BUMDes> diakses pada 4 Februari 2018

<https://bapenas.jatiprov.go.id/index.php/program/kegiatan-ppm/278-pengembangan-BUMDes>

<https://www.aminjaya.desa.id> diakses pada 11 Februari 2018

<https://kumparan.com/tugumalang/wisata-boon-pring-dan-alas-lestari-raih-penghargaan-ista-2019-1rwaNUiQrJw> Diakses tanggal 10 september 2019.

<https://www.malangpostonline.com/Malang-Raya/Kabupaten-Malang/2019-05/16848/jambore-BUMDes-bangun-ekonomi-masyarakat-desa> Diakses tanggal 10 November 2019

www.bkbn.go.id diakses pada 11 February 2018

www.kerjanya.id diakses pada 4 Februari 2018

Lampiran 1: Surat Izin Wawancara dari Kampus UIN Maliki Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-122/Ps/HM.01/09/2021
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

22 September 2021

Kepada
Yth. **Ketua BUMDes Kerto Raharjo Desa Sanan kerto**

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Desiy Findiya Yuniardika
NIM : 17801006
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M. EI
2. Dr. Siswanto, M. Si
Judul Tesis : Peran Badan Usaha Milik Desa pada Implementasi Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi pada BUMDes Kerto Raharjo Unit usaha Ekowisata Boonpring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Wahidmurni
Wahidmurni

Lampiran 2: Surat Izin Wawancara dari BUMDes Kertoraharjo Desa Sanankerto



BADAN USAHA MILIK DESA SANANKERTO
“KERTO RAHARJO”
 Jl. Kauman RT 15 RW 03 Desa Sanankerto Kec. Turen KP 65175

SURAT KETERANGAN

No : 018/ BUMDes-Kerto Raharjo-IX/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. S. Samsul Arifin, M.Si**
 NIP : -
 Jabatan : **Direktur Utama**

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **Desiy Findia Yuniardika**
 NIM : **17801006**
 Program Studi : **Magister Ekonomi Syariah**

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan Judul Tesis “ **Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah**” yang berlokasi di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanankerto, 22 September 2021

Direktur BUMDes “Kerto Raharjo”

Drs. H. S. Samsul Arifin, M.Si

Lampiran 3: Dokumentasi penelitian







Lampiran 4: Foto Kegiatan BUMDes











